

**INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

Rina Esti Wulandari, SE  
L4D002130



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Juni 2004



**RINA ESTI WULANDARI**  
NIM L4D002130

# **INTERAKSI KEWILAYAHAN KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**RINA ESTI WULANDARI**  
L4D002130

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal Juni 2004

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

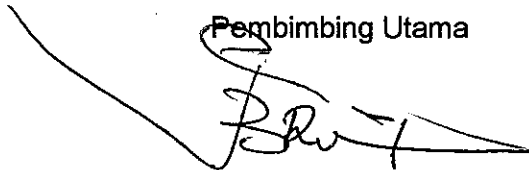
Semarang, Juni 2004

Pembimbing Pendamping




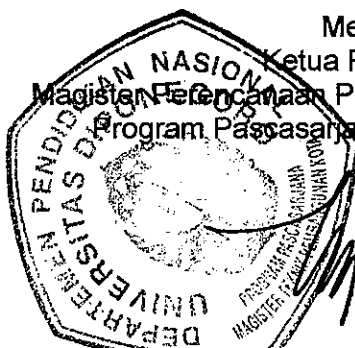
M. Mukti Ali, SE, MSI

Pembimbing Utama



PM. Broto Sunaryo, SE, MSP

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

*"....Katakanlah: Samakah orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan ? Sesungguhnya yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang mempunyai pikiran...." (QS. 39:9)*

*Keberuntungan adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan*

*Oprah Winfrey*

*Aku tidak takut badai, karena dengan menembus badai aku belajar mengemudikan perahu*

*Louisa May Alcott*

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

- ♥ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan restu dan dukungan sepenuhnya
- ♥ Suami tercinta yang merelakanku mengabaikan tugas rumah tangga demi terselesaikannya tesis ini.... *I Love You So Much*
- ♥ Saudara-saudaraku: Mbak Lies, Mas Dedy, Mas Ika, Mas Sony, Dik Nta.. terimakasih untuk segala perhatian, doa dan cinta untukku
- ♥ Dua jagoan bandel Kakap VII/20: Opie n Nino yang selalu memberi warna ceria dalam hidupku.

## ABSTRAK

Secara fisik Kecamatan Depok memiliki keterkaitan dengan Kota Yogyakarta karena adanya dukungan beberapa jaringan jalan, yaitu jalan arteri Yogya-Solo, Ring Road Utara, Jalan Kaliurang, dan Jalan Gejayan. Selain itu, Kecamatan Depok memiliki Sub Terminal Condongcatur yang merupakan tujuan pemberhentian bis Kota yang paling utara. Keterhubungan secara fisik dengan wilayah lain, utamanya Kota Yogyakarta ada kemungkinan telah menghasilkan “cascade effect”, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan lain. Akibatnya kemudian adalah terjadinya proses pembangunan di Kecamatan Depok.

Beberapa gambaran yang mungkin dapat menjadi indikasi adanya interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah langkanya lahan terbuka di Kota Yogyakarta, sementara di Kecamatan Depok terjadi kecenderungan perubahan guna lahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini ingin melihat secara lebih dalam interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta. Adapun interaksi wilayah yang akan diteliti meliputi keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial, dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui intensitas interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta yang meliputi ketiga keterkaitan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Informasi tentang intensitas interaksi dapat digunakan untuk mengidentifikasikan ketergantungan antar wilayah geografis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta sehingga dapat dijadikan masukan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Pemerintah Kecamatan Depok dalam mengatasi efek negatif yang mungkin timbul dari adanya ketergantungan terhadap Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian secara keseluruhan terhadap keterkaitan ekonomi menunjukkan bahwa interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Ini berarti Kecamatan Depok secara ekonomi tidak tergantung kepada Kota Yogyakarta. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial, yang berarti fasilitas sosial yang disediakan pemerintah di Kecamatan Depok sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Untuk keterkaitan sosial, intensitas interaksinya juga lemah. Ini berarti kurang ada kedekatan penduduk secara sosial dengan Kota Yogyakarta. Dari ketiga keterkaitan tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah interaksi dengan intensitas lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa bagi penduduknya Kecamatan Depok telah memiliki kedudukan yang relatif seimbang dengan Kota Yogyakarta. Meskipun secara keseluruhan intensitasnya lemah, beberapa variabel interaksi menunjukkan masih tergantung pada Kota Yogyakarta. Untuk menguranginya direkomendasikan agar Pemkab Sleman mengatasi hambatan dalam berinteraksi yaitu dalam hal transportasi dan permodalan. Selain itu Pemkab Sleman juga diharap waspada agar wilayah Kecamatan Depok tidak berkembang menjadi terlalu padat karena akan mengandung efek-efek negatif. Sementara untuk studi lanjutan direkomendasikan agar dilakukan perhitungan dengan model Interregional I-O, memperbanyak jumlah sample, mengobservasi Kota Yogyakarta, dan menggunakan pendekatan induktif agar diperoleh gambaran lebih sempurna

## ABSTRACT

*Physically, Depok District in Sleman Regency is linked by road to Yogyakarta Municipal, such as Yogya-Solo Highway, North Ring Road, Kaliurang Street and Gejayan Street. Supporting to the linkage, Depok District also has bus sub station in Condongcatur which is become the north end destination for city bus. Physical linkage with other region, in this case with Yogyakarta Municipal, give possibility to create "cascade effect", making other activities and linkages possible. As the result, development process occur in Depok District.*

*Some description that might give indication to the existence of Depok District's interaction to Yogyakarta Municipal is the scarcity of open space in Yogyakarta Municipal. Meanwhile, Depok District's land use tend to change due to land conversion from agricultural usage to non agricultural usage. Considering to those conditions, this study aim to get deeper information about Depok District's interaction to Yogyakarta Municipal. The regional interaction tried to be studied is economic linkage, social interaction linkage, and social service linkage.*

*The goal to be reach in this study is to get information of the intensity of Depok District's interaction to Yogyakarta Municipal. This information of interaction intensity could be used to identify interdependence between geographical areas. Based on that, the result is hoped to give any description of Depok District's dependencies to Yogyakarta Municipal that can become input for local government and for the government of Sleman Regency in dealing with the negative impact of the dependencies to Yogyakarta Municipal.*

*The result of the study on economic linkage shows that Depok District's interaction to Yogyakarta Municipal is weak. It means there is no economic dependencies of Depok District to Kota Yogyakarta. For the social linkage and social service linkage, results of the study is the same as on economic linkage. It means there is lack of social relation and that Depok District has meet the needs of its people for social services. From those result of the three linkages, it can be concluded that Depok District's regional interaction to Yogyakarta Municipal is weak. Therefore, it can be said that, for its people, Depok District has an equal position compared to Yogyakarta Municipal. Although as a whole Depok District's regional interaction is low, some of the interaction variable still shows dependencies to Yogyakarta Municipal. To reduce those dependencies, it is recommended for Sleman Regency Government to overcome the obstruction, which is according to the respondents are on transportation and on the equity ability. Sleman Regency Government also hoped to be aware of the negative impact of the interaction in order to hinder the occurrence of unplanned regional development.*

*For the further study, it is recommended to apply interregional input-output model, using more sample, and involve observation on Yogyakarta Municipal.*

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dipanjatkan hanya untuk Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin-Nya Tesis ini dapat diselesaikan. Keberhasilan pengerjaan dan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang disebutkan dibawah ini :

- 1 Bpk. Kepala Pusat Pendidikan dan Keahlian Teknik (PUSDIKTEK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Kimpraswil, yang telah memberi tunjangan belajar sampai selesainya studi ini
- 2 Bpk. Kepala Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Pengembangan Prasarana Wilayah (KPDMPW) Semarang yang telah memberikan pendampingan dan bimbingan selama masa belajar di Semarang.
- 3 Prof. Dr. Ir. Sugiono Sutomo, DEA selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- 4 PM Broto Sunaryo, SE, MSP selaku Mentor dan M. Mukti Ali, SE, MSi selaku Co Mentor yang dengan ketulusan, kearifan dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
- 5 Ir. Sidarta Saelan, MM selaku Dosen Pembahas dan Mulyo Hendarto, SE, MSP selaku Dosen Penguji atas bantuan dan masukannya demi kesempurnaan tesis ini.
- 6 Seluruh dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
- 7 Keluarga Suwandi dan Tondo Amijoyo terkasih serta suami tercinta yang telah memberikan dorongan semangat, penuh kerelaan dan pengertian yang mendalam.
- 8 Teman-teman kuliah MPPWK II yang telah menjadi teman diskusi dan memberikan dorongan semangat yang sangat berarti. *Special Thanks to* Wong Mei Hoa (Aku banyak hutang budi atas fasilitas komputernya selama di asrama & *support*-nya untuk tidak mudah menyerah), Hasto & 'Encik' Wan atas bantuannya selama persiapan sidang, bang Agus & 'Pak Uwo' Kussarwono atas pinjaman komputernya untuk presentasi, Mas Andri atas ungkapannya "*ojo nganti maju ra wani, mundur ngisin-isini*" (aku benar-benar terpacu karenanya), Fuad 'Aremania' (aku tahu dibalik

ledekanmu itu ada *support* untukku, suwun yo cak...), mas Radit dan mas Setya teman seperjuangan dalam asistensi (aku lega kita bisa wisuda bersama-sama)

- 9 Teman-teman di Bagian Perekonomian, Setda Kabupaten Sleman, teman-teman di Bidang Fispra, Bappeda Kabupaten Sleman dan teman-teman di Kecamatan Depok atas dukungan dan bantuan datanya.
- 10 Sahabat-sahabatku: Lucy, Ifa, Santi, Heni, Bento, Aan, Rossi (Doa dan bantuan kalian telah banyak membantuku, *thanks guys*....)
- 11 Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Kami menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, kami terbuka atas saran dan kritik demi perbaikan tulisan ini.

Semarang, Juni 2004

Penyusun

Rina Esti Wulandari



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan masalah	5
	1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi	7
	1.3.1. Tujuan Studi	7
	1.3.2. Sasaran Studi	7
	1.3.3. Manfaat Studi	8
	1.4. Ruang Lingkup	9
	1.4.1. Ruang Lingkup Materi	9
	1.4.2. Ruang Lingkup Spasial	10
	1.5. Kerangka Alur Pikir Penulisan	13
	1.6. Pendekatan dan Metoda Pelaksanaan Studi	15
	1.6.1. Pendekatan Studi	15
	1.6.2. Metoda Pelaksanaan Studi	15
	1.6.3. Jenis dan Kebutuhan Data	16
	1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	17
	1.6.5. Teknik Sampling	18
	1.6.6. Metoda dan Alat Analisis	22
	1.7. Sistematika Penulisan	27

BAB II.	KAJIAN TEORI INTERAKSI KEWILAYAHAN	29
	2.1. Pengertian Interaksi	29
	2.2. Pengertian Wilayah	31
	2.3. Interaksi Wilayah	34
	2.3.1. Dasar-Dasar Terjadinya Interaksi Wilayah	35
	2.3.2. Jenis-jenis Interaksi Wilayah	38
	2.3.3. Peran Interaksi Kewilayahan dalam Pengembangan Wilayah	43
	2.4. Sintesa Kajian Teori dan Variabel Interaksi Wilayah	44

	2.4.1. Sintesa Kajian Teori	44
	2.4.2. Variabel Interaksi Wilayah	45
BAB III.	KAJIAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN	47
	3.1. Kajian Umum Wilayah Kota Yogyakarta	47
	3.1.1. Letak Kota Yogyakarta	47
	3.1.2. Perekonomian Kota Yogyakarta	48
	3.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta	51
	3.1.4. Fasilitas Sosial Kota Yogyakarta	54
	3.2. Kajian Umum Wilayah Kecamatan Depok	55
	3.2.1. Letak Wilayah Kecamatan Depok	55
	3.2.2. Perekonomian Kecamatan Depok	57
	3.2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kecamatan Depok	58
	3.2.4. Fasilitas Sosial Kecamatan Depok	61
BAB IV.	ANALISIS DAN INTERAKSI KEWILAYAHAN KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA	66
	4.1. Analisis Keterkaitan Ekonomi	66
	4.1.1. Keterkaitan Produksi	66
	4.1.2. Aliran Pendapatan	83
	4.1.3. Aliran Modal	84
	4.1.4. Pola Belanja Konsumen	88
	4.2. Analisis Keterkaitan Sosial	96
	4.2.1. Analisis Interaksi Sosial	96
	4.3. Analisis Keterkaitan Pemanfaatan Pelayanan Sosial	100
	4.4. Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta	104
	4.4.1. Keterkaitan Ekonomi	104
	4.4.2. Keterkaitan Sosial	119
	4.4.3. Keterkaitan Pemanfaatan Pelayanan Sosial	122
	4.4.4. Interaksi Kewilayahan	127
	4.4.5. Implikasi Hasil Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta	129
	4.4.6. Identifikasi Hambatan Dalam Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta	136
BAB V.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	138
	5.1. Kesimpulan	138
	5.2. Rekomendasi	141
	DAFTAR PUSTAKA	145
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	149

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perubahan Penggunaan Tanah di Kecamatan Depok Tahun 1989-2002	4
Tabel I.2	Kebutuhan Data Penelitian Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta	16
Tabel I.3	Jumlah Sampel Masing-Masing Desa Menurut Mata Pencarian	21
Tabel II.1	Kategori Keterkaitan Wilayah	39
Tabel II.2	Keterkaitan Utama Dalam Pembangunan Ruang	42
Tabel III.1	PDRB Kota Yogyakarta Tahun 1998-2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993	49
Tabel III.2	Nama dan Alamat Pasar di Kota Yogyakarta	50
Tabel III.3	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	51
Tabel III.4	Jenis Kegiatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2000	52
Tabel III.5	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kota Yogyakarta Tahun 2000	53
Tabel III.6	Jumlah Sarana Kesehatan Kota Yogyakarta 2001-2002	55
Tabel III.7	Jarak Masing-masing Desa Di Kecamatan Depok Terhadap Ibukota Propinsi D.I. Yogyakarta	56
Tabel III.8	PDRB Kecamatan Depok Tahun 1998-2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993	57
Tabel III.9	Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa di Kecamatan Depok Tahun 2002	58
Tabel III.10	Jumlah Penduduk Kecamatan Depok	58
Tabel III.11	Jenis Kegiatan Penduduk Kecamatan Depok Tahun 2000	59
Tabel III.12	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kecamatan Depok Tahun 2000	60
Tabel III.13	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Depok Tahun 2002	62
Tabel IV.1	Nilai Beli Benih dan Pupuk Berdasar Lokasi Pembelian	67
Tabel IV.2	Tempat Pembelian Peralatan Tradisional Pertanian	68
Tabel IV.3	Tempat Pembelian Peralatan Mesin Pertanian	68
Tabel IV.4	Nilai Jual Hasil Produksi Pertanian Berdasar Lokasi Penjualan	69
Tabel IV.5	Tempat Pembelian Bahan Baku dan Peralatan Industri	71
Tabel IV.6	Nilai Jual Hasil Industri Berdasar Lokasi Penjualan	72
Tabel IV.7	Nilai Beli Barang Dagangan Berdasar Lokasi Pembelian	74
Tabel IV.8	Nilai Jual Barang Dagangan Berdasar Lokasi Penjualan	75
Tabel IV.9	Tempat Pembelian Bahan Pendukung Kegiatan Jasa	77
Tabel IV.10	Nilai Jasa Yang Dimanfaatkan Konsumen Berdasar Lokasi Konsumen Yang Memanfaatkan	78
Tabel IV.11	Tempat Pembelian Bahan Baku Sektor Bangunan	80
Tabel IV.12	Aliran Penghasilan	83
Tabel IV.13	Aliran Modal	86
Tabel IV.14	Lokasi Belanja Kebutuhan Sehari-hari	89
Tabel IV.15	Frekuensi Belanja Kebutuhan Sehari-hari Ke Kota Yogyakarta	89
Tabel IV.16	Lokasi Belanja Barang Kelontong	90
Tabel IV.17	Frekuensi Belanja Barang Kelontong ke Kota Yogyakarta	90

Tabel IV.18	Lokasi Belanja Sandang	92
Tabel IV.19	Frekuensi Belanja Sandang ke Kota Yogyakarta	92
Tabel IV.20	Lokasi Belanja Bahan Bangunan	93
Tabel IV.21	Frekuensi Belanja Bahan Bangunan ke Kota Yogyakarta	93
Tabel IV.22	Lokasi Belanja Barang Elektronik	94
Tabel IV.23	Frekuensi Kunjungan Pada Keluarga di Kota Yogyakarta	96
Tabel IV.24	Frekuensi Kegiatan Rutin Bersama Keluarga di Kota Yogyakarta	97
Tabel IV.25	Frekuensi Kunjungan Pada Teman di Kota Yogyakarta	98
Tabel IV.26	Frekuensi Kegiatan Rutin Bersama Teman di Kota Yogyakarta	99
Tabel IV.27	Perhitungan Intensitas Keterkaitan Produksi	104
Tabel IV.28	Perhitungan Intensitas Aliran Modal	112
Tabel IV.29	Perhitungan Intensitas Kebiasaan Berbelanja	114
Tabel IV.30	Perhitungan Intensitas Interaksi Ekonomi	117
Tabel IV.31	Rata-rata Frekuensi Interaksi Sosial	120
Tabel IV.32	Perhitungan Intensitas Pemanfaatan Pelayanan Pendidikan	122
Tabel IV.33	Perhitungan Intensitas Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan	124
Tabel IV.34	Perhitungan Intensitas Pemanfaatan Pelayanan Sosial	125
Tabel IV.35	Rekapitulasi Hasil Analisis	127
Tabel IV.36	Hambatan Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta	136

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Studi	12
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran Studi Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta	14
Gambar 2.1	Pengertian-Pengertian Pokok Cara Interaksi Keruangan	38
Gambar 3.1	Jenis Kegiatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2000	53
Gambar 3.2	Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2000	54
Gambar 3.3	Jenis Kegiatan Penduduk Kecamatan Depok Tahun 2000	59
Gambar 3.4	Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Kecamatan Depok Tahun 2000	60
Gambar 3.5	Peta Sebaran Pasar	63
Gambar 3.6	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan	64
Gambar 3.7	Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan	65
Gambar 4.1	Peta Aliran Keterkaitan Produksi Pertanian	70
Gambar 4.2	Peta Aliran Keterkaitan Produksi Industri	73
Gambar 4.3	Peta Aliran Keterkaitan Produksi Perdagangan	76
Gambar 4.4	Peta Aliran Keterkaitan Produksi Kegiatan Jasa	79
Gambar 4.5	Peta Aliran Keterkaitan Produksi Kegiatan Lain-lain	82
Gambar 4.6	Peta Aliran Pendapatan	85
Gambar 4.7	Peta Aliran Modal	87
Gambar 4.8	Peta Aliran Belanja Barang-Barang Tingkat Rendah	91
Gambar 4.9	Peta Aliran Belanja Barang-Barang Tingkat Tinggi	95
Gambar 4.10	Frekuensi Kunjungan Pada Keluarga di Kota Yogyakarta	96
Gambar 4.11	Frekuensi Kegiatan Rutin Bersama Keluarga di Kota Yogyakarta	97
Gambar 4.12	Frekuensi Kunjungan Pada Teman di Kota Yogyakarta	98
Gambar 4.13	Frekuensi Acara Rutin Bersama Teman di Kota Yogyakarta	99
Gambar 4.14	Peta Aliran Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan	102
Gambar 4.15	Peta Aliran Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	103
Gambar 4.16	Peta <i>Backward Linkage</i> Keterkaitan Produksi	109
Gambar 4.17	Peta <i>Forward Linkage</i> Keterkaitan Produksi	110
Gambar 4.18	Peta Keterkaitan Produksi	111
Gambar 4.19	Peta Intensitas Aliran Modal	113
Gambar 4.20	Peta Intensitas Kebiasaan Belanja	115
Gambar 4.21	Peta Intensitas Interaksi Ekonomi	118
Gambar 4.22	Peta Intensitas Interaksi Sosial	121
Gambar 4.23	Peta Intensitas Interaksi Pemanfaatan Pelayanan Sosial	126
Gambar 4.24	Peta Intensitas Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta	128

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A		
Lampiran A.1	Format Kuesioner/wawancara petani	149
Lampiran A.2	Format Kuesioner/wawancara industri	158
Lampiran A.3	Format Kuesioner/wawancara pedagang	165
Lampiran A.4	Format Kuesioner/wawancara jasa	171
Lampiran A.5	Format Kuesioner/wawancara lain-lain	177
Lampiran A.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	183
LAMPIRAN B	Perhitungan <i>Production Linkage</i>	213
LAMPIRAN C	Riwayat Penulis	215

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan wilayah terjadi melalui pertumbuhan dan diversifikasi permukiman serta melalui penciptaan keterkaitan yang baru dan lebih kuat diantara permukiman. Pada beberapa kasus, perluasan keterkaitan fisik seperti jalan, rel kereta api atau transportasi sungai telah menciptakan pertumbuhan dan diversifikasi permukiman. Pada kasus lain penciptaan keterkaitan yang baru dapat mendorong tumbuhnya tempat pusat yang baru. Penciptaan satu keterkaitan baru akan menghasilkan *cascade effect*, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan lain. Interaksi yang lebih erat antar wilayah menjadikan integrasi teknologi di tiap tingkatan hirarki spasial lebih mudah dan murah dilakukan serta memungkinkan pendistribusian pelayanan secara lebih luas sehingga mendorong terjadinya pengembangan wilayah (Rondinelli, 1985; 141).

Mengacu pada pernyataan Rondinelli tersebut, maka penelitian tentang interaksi kewilayahan menarik dilakukan karena interaksi wilayah memungkinkan terjadinya integrasi teknologi secara lebih mudah dan murah, serta memungkinkan pendistribusian pelayanan secara lebih luas. Selain itu, interaksi wilayah dapat menjelaskan hubungan eksternal kota-kota (Rugg, 1979), mengidentifikasikan ketergantungan antar wilayah geografis (Johnston et.al., 1994; 578), menjadikan kegiatan perkotaan semakin efisien, baik bagi kegiatan pembangunan kota itu sendiri, maupun bagi pengembangan wilayah sekitarnya (Ambardi dan Prihawantoro, 2002; 13)

Richardson (1979) membagi wilayah atas tiga tipe yaitu wilayah homogen, wilayah nodal dan wilayah perencanaan. Dalam konsep wilayah perencanaan kesatuan diperoleh dari kontrol politik atau *administrative*. Dalam konteks wilayah perencanaan (administratif) tersebut, wilayah Kota Yogyakarta dan Kecamatan Depok (Kabupaten Sleman) menarik diteliti intensitas interaksinya, karena secara geografis kedua wilayah tersebut berbatasan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi diantara keduanya.

Secara fisik keterkaitan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta didukung oleh beberapa jaringan jalan, yaitu:

- Jalan arteri Yogya-Solo. Jalan ini masuk dalam jaringan transportasi lintas Jawa bagian selatan, menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- *Ring Road* Utara. Jalan arteri primer ini merupakan penghubung jalan arteri Yogyakarta-Magelang dengan jalan arteri Yogya-Solo.
- Jalan Kaliurang. Jalan kolektor primer ini menghubungkan Kota Yogyakarta dengan kota-kota di bagian utara yang berorde di bawahnya
- Jalan Gejayan. Jalan kolektor sekunder ini merupakan jalan utama bagi penduduk yang bermukim di Sleman timur laut menuju Kota Yogyakarta.

Selain itu, Kecamatan Depok memiliki Sub terminal Condongcatur yang merupakan tujuan pemberhentian bis kota yang paling utara. Keterhubungan secara fisik dengan wilayah lain, utamanya Kota Yogyakarta disinyalir telah menghasilkan *cascade effect*, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan lain. Diantara keterkaitan fisik tersebut yang paling menonjol adalah keberadaan ring-road utara. Sejak adanya *ring-road* utara, wilayah Kecamatan Depok mengalami pertumbuhan yang pesat, dimana kemudian



muncul kampus-kampus di lokasi-lokasi sekitar *ring-road* utara yang pada awalnya kebanyakan merupakan perluasan kampus yang berada di Kota Yogyakarta, diantaranya adalah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Universitas Islam Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pada masa lalu ada interaksi antara Kecamatan Depok dengan Kota Yogyakarta yang mengakibatkan terjadinya pembangunan di Kecamatan Depok.

Adanya keterkaitan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta pada masa lalu juga bisa digambarkan dengan adanya kelangkaan lahan terbuka di Kota Yogyakarta serta perubahan guna lahan di Kecamatan Depok. Sampai saat ini kebutuhan akan perumahan di Kota Yogyakarta masih belum tercukupi. Kondisi ini juga diperberat dengan keadaan dimana semua lahan telah digunakan dengan intensitas tinggi. Sebagian besar guna lahan di Kota Yogyakarta adalah lahan terbangun, lahan pertanian kurang dari 5%. Ruang terbuka diperkirakan sekitar 30% dari total luas Kota Yogyakarta. Terbatasnya lahan perumahan menyebabkan pertumbuhan cenderung terjadi secara vertikal dengan bangunan bertingkat multiguna. Selain itu, Penyediaan perumahan secara massal oleh pengembang tercatat tidak kurang dari 29 lokasi perumahan yang total menyediakan sekitar 2000 unit rumah. Mahalnya harga properti ini menjadikan penduduk Kota Yogyakarta tertarik untuk membangun rumah di wilayah-wilayah pinggiran yang relatif lebih murah. (Triple A Kota Yogyakarta, 2002). Pada Kecamatan Depok kondisi ini diperkuat oleh adanya keterkaitan secara fisik antara Kecamatan Depok dan Kota Yogyakarta sehingga timbul fenomena aglomerasi perkotaan ke wilayah Kecamatan Depok.

Kondisi yang mendukung dugaan adanya interaksi terhadap Kota Yogyakarta adalah bahwa selama periode 1989-2002 di Kecamatan Depok telah terjadi perubahan guna tanah dari

penggunaan/pemanfaatan untuk kegiatan pertanian menjadi kegiatan non pertanian. Selama periode tersebut terjadi peningkatan guna tanah untuk pemanfaatan pekarangan sebesar 30,65% atau seluas 411 hektar. Secara rinci perubahan guna tanah di Kecamatan Depok selama tahun 1989-2002 ditunjukkan pada tabel I.1.

**TABEL I.1**  
**PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN DEPOK**  
**TAHUN 1989-2002**

Penggunaan Tanah	Tahun		Perubahan	
	1989	2002	Luas (Ha)	(%)
Sawah	652	585	-67	-10,27
Pekarangan	1.341	1.752	411	30,65
Tegalan	420	307	-113	-26,90
Lainnya	1.142	911	-231	-20,22
Jumlah	3.555	3.555		

Sumber: BPS Kabupaten Sleman Tahun 1989 dan 2002

Adanya keterkaitan dengan Kota Yogyakarta yang mempengaruhi pembangunan di Kecamatan Depok juga sudah diindikasikan oleh Hadi Sabari Yunus yang menyatakan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta perembetan kenampakan fisik kekotaan paling cepat adalah ke arah timur laut. Selain itu, sejak awal berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menunjukkan bagian utara keraton lebih intensif pembangunan struktur fisik kekotaannya, dan hal tersebut telah menjadi kekuatan penarik kekotaan yang kuat terhadap fungsi-fungsi yang lainnya, khususnya permukiman dan perdagangan.

Indikasi-indikasi tersebut sedikit banyak telah menunjukkan adanya keterkaitan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta sehingga terjadi proses pembangunan wilayah di Kecamatan Depok yang menyebabkan Kecamatan Depok telah berkembang menjadi wilayah perkotaan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di

Kecamatan Depok dan dari aktivitas penduduknya yang sudah beralih pada kegiatan non agraris. Pada sensus penduduk di Kecamatan Depok tahun 2000 terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 152,08% dari jumlah penduduk menurut sensus tahun 1990. Sementara aktivitas penduduk Kecamatan Depok menurut data tahun 1990/1991 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian/petani (21,15%) dan PNS/ABRI (28,17%), sementara pada perkembangannya, menurut data Triple A Kabupaten Sleman (2002), mata pencaharian penduduk Kecamatan Depok telah bergeser ke sektor ekonomi perdagangan, jasa dan industri.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan dalam rangka melihat secara lebih dalam lagi interaksi wilayah Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta yang terjadi saat ini. Dengan mengamati interaksi wilayah yang terjadi diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai intensitas interaksi yang terjadi. Dari gambaran intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta akan dapat dilihat apakah saat ini Kecamatan Depok masih tergantung pada Kota Yogyakarta ataukah telah berkembang menjadi wilayah yang dapat dikatakan cukup mandiri.

## 1.2. Perumusan Masalah

Latar belakang permasalahan menunjukkan bahwa Kecamatan Depok memiliki keterkaitan fisik dengan wilayah-wilayah lainnya dengan adanya beberapa ruas jalan yang merupakan jalur penghubung utama. Keterhubungan secara fisik dengan wilayah lain, utamanya Kota Yogyakarta disinyalir telah menghasilkan *cascade effect*, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan lain. Sebagai akibatnya Kecamatan Depok telah mengalami pembangunan.

Kondisi kelangkaan lahan terbuka diantaranya untuk perumahan di Kota Yogyakarta mendorong adanya pembangunan perumahan di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah Kecamatan Depok. Hal ini dipermudah oleh adanya jaringan jalan yang secara fisik menghubungkan Kecamatan Depok dengan Kota Yogyakarta. Dampak yang timbul kemudian adalah terjadinya fenomena aglomerasi perkotaan di Kecamatan Depok dimana pengaruh Kota Yogyakarta mengakibatkan terjadinya proses pembangunan di Kecamatan Depok yang menjadikan wilayahnya berkembang menjadi wilayah perkotaan

Melihat indikasi tersebut, penelitian ini ingin melihat secara lebih dalam interaksi wilayah Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta. Adapun interaksi wilayah yang akan diamati adalah tiga keterkaitan dari tujuh keterkaitan yang dikemukakan oleh Rondinelli, yaitu keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial, dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana interaksi wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terhadap Kota Yogyakarta, dilihat dari keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan. Sehingga *research question* yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah intensitas interaksi kewilayahan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terhadap Kota Yogyakarta ?

Interaksi kewilayahan yang dikaji lewat studi ini meliputi keterkaitan ekonomi, sosial, dan pemanfaatan pelayanan sosial

### 1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi

#### 1.3.1 Tujuan Studi:

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui intensitas interaksi wilayah Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta yang meliputi keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial, dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial.

#### 1.3.2 Sasaran Studi:

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Keterkaitan ekonomi:

- mengidentifikasi dan memetakan aliran produksi, baik *forward* maupun *backward linkages*-nya,
- mengidentifikasi dan memetakan aliran pendapatan,
- mengidentifikasi dan memetakan aliran modal,
- mengidentifikasi dan memetakan kebiasaan berbelanja,
- mengidentifikasi intensitas interaksi ekonomi.

##### 2. Keterkaitan Sosial:

- mengidentifikasi frekwensi kunjungan kepada keluarga di Kota Yogyakarta
- mengidentifikasi rutinitas pertemuan dengan keluarga di Kota Yogyakarta
- mengidentifikasi frekwensi kunjungan kepada teman di Kota Yogyakarta
- mengidentifikasi rutinitas pertemuan dengan teman di Kota Yogyakarta
- mengidentifikasi tingkat kepesertaan pada organisasi sosial yang jaringannya berpusat di Kota Yogyakarta

- mengidentifikasi intensitas interaksi sosial

### 3. Keterkaitan Pemanfaatan Pelayanan Sosial:

- mengidentifikasi pemanfaatan pelayanan pendidikan dasar,
- mengidentifikasi pemanfaatan pelayanan pendidikan menengah, baik SMP maupun SMA
- mengidentifikasi pemanfaatan pelayanan pendidikan tinggi
- memetakan pemanfaatan pelayanan pendidikan
- mengidentifikasi intensitas interaksi pemanfaatan pelayanan pendidikan
- mengidentifikasi pemanfaatan puskesmas
- mengidentifikasi pemanfaatan dokter praktek
- mengidentifikasi pemanfaatan rumah sakit
- memetakan pemanfaatan pelayanan kesehatan
- mengidentifikasi intensitas interaksi pemanfaatan pelayanan kesehatan
- mengidentifikasi intensitas interaksi pemanfaatan pelayanan sosial

#### 1.3.3. Manfaat Studi

Sebagaimana dikemukakan oleh Johnston et.al (1994; 578) *spatial interaction* dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketergantungan antar wilayah geografis. Oleh karena itu, hasil penelitian yang berupa intensitas interaksi wilayah Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta diharapkan akan memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan wilayah Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta sehingga dapat dijadikan masukan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kecamatan Depok khususnya, agar dapat

mengatasi efek negatif ketergantungannya terhadap Kota Yogyakarta sehingga dapat terjadi pembangunan wilayah yang optimal.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

##### **1.4.1. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup penelitian ini secara materi dibatasi pada aspek-aspek dalam interaksi keruangan yang menyangkut keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial. Dipilihnya ketiga keterkaitan tersebut adalah menyesuaikan konteks Kota Yogyakarta dan Kecamatan Depok, dimana aktivitas di Kecamatan Depok sedikit banyak dipengaruhi oleh limpahan aktivitas ekonomi dari Kota Yogyakarta, utamanya di sektor perdagangan dan jasa, begitu pula sebaliknya.

Sementara dipilihnya keterkaitan sosial adalah karena terjadinya fenomena aglomerasi perkotaan ke wilayah-wilayah di sekitar Kota Yogyakarta, diantaranya Kecamatan Depok, memungkinkan adanya hubungan kekerabatan antara penduduk Kecamatan Depok dengan penduduk Kota Yogyakarta.

Dipilihnya keterkaitan pemanfaatan pelayanan adalah karena kedekatan wilayah dan adanya keterkaitan fisik antara Kecamatan Depok dengan Kota Yogyakarta telah menjadikan penduduk Kecamatan Depok dapat mengakses pelayanan Kota Yogyakarta begitupula sebaliknya.

Menurut definisi, interaksi adalah Kontak/hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru (Bintarto, 1989:63). Interaksi juga dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan.

Keterkaitan ekonomi berhubungan erat dengan pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur, keterkaitan produksi ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*). Selain itu keterkaitan ekonomi juga menyangkut aliran pendapatan, aliran modal dan pola kebiasaan berbelanja.

Keterkaitan sosial berhubungan dengan pola kunjungan dan interaksi kelompok sosial, sedangkan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Batasan-batasan dalam ruang lingkup materi ini perlu dilakukan agar dalam pembahasan tidak mengalami pelebaran sehingga menyebabkan kekaburan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini ruang lingkup materi memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Keterkaitan ekonomi, yang variabel-variabelnya meliputi keterhubungan produksi, aliran pendapatan, aliran modal, kebiasaan berbelanja.
2. Keterkaitan sosial, yang variabel-variabelnya meliputi kunjungan keluarga dan teman, keterlibatan pada kelompok sosial.
3. Keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial, yang variabel-variabelnya meliputi pemanfaatan pelayanan pendidikan, pemanfaatan pelayanan kesehatan

#### **1.4.2. Ruang Lingkup Spasial**

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Ketertarikan memilih Kecamatan Depok dengan melihat keterkaitannya terhadap Kota Yogyakarta yang merupakan lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah strategis dan memiliki potensi tinggi dalam pengembangan wilayah di kawasan tengah pulau Jawa, sentra wilayah selatan pulau Jawa serta satelit segitiga

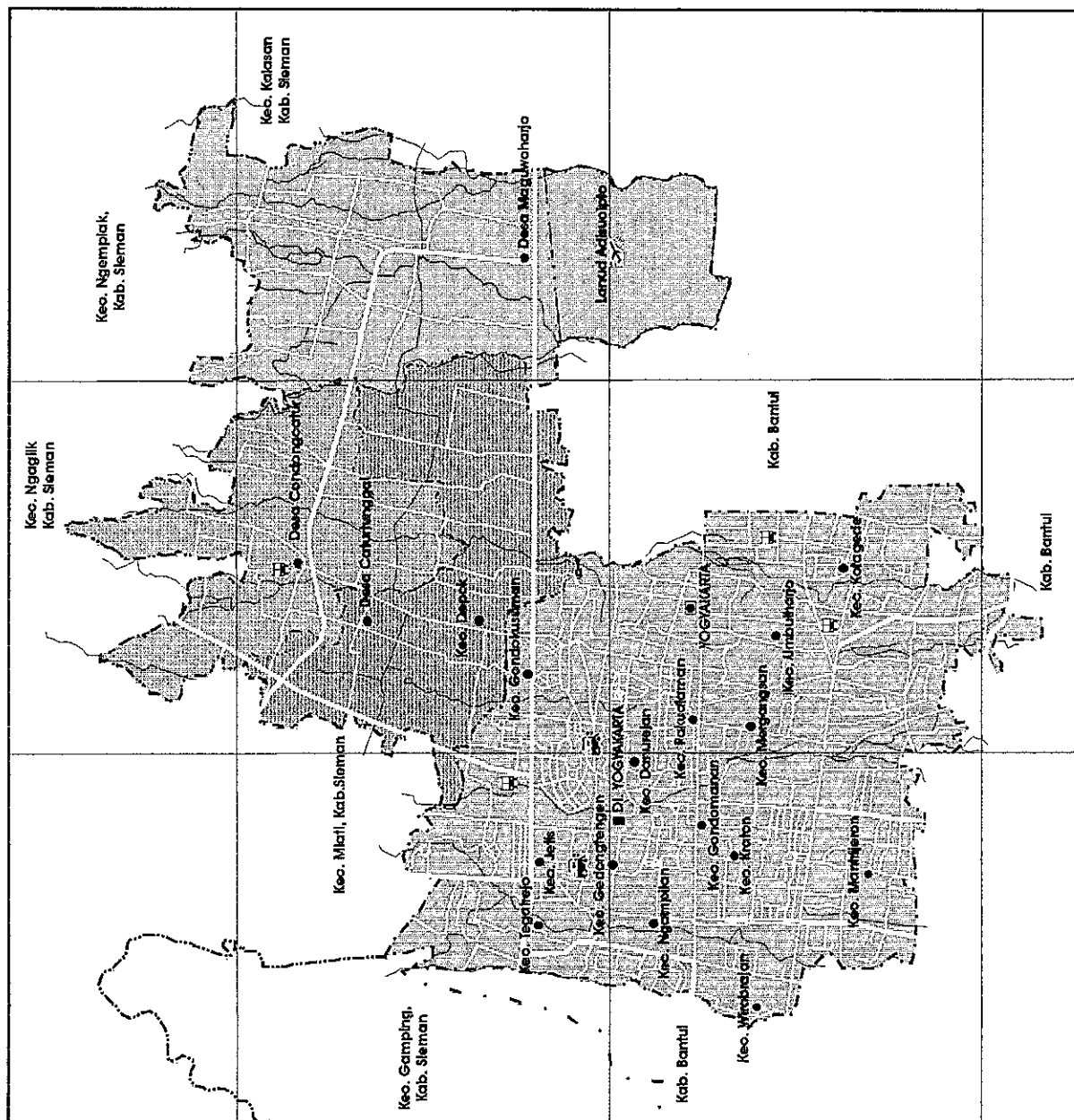


Joglosemar (Yogyakarta, Soló dan Semarang) untuk masa mendatang (Triple A Propinsi DIY, 2002).

Alasan lebih khusus pemilihan Kecamatan Depok adalah karena sebagaimana yang dikemukakan Hadi Sabari Yunus perembetan kenampakan fisik kekotaan paling cepat adalah ke arah timur laut. Selain itu, sejak awal berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menunjukkan bagian utara keraton lebih intensif pembangunan struktur fisik kekotaannya, dan hal tersebut telah menjadi kekuatan penarik kekotaan yang kuat terhadap fungsi-fungsi yang lainnya, khususnya permukiman dan perdagangan. Dari fenomena inilah, maka Kecamatan Depok yang berada di utara dan timur laut Kota Yogyakarta dipilih sebagai wilayah penelitian. Ketertarikan memilih Kecamatan Depok sebagai lokasi penelitian juga diperkuat dengan kenyataan yang memperlihatkan pesatnya perkembangan/pembangunan di Kecamatan Depok yang menjadikannya sebagai wilayah perkotaan.

Adapun alasan penelitian lapangan/survei hanya dilakukan di Kecamatan Depok semata-mata adalah karena keterbatasan waktu. Akan tetapi survei yang hanya dilakukan di satu wilayah saja dari dua wilayah yang berinteraksi diharapkan sudah bisa menggambarkan adanya interaksi diantara kedua wilayah. Sebagai contoh, bila Kecamatan Depok menyatakan mendapatkan bahan baku dari Kota Yogyakarta berarti ada interaksi dengan Kota Yogyakarta dimana Kota Yogyakarta menanggapi sebagai penyedia bahan baku. Begitu pula sebaliknya. Gambaran secara lebih jelas tentang lingkup spasial wilayah penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.1.

110°20'00" 110°22'30" 110°25'00" 110°27'30"



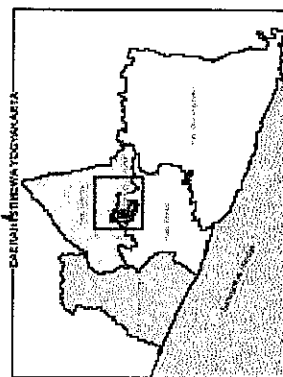
MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS:  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

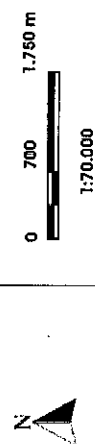
Gambar 1.1  
PETA WILAYAH STUDI

LEGENDA:

- 1 Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bongkara



Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA

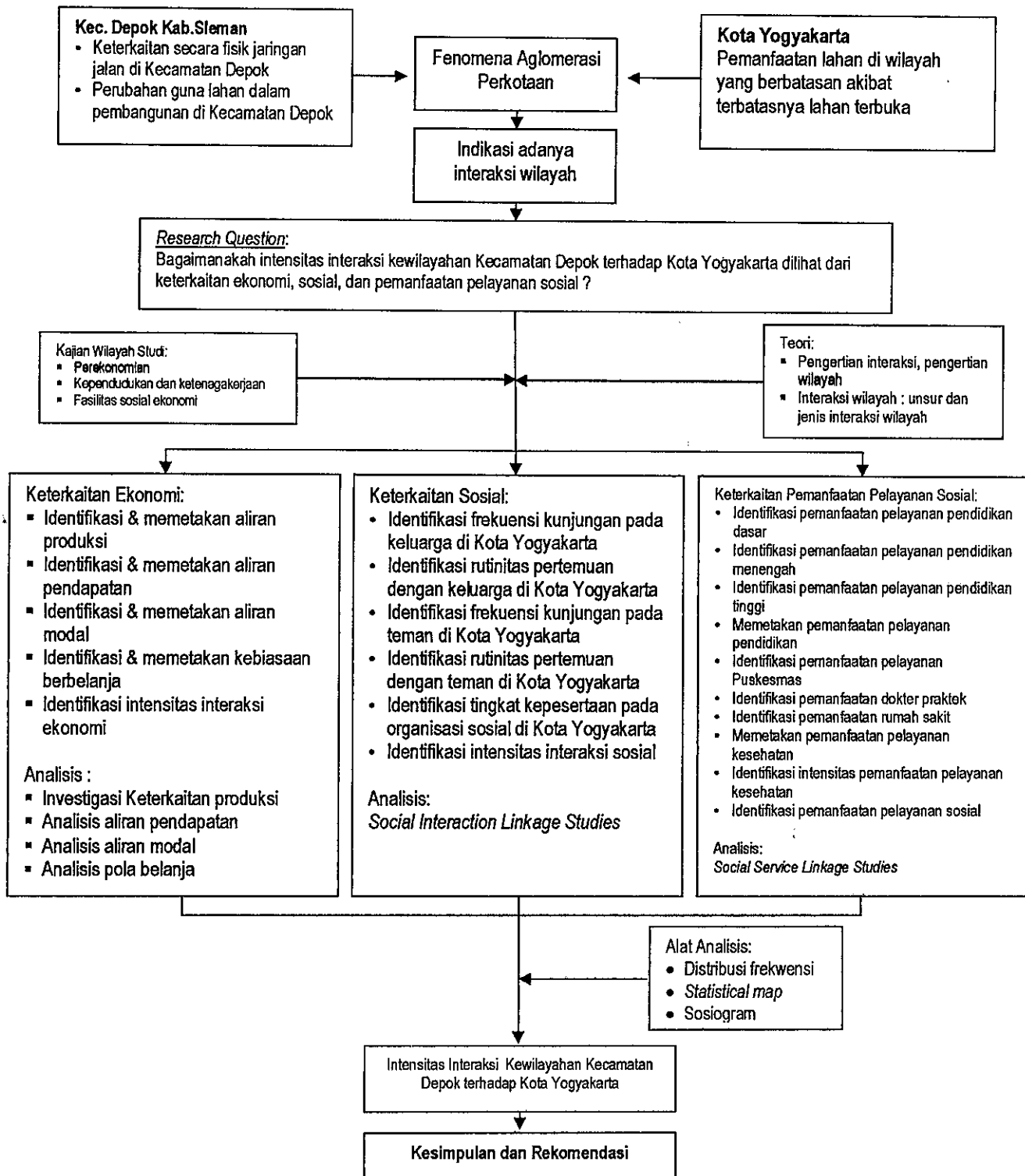


### 1.5. Kerangka Alur Pikir Penulisan

Studi ini diawali dengan terjadinya pembangunan di Kecamatan Depok yang menjadikan wilayahnya kemudian berkembang menjadi wilayah perkotaan. Dalam proses pembangunan itu telah terjadi perubahan guna lahan dari penggunaan pertanian ke penggunaan non pertanian. Proses pembangunan ini disinyalir sebagai akibat adanya interaksi terhadap Kota Yogyakarta di masa lalu, yang mengalami kesulitan memperoleh lahan kosong baik untuk perumahan maupun kegiatan ekonomi. Kondisi Kota Yogyakarta yang sebagian besar merupakan lahan terbangun menjadikan harga lahan relatif mahal. Oleh karena itu, kemudian terjadi kecenderungan perpindahan penduduk Kota Yogyakarta untuk mencari permukiman di pinggiran kota dimana harga lahan masih relatif lebih murah dan masih cukup tersedia lahan terbuka sehingga kemudian terjadi fenomena aglomerasi perkotaan di wilayah-wilayah yang secara administrasi berbatasan. Termasuk diantaranya Kecamatan Depok.

Hal tersebut di atas dimungkinkan dengan adanya keterkaitan fisik, berupa ruas-ruas jalan yang menghubungkan dengan Kota Yogyakarta. Kecenderungan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bendavid-Val (1991; 140) bahwa pembangunan adalah proses interaksi antar wilayah yang terjadi akibat adanya keterkaitan sistem jaringan fisik, sosial, teknologi, politik, institusi, dan ekonomi.

Dengan memperhatikan gejala ini, maka studi ini ingin melihat secara lebih mendalam bagaimanakah intensitas interaksi wilayah Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman terhadap Kota Yogyakarta. Adapun interaksi wilayah yang ingin diteliti adalah tiga keterkaitan dari tujuh keterkaitan yang dikemukakan oleh Rondinelli (1985), yaitu keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial. Secara lebih lengkap kerangka pemikiran penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.2 .



**GAMBAR 1.2**  
**KERANGKA PEMIKIRAN STUDI INTERAKSI KEWILAYAHAN**  
**KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA**

## **1.6. Pendekatan dan Metoda Pelaksanaan Studi**

### **1.6.1. Pendekatan Studi**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan, dimana dalam pendekatan ini akan mencoba mengungkapkan keterkaitan aspek-aspek interaksi keruangan yang terjadi akibat tingkah laku manusia, barang dan jasa dalam bentuk gerak perpindahan yang erat hubungannya dengan faktor-faktor ruang.

### **1.6.2. Metoda Pelaksanaan Studi**

Metoda penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Nazir (1988), metoda penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.

Menurut Moleong (1993:22), dalam melakukan penelitian ada dua jenis metoda, yaitu metoda kualitatif dan metoda kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisa, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka metoda yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk memahami fenomena sosial, berupa serangkaian kegiatan atau upaya menjangkau informasi secara mendalam dari permasalahan yang ada dalam kehidupan suatu

objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

### 1.6.3. Jenis dan Kebutuhan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan-tulisan, seperti buku laporan, peraturan-peraturan, dokumen dan sebagainya, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara mendalam. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

**TABEL I.2**  
**KEBUTUHAN DATA PENELITIAN**  
**INTERAKSI KEWILAYAHAN**  
**KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA**

#### A. Data Primer :

Kebutuhan Data	Kegunaan	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asal input pertanian</li> <li>Data jumlah produksi pertanian</li> <li>Distribusi hasil /komoditas pertanian (baik untuk kegiatan produksi lanjutan maupun kegunaan akhir)</li> </ul>	Untuk melihat keterkaitan produksi pertanian antar wilayah (interaksi pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petani</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan/materi pendukung jasa</li> <li>Nilai pemanfaatan jasa</li> <li>Lokasi pengguna jasa</li> </ul>	Untuk melihat keterkaitan produksi kegiatan jasa antar wilayah (interaksi jasa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk (yang bekerja di bidang jasa)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Komoditas perdagangan</li> <li>Lokasi pasokan barang dagangan</li> <li>Lokasi pembeli barang dagangan</li> </ul>	Untuk melihat pergerakan kegiatan perdagangan antar wilayah (interaksi perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedagang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Produk industri</li> <li>Jenis input</li> <li>Lokasi asal input</li> <li>Pemasaran hasil produksi (baik untuk kegiatan produksi lanjutan maupun kegunaan akhir)</li> </ul>	Untuk melihat keterkaitan produksi industri (interaksi industri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang bekerja di bidang industri</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi membeli kebutuhan</li> <li>Frekuensi kunjungan ke toko di Kota Yogyakarta</li> </ul>	Untuk melihat pola berbelanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk Kecamatan Depok</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan pendapatan secara rutin ke Kota Yogyakarta</li> <li>Tingkat kiriman uang (remittance) dari Kota Yogyakarta</li> </ul>	Untuk melihat pergerakan modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk Kecamatan Depok</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungan sosial antara penduduk Kec. Depok dgn penduduk Kota Yogyakarta</li> <li>Frekuensi kunjungan sosial</li> </ul>	Untuk melihat keterkaitan sosial antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk Kecamatan Depok</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan pelayanan pendidikan</li> <li>Pemanfaatan pelayanan kesehatan</li> </ul>	Untuk melihat keterkaitan penyediaan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk Kecamatan Depok</li> </ul>

## B. Data Sekunder

Kebutuhan Data	Kegunaan	Sumber Data
Data fisik wilayah	Untuk mendapatkan gambaran tentang wilayah studi	Desa, Kecamatan Depok, BPS Kabupaten Sleman, BPS Kota Yogyakarta dan BPS Propinsi DIY
Data kependudukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah penduduk masing-masing desa</li> <li>▪ Jumlah penduduk Kecamatan</li> <li>▪ Jumlah penduduk desa menurut mata pencaharian</li> </ul>	Untuk menentukan sampel	Desa, Kecamatan Depok, BPS
Data lokasi pasar	Untuk melihat distribusi sebaran pasar	Bappeda

### 1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metoda survai, yaitu suatu teknik yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Teknik survai merupakan bagian dari metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan (Arikunto, 2002; 93)

Survai dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden yang dilakukan dengan wawancara. Umumnya, pengertian survai dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel atas populasi yang mewakili seluruh populasi, mengingat waktu yang sangat terbatas dan materi yang sangat luas, sehingga perlu dibatasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan seluruh populasi.

Survai dilakukan melalui wawancara dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini digunakan secara simultan dan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.

Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat untuk mengumpulkan data. Tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Jenis pertanyaan yang dipergunakan adalah kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka, serta pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan kombinasi tertutup dan terbuka, jawaban sudah ditentukan tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Sedangkan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya diperoleh dari responden.

Teknik lain yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan data dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada, buku-buku, studi-studi yang telah dilakukan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan analisis permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Data yang telah didapatkan, baik data sekunder maupun data primer, selanjutnya diolah ke dalam bentuk tabel-tabel hasil dari kompilasi data sekunder dan data teknis di lapangan, sehingga dapat dihasilkan suatu kumpulan data yang siap dianalisis.

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabulasi. Teknik pengukuran dilakukan dengan menghitung prosentase tanggapan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

#### **1.6.5. Teknik Sampling**

Karena teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metoda survai, maka data dikumpulkan dari sampel. Dalam penelitian ini, survei hanya dilakukan di Kecamatan Depok,



namun dengan menggunakan pertanyaan kuesioner yang mengaitkan Kecamatan Depok dengan Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan akan cukup memperoleh gambaran interaksi kedua wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kecamatan Depok. Dengan menggunakan data Kabupaten Sleman dalam Angka (2002), maka populasi penelitian adalah sebesar 28.336 rumah tangga. Sampel diharapkan dari kepala keluarga bekerja atau dari salah satu anggota keluarga yang sudah bekerja.

Menurut Kerlinger (1995; 206) tidak ada patokan dalam menentukan jumlah sample yang *representative*. Namun pada umumnya suatu sampel lebih dari 30 bisa dikatakan telah dapat memberikan ragam yang stabil sebagai pendugaan ragam populasi (Sugiarto et al, 2001;10). Sedangkan menurut Slovin dalam Kusmayadi et al (2000; 74), jumlah sampel yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{N}{1+N(e^2)} \quad (1)$$

Dimana:

S : Jumlah minimal responden yang diperbolehkan

N : Jumlah Populasi

e : Margin error

Jika  $e = 0,1$ , berarti derajat kecermatan penelitian yang diharapkan adalah sebesar 90%.

Pada penelitian ini digunakan *error estimate* sebesar 0,14, atau dapat dikatakan memiliki derajat keyakinan sebesar 86 %. Dipilihnya *error estimate* tersebut karena penelitian ini bukan penelitian eksakta yang memerlukan akurasi perhitungan dan mengandung resiko yang tinggi. Selain itu, diperkirakan tidak akan terjadi banyak variabilitas jawaban yang

didapat dari responden. Berdasar *error estimate* tersebut, maka dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam studi ini adalah sebanyak:

$$S = \frac{28.336}{1 + 28.336 (0,14)^2} = \frac{28.336}{1 + 28.336 (0,0196)} = \frac{28.336}{556} = 50 \text{ rumah tangga}$$

Adapun pembagian responden untuk tiap desa digunakan teknik *cluster sampling*.. Menurut Sigit (1999; 66) dalam *cluster sampling* satuan-satuan dalam populasi yang disebut *unit of analysis* atau *element of the population* merupakan kelompok. Pada studi ini pengelompokan dilakukan atas dasar *cluster* rumah tangga. Adapun pembagian jumlah sampel untuk masing-masing desa dan menurut mata pencaharian digunakan teknik proporsional. Jumlah sampel rumah tangga untuk masing-masing desa merupakan proporsi dari jumlah rumah tangga yang ada di desa terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan di kecamatan. Sementara jumlah sampel menurut mata pencaharian di tiap-tiap desa merupakan proporsi dari jumlah penduduk bekerja pada suatu jenis mata pencaharian terhadap jumlah penduduk bekerja di desa yang diteliti.

Tahapan pertamanya adalah membagi sampel dalam kelompok lokasi desa. Jumlah sampel untuk masing-masing desa dihitung dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang ada di desa dengan rumah tangga yang ada di seluruh kecamatan dikalikan target sampel. Pada tahapan pertama ini, diperoleh jumlah sampel untuk tiap-tiap desa di Kecamatan Depok adalah:

$$\text{Desa Caturtunggal} : \frac{14.036}{28.336} \times 50 = 25 \text{ rumah tangga}$$

$$\text{Desa Maguwoharjo} : \frac{6.663}{28.336} \times 50 = 12 \text{ rumah tangga}$$

$$\text{Desa Condongcatur} : \frac{7.637}{28.336} \times 50 = 13 \text{ rumah tangga}$$

Selanjutnya dari jumlah sampel masing-masing desa tersebut, sampel akan dibagi lagi berdasar mata pencaharian penduduk. Data dasar yang dipergunakan adalah jumlah penduduk bekerja menurut mata pencaharian. Cara perhitungannya adalah membagi jumlah penduduk bekerja pada satu jenis mata pencaharian terhadap jumlah penduduk bekerja total, kemudian dikalikan dengan jumlah sampel yang diperoleh pada perhitungan tahap pertama. Pada tahapan ini diperoleh jumlah masing-masing sampel menurut mata pencaharian. Uraian tahapan perhitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Jumlah sampel untuk masing-masing desa =

$$\left[ \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Desa}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Kecamatan}} \times \text{target sampel} \right] \left[ \frac{\text{penduduk bekerja di lapangan usaha } i}{\text{total penduduk bekerja}} \right]$$

Berdasarkan formula tersebut diperoleh jumlah sampel masing-masing desa menurut mata pencaharian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel I.3.

**TABEL I.3**  
**JUMLAH SAMPEL MASING-MASING DESA**  
**MENURUT MATA PENCAHARIAN**

Lapangan Usaha	Jumlah	Proporsi	Sampel		
			Caturtunggal	Maguwoharjo	Condongcatur
Pertanian TP	2499	0,051635	1	1	1
Perkebunan	64	0,001322	0	0	0
Perikanan	56	0,001157	0	0	0
Peternakan	212	0,00438	0	0	0
Pertanian Lainnya	262	0,005414	0	0	0
Ind. Pengolahan	1511	0,031221	1	0	0
Perdagangan	10281	0,212431	6	3	3
Jasa	27019	0,558278	14	7	7
Angkutan	829	0,017129	0	0	0
Lainnya	5664	0,117032	3	1	2
	48397	1	25	12	13

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS

#### 1.6.6. Metoda dan Alat Analisis

Untuk melihat keterkaitan ekonomi, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Production Linkage Investigations* (Bendavid, 1991; 58). Analisis ini mengidentifikasi rantai pemasaran komoditas maupun jasa serta rantai pemasaran input produksi. Dalam analisis ini, responden akan dimintai jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan:
  - *Forward production linkage*, yang berupa pemrosesan lebih lanjut dari suatu barang jadi.
  - *Backward production linkage*, yang berupa penyediaan input-input untuk proses produksi
2. *Income Flows* (Rondinelli, 1985; 143). Analisis digunakan untuk mengidentifikasi darimana sumber-sumber pendapatan masyarakat diperoleh, dan kemana pendapatan tersebut di gunakan secara rutin.
3. *Capital Flow* (Rondinelli, 1985; 143). Tabungan merupakan salah satu modal dalam pembangunan kota (Jhingan, 1983). Oleh karena itu, dalam analisis ini akan dilihat kebiasaan menabung responden. Dari kebiasaan menabung ini akan diketahui daerah mana yang lebih diuntungkan oleh adanya tabungan tersebut. Bila tabungan menunjukkan sisi persediaan/penghimpunan modal, maka untuk melihat pemanfaatan modal dalam analisis aliran modal ini juga dilihat pemanfaatan kredit oleh responden.
4. *Consumer Shopping Patterns* (Bendavid, 1991; 141). Analisis ini digunakan untuk mengetahui lokasi yang cenderung disukai dan didatangi penduduk untuk berbelanja kebutuhannya serta frekuensi kunjungan ke lokasi tersebut. Dari sini akan terlihat sentralitas suatu lokasi belanja. Data yang akan ditanyakan adalah tentang kemana

responden akan membeli barang kebutuhannya, dan seberapa sering responden mengunjungi lokasi belanja.

Penelitian tentang keterkaitan sosial akan dianalisis dengan studi interaksi sosial (Rondinelli, 1985; 164). Dalam analisis ini akan dicari tentang keterkaitan aktivitas sosial penduduk Kecamatan Depok dengan penduduk Kota Yogyakarta, yang diidentifikasi dari keterlibatan dalam kelompok sosial yang melibatkan penduduk di dua wilayah tersebut. Selain itu juga diidentifikasi hubungan persaudaraan dan pertemanan diantara penduduk kedua wilayah. Selanjutnya dicari intensitas kegiatan sosial tersebut yang tercermin dari frekuensi kunjungan

Penelitian tentang keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial akan dianalisis melalui studi keterkaitan pemanfaatan sosial/*social service linkage studies* (Rondinelli, 1985; 165). Studi ini mempelajari/mengidentifikasi asal konsumen atau klien yang memanfaatkan suatu pelayanan. Atau bila dilihat dari sisi sebaliknya adalah kemana konsumen (responden) akan mencari pelayanan sosial yang dibutuhkannya.

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metoda statistik deskriptif yang berupa frekuensi (Sekaran, 1992; 259). Selain itu juga digunakan alat analisis *statistical maps* (Rondinelli, 1985; 180) dan metode sosiogram (Budiharsono, 2001; 139). Pada dasarnya kedua alat analisis tersebut bisa dikatakan sama, hanya saja untuk metode sosiogram dikhususkan untuk pemanfaatan fasilitas sosial ekonomi saja.

Menurut Sekaran, secara sederhana frekuensi menunjukkan jumlah berbagai subkategori dari suatu fenomena terjadi (1992; 259). Selanjutnya dihitung persentase kejadian subkategori. Informasi dapat disajikan dalam bentuk histogram atau diagram batang.

*Statistical maps* dapat digunakan untuk menunjukkan distribusi spasial pada karakter sosial atau ekonomi, populasi, aktivitas, sumber daya atau ciri-ciri lain yang ada dalam tingkatan atau jumlah yang berbeda di berbagai wilayah.

Bila perbedaan tingkatan harus ditunjukkan secara non kuantitatif, berbagai simbol, huruf, atau ketebalan bayangan (*shading*) dapat digunakan untuk lokasi yang berbeda pada peta.

Bila kuantitas yang terdistribusi antar titik perlu ditunjukkan, maka alat berikut ini dapat digunakan:

1. Simbol-simbol unit berulang, misalnya: gambar sapi kecil di setiap lokasi mewakili 100 ekor ternak yang dikembangkan di tempat tersebut.
2. *Proportional Bars* menunjukkan tingkatan atau jumlah yang berbeda di tiap tempat
3. Persegi, Lingkaran, bidang, atau kubus. Masing-masing simbol menunjukkan jumlah atau proporsi yang berbeda
4. Range simbol bergradasi, seperti lingkaran dalam ukuran yang berbeda menunjukkan jumlah atau persentase yang semakin besar
5. Diagram statistik berulang.

Untuk menunjukkan kuantitas terdistribusi antar area:

1. Titik-titik, dengan densitas titik mewakili jumlah yang ada dalam area
2. Bayangan (*shading*), dimana semakin tebal bayangan menunjukkan semakin besarnya persentase
3. *Proportional shading*

4. *Isolines*, yaitu garis yang menghubungkan area-area dengan jumlah atau tingkatan yang sama

Untuk menunjukkan kuantitas terdistribusi dalam suatu garis, seperti jalan, sungai, atau rel kereta digunakan pita dengan lebar proporsional atau bergradasi sesuai tingkatannya atau jumlahnya.

Sedangkan metode sosiogram dimaksudkan untuk memperlihatkan secara grafis pola interaksi dan interdependensi melalui pergerakan penduduk antar pusat pemukiman didalam memanfaatkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Pola tersebut dapat ditunjukkan pada peta-peta atas dasar preferensi penduduk dari suatu desa (pemukiman) terhadap fasilitas pelayanan dengan arah tanda panah (Budiharsono, 2001;139).

Tahapan-tahapan metode sosiogram adalah:

1. Sediakan peta dasar yang digambar pada kertas kalkir atau bahan transparan lainnya untuk setiap jenis fasilitas. Masing-masing peta dasar tersebut di dalamnya harus sudah menggambarkan tempat-tempat permukiman (desa) dan seluruh fasilitas pelayanan di dalam dan di luar sekitar wilayah yang diteliti.
2. Hubungkan antara desa-desa tersebut dengan fasilitas-fasilitas pelayanan, menggunakan tanda panah. Gunakan tanda panah dengan garis tebal untuk fasilitas pelayanan yang tingkatnya relatif tinggi, sedangkan untuk fasilitas pelayanan yang tingkatnya relatif lebih rendah digunakan garis terputus-putus.
3. Tampilkan antara peta yang satu terhadap peta yang lainnya untuk melihat hubungan antara berbagai pusat-pusat pelayanan dan daerah pelayanan dan identifikasikan kesenjangan spasial (*spatial gap*)

4. Jumlahkan tanda panah yang menuju ke arah tujuan yang sama untuk setiap pusat-pusat pelayanan pada setiap peta dan jumlahkan untuk kesemua peta tersebut. Siapkan peta lagi yang menggambarkan pentingnya suatu pusat pelayanan (secara relatif) dari banyaknya tanda panah yang menuju ke pusat pelayanan tersebut. Agar penskorannya lebih canggih lagi, maka setiap tanda panah dapat diboboti dengan jumlah penduduk untuk setiap desa.

Alat analisa *statistical maps* digunakan pada semua analisa yang dilakukan kecuali untuk studi keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial/*social service linkage studies* Studi keterkaitan pelayanan sosial akan menggunakan alat analisis sosiogram.

Tahapan analisis dimulai dengan menghitung frekuensi tanggapan responden. Pemetaan aliran dilakukan dengan ketebalan garis menurut proporsi persentase, atau dengan simbol-simbol yang mewakili unit-unit tertentu, atau dengan *shading*. Penentuan intensitas interaksi dilakukan dengan menghitung jumlah rata-rata persentase, untuk selanjutnya dikategorikan berdasar kelas interaksi lemah, sedang, dan kuat. Pembagian kelas intensitas menjadi tiga kategori tersebut dikarenakan derajat *error* yang dipilih cukup besar sehingga ada kemungkinan terjadinya simpangan hasil yang juga cukup besar. Oleh karena itu dipilih pembagian kelas dengan jumlah sedikit agar *range* didalam kelas dapat menampung kemungkinan simpangan tersebut.

Batasan-batasan kelas intensitas interaksi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Intensitas interaksi lemah jika nilai persentase :  $0\% < x < 33\%$
- Intensitas interaksi sedang jika nilai persentase :  $33\% < x < 67\%$
- Intensitas interaksi kuat jika nilai persentase :  $67\% < x < 100\%$



### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari kegiatan studi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang akan menguraikan :

**Bab I. Pendahuluan**, berisi latar belakang mengenai pentingnya peran keterkaitan antar wilayah terhadap proses pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dan adanya indikasi interaksi wilayah antara Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta sehingga memunculkan masalah perlunya melihat secara lebih dalam interaksi yang terjadi, yang kemudian dikembangkan dalam perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian secara substansial dan spasial, kerangka pemikiran serta metodologi penelitian.

**Bab II. Kajian Teori Interaksi Wilayah**, menguraikan teori-teori yang relevan, yaitu teori-teori tentang pengertian interaksi, pengertian wilayah, kajian tentang interaksi wilayah yang mencakup unsur-unsur interaksi wilayah, jenis-jenis interaksi wilayah, serta peran interaksi wilayah dalam pengembangan wilayah.

**Bab III. Kajian Umum Kota Yogyakarta dan Kecamatan Depok, kabupaten Sleman**, berisi gambaran secara umum wilayah penelitian, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, yang meliputi data-data letak wilayah, perekonomian daerah, kependudukan dan ketenagakerjaan, serta fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi.

**Bab IV. Analisis dan Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta**, yang berisikan pembahasan tentang interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta, meliputi keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan.

**Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi,** yang berisikan kesimpulan hasil penulisan berdasarkan temuan studi serta rekomendasi tentang usulan tindak lanjut atas kondisi interaksi yang terjadi di Kecamatan Depok dan rekomendasi tentang studi lanjutan yang perlu dilakukan sebagai pengembangan hasil studi ini.

## **BAB II**

### **TEORI INTERAKSI KEWILAYAHAN**

Suatu wilayah tidak hanya merupakan sistem fungsional permukiman (*settlement*) tetapi juga merupakan jaringan interaksi sosial, ekonomi, dan fisik. Proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan diantara permukiman yang ada. Oleh karena itu, perencana wilayah dan pembuat kebijakan seharusnya mempertimbangkan efektifitas proses interaksi dan tingkat keterhubungan antar permukiman dalam memberikan akses maksimal bagi penduduk yang tinggal di semua bagian wilayah.

Untuk lebih memahami penelitian ini, maka beberapa teori yang dirasa cukup relevan untuk diuraikan mencakup pengertian tentang interaksi, pengertian wilayah, kajian tentang interaksi wilayah. Kajian tentang interaksi wilayah sendiri mencakup dasar-dasar terjadinya interaksi wilayah, jenis-jenis interaksi wilayah, dan peranan interaksi wilayah dalam pengembangan wilayah.

#### **2.1. Pengertian Interaksi**

Jika kita membicarakan tentang terjadinya kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan hasil dari kontak itu dapat timbul suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu, maka apa yang sedang atau yang sudah terjadi itu dapat diartikan sebagai interaksi (Bintarto, 1989: 61). Menurut Bintarto, interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan.

Pengertian lainnya tentang interaksi dikemukakan oleh Yoseph S. Roucek, yang mengartikan *interaction* sebagai berikut:

*Interaction is a process in which the responses of each partly become, successively, stimula for the responses of the other. It is a reciprocal process in which one party is influenced by the other behavior. People influence each other behavior through contact direct speaking, listening, indirect writing (Bintarto, 1989: 61).*

Lebih kurang bila diterjemahkan, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar atau melalui surat kabar.

Interaksi dalam pengertian keruangan menurut Daldjoeni (1992, 189) adalah karena manusia memiliki ciri bergerak. Hal ini tidaklah disebabkan karena ia dengan kemauannya sendiri dapat pergi ke tempat lain secara sadar saja, tetapi juga karena ia mampu menggerakkan (memindahkan) berbagai barang dan gagasan ke alamat lain. Ia mampu menerima pemindahan barang dan gagasan (informasi) yang diperlukan

Lebih lanjut lagi Rondinelli dan Ruddle (1978; 60) menyatakan bahwa proses interaksi dapat diidentifikasi sebagai proses pembangunan wilayah. Interaksi terjadi dalam hubungan saling keterkaitan antar pusat-pusat permukiman yang semakin lama semakin kuat sampai akhirnya tercipta diversifikasi sebagai proses pembangunan wilayah

Selengkapnya Rondinelli dan Ruddle menulis:

*"...Settlements of various sizes, specializing in different economics and social functions, must be linked to each other through a network of physical, economic, technological, social and administrative interaction. The linkages – patterns of transaction among groups and organizations located in spatially dispersed communities with sufficient threshold sizes of population to support their own specialized activities – are the primary means of expanding the system of exchange and transforming underdeveloped societies."*

## 2.2. Pengertian Wilayah

Definisi baku mengenai wilayah (*region*) hingga kini belum ada kesepakatan diantara para ahli ekonomi, geografi, sosial, maupun ahli-ahli lainnya yang menekuni bidang ini (Isard, 1960; Bendavid, 1975; Richardson, 1978). Sebagian ahli mendefinisikan wilayah dengan merujuk pada tipe-tipe wilayah, ada pula yang mengacu pada fungsi-fungsi suatu wilayah (kawasan), dan sebagian lainnya berdasarkan korelasi yang kuat diantara unsur-unsur (fisik dan nonfisik) pembentuk suatu wilayah (Ambardi dan Prihawantoro, 2004; 97).

John Glasson (1977; 19) mengemukakan Konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi muncul melalui dua fase yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada fase pertama memperlihatkan “wilayah formal” yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan “wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan daerah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, iklim dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi berikutnya terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe industri atau tipe pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik. Perhatian kepada bentuk klasifikasi wilayah ini sebagian timbul karena adanya kenyataan bahwa faktor-faktor fisik lebih stabil dari pada faktor ekonomi dinamik dan dengan demikian lebih mudah untuk dipelajari. Sedang wilayah formal ekonomi pada umumnya didasarkan pada tipe-tipe industri atau pertanian, walaupun latar belakang sifat

fisik sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Usaha-usaha yang dilakukan pada waktu-waktu berikutnya untuk menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan pada kriteria seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi.

Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-kadang disebut sebagai Wilayah nodal atau *polarised region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

Wilayah formal atau wilayah fungsional ataupun gabungan keduanya memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan untuk memecahkan persoalan-persoalan wilayah.

Klasifikasi tentang wilayah diatas tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Richardson (1979) yang membagi wilayah atas tiga tipe yaitu :

- Wilayah Homogen

Wilayah dilihat dari segi kesamaan karakteristik serta dimana perbedaan internal dan interaksi intraregional dianggap bukan sesuatu yang penting. Wilayah homogen menunjukkan bahwa beberapa daerah berkumpul membentuk sebuah wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kesamaan secara ekonomi, keadaan geografi, atau sosial politik. Dalam konsep wilayah homogen, hubungan regional yang didasari oleh ekonomi lebih penting dari pada perbedaan intraregional.

- Wilayah Nodal (*Polarized*)

Pada wilayah ini keseragaman hanya sedikit diperhatikan. Keterpaduan merupakan hasil dari aliran-aliran internal, hubungan dan saling ketergantungan biasanya terpolarisasi menuju ke sebuah pusat (*node*) yang dominan. Dalam konsep ini dipahami bahwa ruang ekonomi sangatlah heterogen. Penduduk dan industri tidak tersebar di seluruh lokasi tetapi berkumpul pada lokasi-lokasi yang spesifik. Pada tingkat regional, wilayah disusun oleh titik-titik yang heterogen dengan ukuran berbeda-beda (kota besar, kota kecil, desa) yang berkaitan secara fungsional.

- Wilayah Perencanaan

Dalam konsep ini kesatuan diperoleh dari kontrol politik atau *administrative*. Wilayah perencanaan lebih mudah dipahami sebagai sebuah daerah dimana kebijaksanaan ekonomi diterapkan, dan hal ini merupakan satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Ukuran wilayah perencanaan yang optimal dibedakan dengan panjang waktu perencanaan. Daerah yang lebih besar dibutuhkan untuk perencanaan jangka panjang, sebaliknya wilayah perencanaan yang lebih kecil menawarkan berbagai keuntungan sistem desentralisasi, antara lain : kesempatan partisipasi masyarakat, biaya informasi rendah, penghematan waktu manajerial, dan kualitas keputusan yang lebih tinggi. Selain itu keuntungan utama dari pendekatan wilayah perencanaan adalah bahwa data dikumpulkan pada unit administrasi yang menjadikan dampak kebijakan lebih mudah untuk dievaluasi, dan struktur administrasi wilayah memudahkan implementasi kebijakan. Kerugiannya adalah kemungkinan tidak konsistennya antara batas administrasi wilayah dengan batas wilayah ekonomi.

Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang (Soefaat et al, 1997) yang mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Pengertian yang juga relevan dikemukakan dalam kajian teori interaksi kewilayahan adalah pengetahuan tentang ruang. Berdasarkan Kamus Tata Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum wilayah dapat diartikan sebagai suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian unit geografi disini merujuk pada ruang (*spatial*), sehingga pengertian wilayah tidak hanya sebatas aspek fisik tanah, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain seperti biologi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya (Ambardi dan Prihawantoro, 2004; 97).

### 2.3. Interaksi Wilayah

Interaksi wilayah dapat dijelaskan dengan pendekatan teori keruangan. Menurut Ullman interaksi *spatial* mencakup gerak dari barang, penumpang, migran, uang, dan informasi (Daldjoeni, 2003; 245). Konsep ini serupa dengan *geography of circulation* yang dikembangkan oleh ahli-ahli geografi dari Perancis pada awal abad kedua puluh (Johnston, dkk., 1994). Sirkulasi merupakan basis interaksi keruangan begitu pula dengan apa yang dalam ilmu geografi disebut sebagai 'situasi'. Yang dimaksud dengan sirkulasi adalah semua pergerakan dan komunikasi. Sementara istilah situasi mengacu pada efek suatu fenomena di suatu area terhadap area lainnya (Blunden, 1978; 167).



Menurut Bendavid (1991; 9) ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan interaksi wilayah yang dapat dibedakan menjadi pertanyaan kuantitatif dan pertanyaan non kuantitatif, yaitu:

- Pertanyaan kuantitatif, yaitu pertanyaan tentang karakter dan intensitas aliran ke dan dari pemasok serta pembeli di wilayah yang berbeda, termasuk pasar akhir dan pasar antara (*final and intermediate market*), sumber-sumber dan destinasi transfer pendapatan, dan aliran faktor-faktor produksi; pertanyaan tentang konsekuensi aliran-aliran ekonomi tersebut; dan pertanyaan tentang pola perubahan aliran dan perubahan konsekuensi.
- Pertanyaan non kuantitatif, yaitu pertanyaan tentang kebijakan nasional dan implementasinya, institusi publik dan institusi swasta utama beserta operasinya, infrastruktur dan pasar-pasar yang digunakan suatu wilayah untuk berinteraksi dengan wilayah lain dan dengan negara lain; pertanyaan tentang sifat umum dan konsekuensi dari adanya interaksi; serta pertanyaan tentang masalah-masalah potensial dan peluang-peluang dari adanya interaksi berkaitan dengan pembangunan wilayah selanjutnya.

### 2.3.1. Dasar-Dasar Terjadinya Interaksi Wilayah

Suatu wilayah tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya, sehingga memerlukan suplai dari wilayah-wilayah lain. Akibat adanya ketergantungan tersebut maka terjadi hubungan/interaksi. Interaksi itu terjadi karena adanya mobilitas penduduk, aliran barang dan jasa, aliran informasi dan aliran uang (Ambardi dan Prihawantoro, 2002;9)

Lebih lanjut Ambardi dan Prihawantoro mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya keterkaitan/interaksi (2002; 10). Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan setiap kota berbeda-beda
2. Berlangsungnya mekanisme pasar (*supply and demand*)
3. Sifat sosial manusia dalam memenuhi kebutuhannya (bekerja, sosial, sekolah dan lainnya)
4. Perkembangan ekonomi yang bersifat akumulatif dan menyebabkan karakteristik perkembangan setiap kota berbeda-beda.

Dari sisi mobilitas penduduk, keputusan pergerakan manusia dapat dilihat sebagai fungsi dari dua pertimbangan, yaitu: daya tarik destinasi tertentu atau peluang pergerakan dan biaya untuk melakukan pergerakan tersebut (Cox, 1972; 35).

Terjadinya interaksi keruangan menurut Ullman berkaitan dengan tiga unsur, yaitu komplementaritas, *the absence of intervening opportunities* dan transferabilitas. Banyak penjelasan tentang ketiga unsur tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Daldjoeni (2003;247-248), Blunden, dkk (1978;171), Abler dkk (1972; 193-194), John R. Short (1984; 71), dan Rodrigue (<http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en.htm>). Berikut penjelasan tentang ketiga unsur yang menjadi dasar terjadinya interaksi keruangan:

1. Komplementaritas, yaitu saling melengkapi

Banyak yang menyatakan bahwa sirkulasi atau interaksi merupakan hasil dari *areal differentiation*. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Oblin (1933) dalam Blunden (1978; 171) bahwa komplementaritas merupakan fungsi dari *areal differentiation* baik baik karena alam maupun karena budaya.

Hal ini bisa dikatakan benar, tetapi diferensiasi saja tidak akan mendorong terjadinya pertukaran. Agar dua wilayah dapat saling berinteraksi harus ada permintaan di

wilayah yang satu dan penawaran di wilayah yang lainnya. Permintaan dan penawaran tersebut harus saling melengkapi.

Ullman menyimpulkan bahwa semakin besar komplementaritas, semakin besar pula arus komoditas yang terjadi antar wilayah.

## 2. Ada *intervening opportunity*

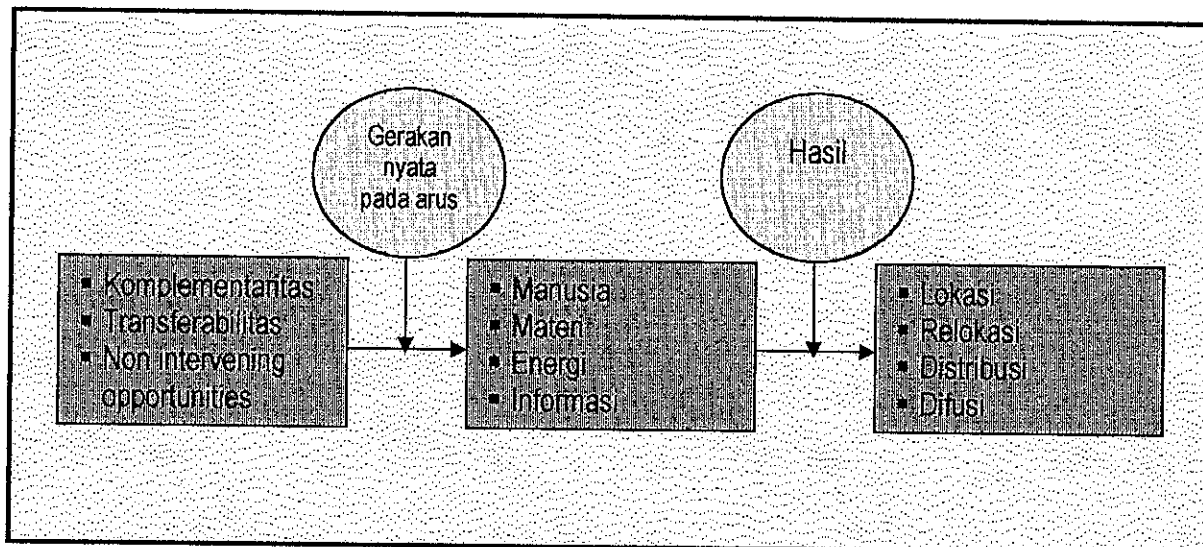
Komplementaritas antar tempat dapat menimbulkan pertukaran hanya jika tidak ada *intervening opportunities*. Dalam mempertimbangkan pergerakan suatu barang dari tempat A ke tempat B harus dipertimbangkan adanya tempat C diantara A dan B yang mungkin akan menjadi *intervening origin* atau menjadi daerah tujuan alternatif. Jadi komplementaritas hanya akan terjadi jika tidak ada *intervening opportunities*. Semakin besar *intervening opportunities*, semakin kecil arus komoditas.

## 3. Transferabilitas (Friksi jarak)

Transferabilitas diukur berdasarkan biaya waktu dan uang. Jika biaya waktu dan uang untuk melintasi suatu jarak sangatlah besar maka tidak akan terjadi pergerakan meskipun ada komplementaritas sempurna dan tidak ada *intervening opportunity*.

Lebih lanjut menurut Ullman ketiga basis interaksi ini menggunakan pertimbangan ekonomi serta didasarkan pada asumsi bahwa perilaku keruangan (*spatial behaviour*) seseorang adalah rasional.

Adapun cara interaksi berlangsung dapat dijelaskan oleh Schonmaker (Daldjoeni, 1992; 199) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1.



**GAMBAR 2.1. PENGERTIAN-PENGERTIAN POKOK  
CARA INTERAKSI KERUANGAN**

Sumber: Schonmaker, G, J, 1984; 31

### 2.3.2. Jenis-jenis Interaksi Wilayah

Jenis-jenis interaksi antar wilayah dalam geografi menurut Daldjoeni (2003; 248-249) adalah :

1. Sistem interaksi keruangan ekonomis, misalnya yang terdapat antara penjual dan pelanggan
2. Sistem interaksi keruangan politis
3. Sistem interaksi keruangan sosial, yang kegiatannya lebih bercorak murni kemasyarakatan
4. Sistem interaksi keruangan manusia-lingkungan (ekologis), misalnya relasi antara manusia dengan atmosfer, dengan persediaan bahan mentah, dengan kota sebagai suatu lingkungan binaan.

Jenis interaksi wilayah lainnya dikemukakan oleh Bendavid (1991; 141) yang ditunjukkan dalam tabel II.1.

**TABEL II.1**  
**KATEGORI KETERKAITAN WILAYAH**

Kategori keterkaitan	Elemen dan Aliran Yang Tercakup
Transportasi	Jalan, air, rel, dan rute transportasi udara, infrastruktur dan stok armada (termasuk kondisinya), tipe-tipe utama kargo, pola penggunaan, kepemilikan dan pengendalian, pelayanan yang ditawarkan
Komunikasi	Telegraf, surat kabar, dan jaringan media komunikasi lainnya, tipe-tipe infrastruktur (termasuk kondisinya), pola dan tipe penggunaan, kepemilikan dan pengendalian, pelayanan yang tersedia, metoda formal maupun informal penting lainnya dalam diseminasi informasi, termasuk lokasi dan tipe titik-titik dan <i>audience</i> utama diseminasi
Sumber daya alam	Sistem sumber daya alam, seperti sistem sungai, sistem drainase, arus-arus angin, zona <i>agro-climatic</i> , dan juga intervensi terhadap sistem ini, seperti jaringan irigasi yang menciptakan saling ketergantungan antar subarea dalam suatu wilayah
Ekonomi	Rantai pemasaran akhir dan antara serta aliran barang; keterkaitan produksi; pola belanja konsumen; pola kepemilikan dan pengendalian ekonomi; aliran pendapatan, termasuk transfer dan <i>remittance</i> ; aliran modal; sistem keuangan formal dan informal; komutasi; migrasi karyawan muslim
Sosial	Pola pertalian kelompok etnis dan kepercayaan; pola pertalian kekeluargaan (terutama desa-kota atau antar subarea); keterkaitan kelas sosial
Pelayanan Publik	Jaringan utilitas; jaringan pendidikan dan pelatihan; sistem diseminasi penelitian dan informasi khusus; pelayanan transportasi pribadi; keterkaitan pelayanan kesehatan; jaringan asosiasi sukarelawan.
Institusional	Keterkaitan administrasi publik; sistem alokasi anggaran antar tingkatan administratif yang berbeda, rantai keputusan politik; pola kekuasaan-persetujuan-supervisi.

Sumber: Bendavid (1991; 141)

Sedangkan menurut Rondinelli (1985; 142-148), ada tujuh interaksi keruangan dalam perencanaan pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keterkaitan fisik (*physical linkage*).

Integrasi spasial dari komunitas menghasilkan keterhubungan fisik melalui jaringan transportasi baik yang alami maupun rekayasa. Jalan-jalan baru, *water channel*, dan sistem rel kereta dapat mengurangi waktu perjalanan, mengurangi biaya pengiriman, memperluas pemasaran, memberikan peluang ulang-alik dan migrasi, memperbesar akses pada tenaga kerja non-pertanian, meningkatkan komunikasi dan memperluas area pelayanan.

2. Keterkaitan ekonomi (*economic linkage*).

Interaksi ekonomi juga mendorong integrasi ruang. Keterkaitan yang paling penting adalah jaringan pasar dimana komoditas, bahan baku, produk-produk manufaktur mengalir antar wilayah; aliran modal dan pendapatan; serta keterkaitan ke depan dan ke

belakang (*forward and backward linkage*) diantara aktivitas pemrosesan manufaktur dan pertanian.

3. Keterkaitan pergerakan penduduk (*population movement linkages*).

Keterkaitan ini berkaitan dengan pola migrasi baik permanen maupun temporer. Migrasi temporer lebih kuat dibandingkan dengan bentuk lain dari interaksi spasial.

4. Keterkaitan teknologi (*technological linkages*)

Pembangunan wilayah memerlukan berbagai teknologi yang sesuai dengan kapasitas sosial, ekonomi, teknik, dan administrasi masyarakat yang berada pada tahapan pembangunan yang berbeda. Teknologi (peralatan, cara/prosedur dan metode produksi) harus diintegrasikan secara spasial dan fungsional karena tidak ada satu inovasi teknologi pun yang akan memacu transformasi sosial dan ekonomi pada suatu wilayah jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tersebut. Selain itu, teknologi yang diterapkan harus terkait dengan teknologi yang lebih tinggi maupun teknologi yang lebih rendah serta terhubung dengan inputnya. Keterkaitan spasial dan organisasional sangat penting bagi teknologi industri padat modal. Agar memberikan dampak pada pembangunan, teknologi padat modal harus dikenalkan pada industri yang memiliki keterkaitan kuat baik ke depan maupun ke belakang dan pada negara yang memiliki koneksi kuat antara program-program ilmiah pemerintah dengan kegiatan sektor swasta.

5. Keterkaitan sosial (*social linkages*).

Kota-kota kecil dan kota-kota menengah yang berfungsi sebagai pasar tidak hanya mendorong terjadinya aktifitas fisik dan ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai keterkaitan sosial antar wilayah. Tipe dan frekuensi aktivitas ekonomi seringkali berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Pusat-pusat pasar menjadi fokus spasial

bagi interaksi sosial area perdagangan yang luas. Perluasan area pasar akan memperluas jangkauan interaksi sosial yang berupa perencanaan pernikahan, kokohnya integrasi suku-suku, masyarakat, dan desa-desa kecil, menumbuhkan ikatan persaudaraan dan pola kunjungan baru, serta transformasi kelompok sosial dan hubungan organisasional.

6. Keterkaitan pemanfaatan pelayanan (*service delivery linkages*).

Peningkatan keterhubungan fisik, ekonomi dan teknologi antar tempat-tempat pusat sangat penting untuk memperluas jaringan penyediaan pelayanan dalam pembangunan suatu bangsa. Hampir semua pelayanan memerlukan dukungan jumlah penduduk minimum yang terkonsentrasi dalam area geografis tertentu, yaitu populasi ambang (*threshold population*) dengan jumlah dan kepadatan yang cukup untuk menarik pelanggan dalam jumlah yang dapat menghasilkan laba bagi penyedia pelayanan komersial dan profesional dan memungkinkan pelayanan publik dapat mencapai jumlah penduduk untuk dilayani sebanyak-banyaknya dengan biaya terkecil. Tingkat ambang bagi tiap pelayanan sangat beragam. Karena masing-masing pelayanan memiliki ambang tertentu, maka tipe, derajat spesialisasi dan jangkauan pelayanan suatu jasa dalam masyarakat tergantung pada besaran dan kepadatan populasi, profil pekerjaan dan distribusi pendapatan, akses transportasi serta diversifikasi ekonomi.

Pelayanan juga mempunyai jangkauan pengaruh yang berbeda-beda, yaitu jarak dimana pelayanan tersebut dapat diperluas atau jarak yang sanggup ditempuh orang untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Semakin luas area pengaruh dan semakin padat konsentrasi pengguna dalam area tersebut maka penyediaan pelayanan tersebut akan semakin efisien terutama bagi pelayanan yang memerlukan fasilitas fisik atau infrastruktur untuk penyediaannya, seperti pelayanan air bersih, listrik, dan kesehatan.

## 7. Keterkaitan administratif, politik dan kelembagaan

Sistem ruang adalah sistem yang diintegrasikan dan ditransformasikan melalui rangkaian keterkaitan politik dan administratif yang direfleksikan dalam hubungan struktural pemerintahan formal, yang mengalirkan sumber-sumber pembelanjaan pembangunan, pejabat administratif, acuan supervisi, dan saling ketergantungan antar organisasi yang tersebar.

Keterkaitan antar organisasi pemerintah tidak hanya memperluas pelayanan, fasilitas dan sumber daya anggaran di seluruh sistem ruang, namun juga bertindak sebagai saluran untuk memperoleh dukungan politis dan kewenangan dalam melakukan aktivitas yang penting dalam mengintegrasikan pembangunan.

Adapun tipe keterkaitan dan elemen-elemennya digambarkan oleh Rondinelli (1985) sebagai berikut:

**TABEL II.2**  
**KETERKAITAN UTAMA DALAM PEMBANGUNAN RUANG**

NO	TIPE	ELEMEN-ELEMEN
1	Keterkaitan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan jalan</li> <li>▪ Jaringan transportasi sungai dan air</li> <li>▪ Jaringan rel kereta api</li> <li>▪ Ketergantungan ekologis</li> </ul>
2	Keterkaitan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pola Pemasaran</li> <li>▪ Aliran bahan baku dan barang antara</li> <li>▪ Aliran Modal</li> <li>▪ Keterhubungan produksi (backward, forward dan lateral)</li> <li>▪ Pola konsumsi dan belanja</li> <li>▪ Aliran Pendapatan</li> <li>▪ Aliran komoditi sektoral dan interregional</li> <li>▪ Keterkaitan silang</li> </ul>
3	Keterkaitan pergerakan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Migrasi, temporer dan permanen</li> <li>▪ Perjalanan ke tempat kerja</li> </ul>
4	Keterkaitan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketergantungan teknologi</li> <li>▪ Sistem irigasi</li> <li>▪ Sistem telekomunikasi</li> </ul>
5	Keterkaitan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pola Kunjungan</li> <li>▪ Pola kekeluargaan</li> <li>▪ Kegiatan upacara, ritual, kepercayaan</li> <li>▪ Interaksi kelompok sosial</li> </ul>



NO	TIPE	ELEMEN-ELEMEN
6	Keterkaitan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aliran dan jaringan energi</li> <li>▪ Jaringan kredit dan finansial</li> <li>▪ Keterhubungan pendidikan dan pelatihan</li> <li>▪ Sistem pelayanan kesehatan</li> <li>▪ Sistem pelayanan transport</li> </ul>
7	Keterkaitan politik, administratif dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan struktural</li> <li>▪ Aliran anggaran Pemerintah</li> <li>▪ Ketergantungan organisasional</li> <li>▪ Pola otoritas-persetujuan-supervisi</li> <li>▪ Pola transaksi inter-yurisdiksi</li> <li>▪ Rantai informal keputusan politis</li> </ul>

Sumber: Rondinelli (1985; 143)

Analisis terhadap keterkaitan-keterkaitan tersebut dapat memberikan informasi bagi perencana dan pembuat kebijakan dalam menentukan tingkat integrasi permukiman yang ada pada satu wilayah, tingkat aksesibilitas penduduk di seluruh bagian wilayah dalam memperoleh pelayanan dan fasilitas kota serta perkiraan area pelayanan suatu permukiman tempat pusat.

### 2.3.3. Peran Interaksi Kewilayahan dalam Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah terjadi melalui pertumbuhan dan diversifikasi permukiman serta melalui penciptaan keterkaitan yang baru dan lebih kuat diantara permukiman tersebut. Pada beberapa kasus, perluasan keterkaitan fisik seperti jalan, rel kereta api atau transportasi sungai telah menciptakan pertumbuhan dan diversifikasi permukiman. Pada kasus lain penciptaan keterkaitan yang baru dapat mendorong tumbuhnya tempat pusat yang baru. Penciptaan satu keterkaitan baru akan menghasilkan *cascade effect*, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan lain. Interaksi yang lebih erat antar wilayah menjadikan integrasi teknologi di tiap tingkatan hirarki spasial lebih mudah dan murah dilakukan serta memungkinkan pendistribusian pelayanan secara lebih luas sehingga mendorong terjadinya pengembangan wilayah.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya interaksi wilayah sebagaimana dikemukakan beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- Dapat digunakan untuk mengidentifikasikan ketergantungan antar wilayah geografis (Johnston dkk., 1994; 578).
- Berguna untuk analisis hubungan eksternal kota-kota. Rugg (1979).
- Penciptaan satu keterkaitan baru dalam interaksi wilayah akan menghasilkan *cascade effect*, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan lain (Rondinelli, 1985; 141)
- Dapat mendorong tumbuhnya tempat pusat baru (Rondinelli, 1985; 141)
- Adanya interaksi yang erat akan membuat integrasi teknologi menjadi lebih mudah dan lebih murah pada setiap tingkatan hirarki spasial. Interaksi yang erat juga memungkinkan pendistribusian pelayanan secara lebih luas. Dari dua manfaat tersebut akan terjadi pembangunan wilayah (Rondinelli 1985; 142)
- Menjadikan kegiatan perkotaan semakin efisien, baik bagi kegiatan pembangunan kota itu sendiri maupun bagi pengembangan wilayah sekitarnya (Ambardi dan Prihawantoro, 2002; 13)

## 2.4. Sintesa Teori dan Variabel Interaksi Wilayah

### 2.4.1. Sintesa Teori

Interaksi wilayah dapat dianalisis dengan pendekatan keruangan untuk mengidentifikasikan ketergantungan antar wilayah geografis. Selain itu, interaksi keruangan juga berguna untuk sebuah analisis hubungan eksternal kota-kota. Interaksi ini mencakup gerak dari barang, penumpang, migran, uang dan informasi.

Interaksi dapat diidentifikasi sebagai proses pembangunan wilayah. Pembangunan adalah proses interaksi antar wilayah yang terjadi akibat adanya keterkaitan

sistem jaringan fisik, sosial, teknologi, politik, institusi dan ekonomi. Terjadinya interaksi keruangan berkaitan dengan tiga unsur (Ullman dalam Daldjoeni, 2003; 247-248), yaitu :

- Adanya komplementaritas,
- Adanya transferabilitas,
- Adanya intervening opportunities

Jenis-jenis interaksi wilayah telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Diantara pendapat tersebut, ada yang menyatakan bahwa jenis-jenis interaksi wilayah dalam geografi meliputi sistem interaksi keruangan ekonomis, sistem interaksi keruangan politis, sistem interaksi keruangan sosial, sistem interaksi keruangan manusia-lingkungan.

Pendapat lainnya melihat bahwa interaksi wilayah terdiri dari keterkaitan-keterkaitan transportasi, komunikasi, sumber daya alam, ekonomi, sosial, pelayanan publik, dan institusional. Adapula yang menyatakan bahwa interaksi wilayah (pembangunan ruang) ada tujuh keterkaitan. Ketujuh keterkaitan tersebut adalah keterkaitan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, sosial, pelayanan, serta keterkaitan politik, administratif dan organisasi.

Beberapa jenis yang dikemukakan oleh para ahli tersebut adalah sama, dan beberapa lagi diantaranya saling melengkapi. Tidak ada perbedaan yang mendasar diantara semua pendapat tersebut.

#### **2.4.2. Variabel Interaksi Wilayah**

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dalam menganalisa intensitas interaksi wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terhadap Kota Yogyakarta akan mencakup tiga jenis keterkaitan, yaitu keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial.

Keterkaitan ekonomi berhubungan erat dengan pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur, keterkaitan produksi ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*). Selain itu, keterkaitan ekonomi juga menyangkut aliran modal, aliran pendapatan, serta pola/kebiasaan berbelanja. Keterkaitan sosial berkaitan dengan pola kunjungan dan interaksi kelompok sosial. Sedangkan keterkaitan penyediaan pelayanan sosial berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Adapun variabel-variabel yang diturunkan dari teori untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan ekonomi, variabelnya adalah: keterhubungan produksi, pola konsumsi dan belanja, pola aliran pendapatan serta pola aliran modal
2. Keterkaitan sosial, variabelnya adalah pola kunjungan, dan interaksi kelompok sosial.
3. Keterkaitan penyediaan pelayanan sosial, variabelnya adalah pemanfaatan pelayanan pendidikan serta pemanfaatan pelayanan kesehatan.

### **BAB III**

## **KAJIAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**

Dalam kajian umum wilayah penelitian ini akan disajikan data-data tentang letak masing-masing wilayah untuk mendapatkan gambaran adanya keterkaitan secara fisik antara kedua wilayah penelitian. Selain itu juga disajikan data-data tentang perekonomian wilayah yang berupa data produk domestik regional brutto (PDRB) dan sarana perekonomian yang ada. Ditampilkannya data PDRB dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai *reasoning* yang mungkin diperlukan dalam analisis keterkaitan ekonomi. Data sarana ekonomi juga akan bermanfaat dalam analisa keterkaitan ekonomi yang akan sangat membantu dalam pemetaan.

Data lain yang juga ditampilkan adalah data kependudukan dan ketenagakerjaan. Data kependudukan dimaksudkan agar sedikit banyak diperoleh gambaran adanya keterkaitan pergerakan penduduk. Sedangkan data ketenagakerjaan digunakan untuk penentuan sample.

Data fasilitas sosial yang mencakup fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan ditampilkan dalam kajian wilayah ini untuk mendukung analisa keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial atas dua jenis fasilitas tersebut.

### **3.1. Kajian Umum Wilayah Kota Yogyakarta**

#### **3.1.1. Letak Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta terletak pada  $7^{\circ} 49' 26''$  -  $7^{\circ} 15' 24''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 24' 19''$  -  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur, dengan jarak terjauh utara-selatan sekitar 7,5 KM, dan jarak terjauh barat-timur sekitar 5,6 KM.

Batas-batas wilayah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
Sebelah Barat	: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
Sebelah Utara	: Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bantul

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar dan berada pada ketinggian rata-rata 114 M dpa. Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 M dpa dan sisanya seluas 1.593 hektar terletak pada ketinggian 100-199 m dpa.

Di wilayah Kota Yogyakarta mengalir tiga sungai dari arah Utara ke Selatan yaitu sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur kota, sungai Code di bagian Tengah dan sungai Winongo di bagian Barat kota.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan luas wilayah 32,5 km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke-14 Kecamatan di Kota Yogyakarta tersebut adalah: Kecamatan Mantriweron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Kecamatan Tegalrejo.

### **3.1.2. Perekonomian Kota Yogyakarta**

#### **3.1.2.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kota Yogyakarta**

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditunjukkan disini adalah data PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993. Penyajian atas dasar harga konstan dimaksudkan agar dapat dilihat perkembangan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi perubahan harga, atau yang secara umum disebut sebagai inflasi.

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasar harga konstan tahun 1993 Kota Yogyakarta menunjukkan adanya pertumbuhan baik dari tahun 1998 ke tahun 1999, maupun dari tahun 1999 ke tahun 2000. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**TABEL III.1**  
**PDRB KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1998-2000**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1993**

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
1. Pertanian	12.736.000.000	12.058.000.000	12.291.000.000
2. Pertambangan dan Penggalian	346.000.000	293.000.000	277.000.000
3. Industri Pengolahan	145.556.000.000	148.049.000.000	152.158.000.000
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	17.208.000.000	17.316.000.000	18.193.000.000
5. Bangunan	78.259.000.000	78.926.000.000	82.272.000.000
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	258.704.000.000	260.739.000.000	282.346.000.000
7. Pengangkutan dan Komunikasi	209.814.000.000	212.576.000.000	222.661.000.000
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	225.756.000.000	227.351.000.000	227.104.000.000
9. Jasa-Jasa	347.448.000.000	352.126.000.000	360.614.000.000
Produk Domestik Regional Bruto	1.296.097.000.000	1.309.434.000.000	1.357.916.000.000

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta atas dasar harga konstan pada tahun 2000 adalah 3,70 % (BPS Kota Yogyakarta, 2002) sedangkan besarnya PDRB per kapita penduduk atas dasar harga konstan untuk tahun 2000 adalah Rp.3.422.935,00.

### **3.1.2.2. Sarana Perekonomian di Kota Yogyakarta**

Hasil penelitian Sudewo dalam Koestoer (2001; 38) tentang sarana perekonomian yang berupa pertokoan tersebar sepanjang jalan besar. Pada jalur utara-selatan, pertokoan banyak memadati Jalan Malioboro, Jalan A.M. Sangaji, Jalan Sutomo, Jalan Wahidin, Jalan Taman Siswa, dan Jalan Suryo Mataram. Sedangkan pada jalur barat-

timur ada pada Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan urip Sumohardjo, Jalan Adisucipto, Jalan R.E.Martadinata, Jalan K.H.A. Dahlan, Jalan Sultan Agung, Jalan Kusumanegara, Jalan Sugeng Jeroni, dan Jalan Menteri Supeno.

Sedangkan untuk sarana pasar, Kota Yogyakarta memiliki 31 pasar. Pasar terbesar adalah Pasar Beringharjo, dengan luas 55.442,98 m<sup>2</sup>, yang berada di Kawasan Malioboro. Berikut adalah data pasar yang ada di Kota Yogyakarta:

**TABEL III.2**  
**NAMA DAN ALAMAT PASAR DI KOTA YOGYAKARTA**

Nama Pasar	Alamat Pasar
Beringharjo	Jl. Pabringan No.1
Pathuk	Jl. Bayangkara
Kranggan	Jl. P.Diponegoro No.20
Pingit	Jl. Kyai Mojo
Kembang	Jl. Pasar Kembang
Karangwaru	Jl. Magelang
Demangan	Jl. Gejayan No.28
Reksonegaran	Jl. Urip Sumoharjo No.22
Terban	Jl. C. Simanjuntak
Gendeng	Jl. Tri Darma
Sanggrahan	Jl. Mawar
Sentul	Jl. Sultan Agung No.52
Lempuyangan	Jl. Hayam Wuruk
Sawo	Prawirodirdjan
Ledok Gondomanan	Jl. Lobaningrat-Prawirodirdjan
Pace	Jl. Kusumanegara
Kotagede	Mondorakan No.172
Gedongkuning	Jl. Kusumanegara
Tanjungsari	Jl. Mentri Supeno No.46
Giwangan	Jl. Imogiri No.212
Serangan	Jl. R.E. Martadinata
Legi	Jl. Bugisan No.12
Senen	Jl. Kampung Pathuk RT 33/RW 07
Suryobrantan	Jl. KH. A. Dahlan
Ngasem	Jl. Polowijo No.11
Ngadikusuman	Suryoputran
Gading	Jl. Mayjen Panjaitan
Pujokusuman	Dalem Pujokusuman keparakan
Karangkajen	Jl. Sisingamangaraja
Prawirotaman	Jl. Parangtritis 103
Ciptomulyo	Jl. Sisingamangaraja No.1

Sumber: BPS Kota Yogyakarta.



### 3.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta

#### 3.1.3.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta

Perkembangan penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1980, SP 1990, dan SP 2000 menunjukkan pergeseran laju pertumbuhan penduduk dari pertumbuhan penduduk yang positif untuk periode 1980-1990, yaitu sebesar 0,34 menjadi pertumbuhan yang negatif untuk periode 1990-2000, yaitu menjadi -0,39. Pada periode ini, Kota Yogyakarta mengalami laju pertumbuhan penduduk terendah di Propinsi DIY.

Data lengkap tentang jumlah penduduk menurut hasil Sensus Penduduk di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

**TABEL III.3**  
**JUMLAH PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA**

Kecamatan	Populasi 1980	Populasi 1990	Populasi 2000
Mantrijeron	31.561	32.845	32.557
Kraton	26.557	22.807	19.778
Mergangsan	32.589	32.188	31.378
Umbulhajo	39.823	58.026	69.269
Kotagede	16.775	23.297	27.900
Gondokusuman	57.014	56.561	48.454
Danurejan	26.246	23.430	19.755
Pakualaman	14.309	12.181	10.593
Gondomanan	20.105	17.659	13.874
Ngampilan	22.403	20.494	17.557
Wirobrajan	25.312	26.975	26.632
Gedongtengen	26.058	22.825	17.857
Jetis	32.669	30.603	25.959
Tegalrejo	26.624	32.168	35.148
<b>Kota Yogyakarta</b>	<b>398.045</b>	<b>412.059</b>	<b>396.711</b>

Sumber: Sensus Penduduk, BPS

### 3.1.3.2. Kegiatan Penduduk Kota Yogyakarta

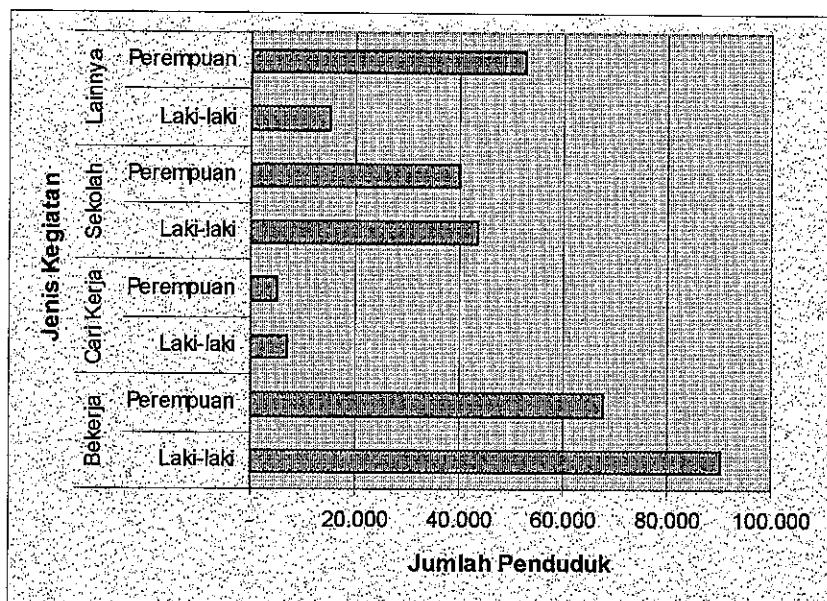
Menurut data Sensus Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2000, mayoritas penduduk Kota Yogyakarta adalah penduduk bekerja, dan bersekolah. Masing-masing sebanyak 158.156 orang dan 83.176 orang.

Data selengkapnya tentang jenis kegiatan penduduk ditunjukkan pada tabel III.4 dan gambar 3.1 berikut ini:

**TABEL III.4**  
**JENIS KEGIATAN PENDUDUK**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2000**

Kecamatan	Bekerja		Cari Kerja		Sekolah		Lainnya	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Mantrijeron	7.954	6.049	561	398	2.831	2.463	1.304	4.421
Kraton	4.674	3.936	420	345	1.434	1.360	808	2.876
Mergangsan	7.128	5.307	467	378	3.284	3.085	1.282	4.460
Umbulharjo	15.026	10.353	1.058	946	9.618	9.393	2.053	7.853
Kotagede	7.220	5.432	334	316	2.263	1.805	867	3.320
Gondokusuman	8.921	7.300	844	634	8.331	7.832	1.785	5.589
Danurejan	4.753	3.616	478	276	1.679	1.380	705	2.998
Pakualaman	2.264	1.864	144	119	874	891	982	1.672
Gondomanan	3.481	3.097	192	111	841	1.015	609	1.912
Ngampilan	4.270	2.975	303	177	1.202	1.528	712	2.714
Wirobrajan	5.650	4.299	519	377	3.721	2.784	1.017	3.224
Gedongtengen	4.614	3.609	389	204	1.035	928	672	2.890
Jetis	6.077	4.211	564	403	2.628	2.089	988	4.071
Tegalrejo	8.284	5.792	583	443	3.564	3.318	1.282	4.791
Kota Yogyakarta	90.316	67.840	6.856	5.127	43.305	39.871	15.066	52.791

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS



**GAMBAR 3.1**  
**JENIS KEGIATAN PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2000**

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS

### 3.1.3.3. Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta

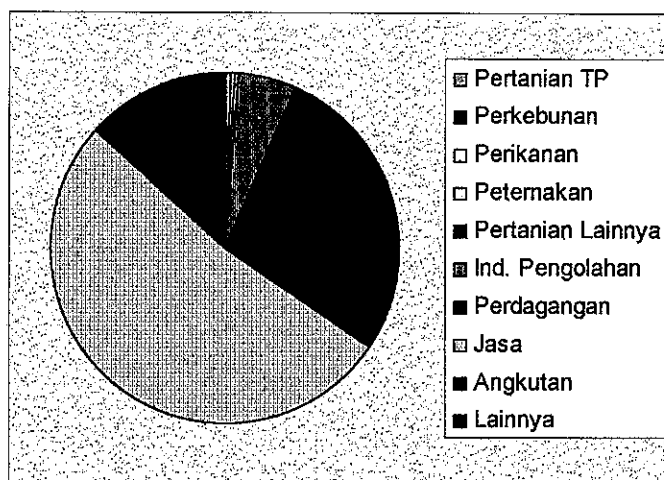
Mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta bekerja dilapangan usaha jasa dan perdagangan sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

**TABEL III.5**  
**JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2000**

Kecamatan	Lapangan Usaha									
	Pertanian TP	Per-kebunan	Per-ikanan	Pe-ternakan	Pertanian Lainnya	Ind. Pengolahan	Per-dagangan	Jasa	Angkutan	Lainnya
Mantrijeron	50	14	14	59	55	782	3.717	8.337	302	673
Kraton	18	9	4	21	8	353	2.475	4.358	123	1.241
Mergangsan	47	13	8	39	27	783	3.195	6.495	338	1.490
Umbulharjo	305	32	24	85	97	1.358	6.515	13.370	779	2.814
Kotagede	129	14	10	45	21	1.656	3.275	6.473	215	814
Gondokusuman	62	78	5	29	25	601	3.414	9.172	317	2.518
Danurejan	8	5	5	18	10	410	3.174	3.770	258	711
Pakualaman	20	0	2	9	2	67	1.043	2.648	62	275
Gondomanan	19	2	6	12	8	188	2.534	3.151	109	549
Ngampilan	28	3	6	24	2	416	2.183	3.795	160	628
Wirobrajan	25	4	2	42	12	777	3.043	4.803	344	897

Kecamatan	Lapangan Usaha									
	Pertanian TP	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Pertanian Lainnya	Ind. Pengolahan	Perdagangan	Jasa	Angkutan	Lainnya
Gedongtengen	23	3	2	11	8	221	2.651	4.108	150	1.046
Jetis	22	3	5	18	10	254	3.141	5.187	290	1.358
Tegalrejo	120	7	1	36	31	731	3.644	6.993	402	2.471
<b>Kota Yogyakarta</b>	<b>876</b>	<b>187</b>	<b>94</b>	<b>448</b>	<b>316</b>	<b>8.597</b>	<b>44.004</b>	<b>82.660</b>	<b>3.849</b>	<b>17.485</b>

Sumber: BPS Kota Yogyakarta



**GAMBAR 3.2.**  
**LAPANGAN USAHA PENDUDUK BEKERJA**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2000**

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS

### 3.1.4. Fasilitas Sosial Kota Yogyakarta

#### 3.1.4.1. Fasilitas Pendidikan Kota Yogyakarta

Secara umum penyediaan fasilitas pendidikan, dasar dan menengah telah terdistribusikan secara merata di wilayah Kota Yogyakarta. Jumlah sekolah yang ada di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 203 Taman Kanak-Kanak (TK), 246 Sekolah Dasar (SD), 65 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 81 Sekolah Menengah Atas (SMU dan SMK), serta 48 perguruan tinggi (8 universitas, 8 institut/sekolah tinggi, dan 32 akademi).

### **3.1.4.2. Fasilitas Kesehatan Kota Yogyakarta**

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Yogyakarta selama tahun 2001-2002 secara lengkap ditunjukkan pada Tabel III.6 berikut ini:

**TABEL III.6**  
**JUMLAH SARANA KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA**  
**2001-2002**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	3
2	Rumah Sakit Jiwa	1
3	Rumah Sakit Khusus	6
4	Puskesmas	126
5	Puskesmas Pembantu	311
6	Puskesmas Keliling	38
7	Praktek perorangan	1.000
8	Praktek Berkelompok	10
9	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	5
10	Rumah Bersalin	12
11	Balai Pengobatan	20
12	Laboratorium Klinik	6
13	Optikal	17

Sumber : BPS Propinsi DIY, 2002

## **3.2. Kajian Umum Wilayah Kecamatan Depok**

### **3.2.1. Letak Kecamatan Depok**

Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Wilayah Kecamatan Depok berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Batas-batas wilayah Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak dan Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik
- Sebelah timur : Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul (Desa Banguntapan) dan Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondokusuman)
- Sebelah barat : Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati

Jarak masing-masing desa di Kecamatan Depok ditunjukkan pada Tabel III.7. Desa yang terdekat dengan Kota Yogyakarta adalah Desa Caturtunggal, sementara Desa yang terjauh dari Kota Yogyakarta adalah Desa Maguwoharjo. Sementara bila dibandingkan dengan jarak ke ibukota Kabupaten Sleman, Desa Condongcatur adalah yang terdekat dari ibukota Kabupaten (8 Km), dan Desa Maguwoharjo adalah yang terjauh (15 Km)

**TABEL III.7**  
**JARAK MASING-MASING DESA DI KECAMATAN DEPOK**  
**TERHADAP IBUKOTA PROPINSI D.I. YOGYAKARTA**

Desa	Jarak Ke Ibukota Prop. DI Yogyakarta (Km)
Caturtunggal	5,50
Maguwoharjo	10,00
Condongcatur	8,00

Sumber: Desa

Luas Kecamatan Depok adalah sebesar 35,55 km<sup>2</sup> yaitu sebesar 6,2 persen dari luas wilayah Kabupaten Sleman.. Luas masing-masing wilayah di Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:

- Caturtunggal : 11,04 km<sup>2</sup>
- Maguwoharjo : 15,01 km<sup>2</sup>
- Condongcatur : 9,50 km<sup>2</sup>

Banyaknya dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang ada di Kecamatan Depok adalah 58 dusun, 223 rukun warga (RW) dan 627 rukun tetangga (RT).

Kecamatan Depok merupakan suatu dataran dengan kemiringan tanah menurun ke arah selatan sebesar 2-8%, sedangkan ketinggiannya berkisar antara 140-250 meter di atas permukaan air laut.

Kedudukan Kecamatan Depok bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai pintu gerbang dari arus kedatangan melalui udara, karena keberadaan Bandara Adisucipto yang terletak di Kecamatan Maguwoharjo.

### 3.2.2. Perekonomian Wilayah Kecamatan Depok

#### 3.2.2.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kecamatan Depok

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasar harga konstan 1993 Kecamatan Depok menunjukkan adanya pertumbuhan baik dari tahun 1998 ke tahun 1999 maupun dari tahun 1999 ke tahun 2000. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel III.8.

**TABEL III.8**  
**PDRB KECAMATAN DEPOK TAHUN 1998-2000**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1993**

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
1. Pertanian	15.429.832.000	14.102.257.000	15.588.773.000
2. Pertambangan dan Penggalian	52.005.000	70.986.000	68.772.000
3. Industri Pengolahan	40.626.861.000	41.262.130.000	41.401.624.000
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4.281.719.000	4.236.580.000	5.292.870.000
5. Bangunan	45.364.667.000	46.902.874.000	49.023.582.000
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	174.088.399.000	178.000.462.000	190.999.282.000
7. Pengangkutan dan Komunikasi	55.314.146.000	55.708.847.000	57.886.339.000
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	51.405.830.000	52.068.801.000	46.677.505.000
9. Jasa-Jasa	174.514.982.000	178.332.594.000	182.696.685.000
Produk Domestik Regional Bruto	561.078.441.000	570.685.531.000	589.635.432.000

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Besarnya pertumbuhan ekonomi Kecamatan Depok atas dasar harga konstan pada tahun 2000 adalah 3,32 % (BPS Kabupaten Sleman, 2001) sedangkan besarnya PDRB per kapita penduduk atas dasar harga konstan untuk tahun 2000 adalah Rp.3.725.880,00.

#### 3.2.2.2. Sarana Perekonomian di Kecamatan Depok

Sarana perekonomian yang paling banyak dimiliki Kecamatan Depok adalah jenis sarana warung. Secara lengkap jumlah sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Depok dan persebarannya tiap desa ditunjukkan dalam tabel III.9 berikut ini:

**TABEL III.9**  
**JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN MENURUT DESA**  
**DI KECAMATAN DEPOK TAHUN 2002**

Desa	Pasar Umum	Pasar Hewan	Toko/Kios	Warung	Bank
Caturtunggal	1	0	346	624	9
Maguwoharjo	2	0	273	386	1
Condongcatur	2	0	308	493	2
Kecamatan	5	0	927	1.503	12

Sumber: BPS Sleman, 2003

Fasilitas perdagangan berupa toko yang terbesar di Kecamatan Depok terletak di Desa Maguwoharjo, yaitu sebuah toko gudang rabat.

### 3.2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kecamatan Depok

#### 3.2.3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Depok

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman antara tahun 1990 - 2000 menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY, yaitu sebesar 1,45%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terutama terdapat di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta. Berikut adalah data jumlah penduduk Kecamatan Depok menurut hasil Sensus Penduduk

**TABEL III.10**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DEPOK**

Sensus Penduduk	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1980	82.661	
1990	62.780	-24,05
2000	158.254	152,08

Sumber: Sensus Penduduk, BPS

Populasi penduduk di Kecamatan Depok adalah yang terbesar diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. Kepadatan penduduknya juga merupakan yang terbesar di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 3.069 jiwa per km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk masing-



masing desa adalah 4.889 jiwa per km<sup>2</sup> di Desa Caturtunggal, 1.573 jiwa per km<sup>2</sup> di Desa Maguwoharjo dan 3.316 jiwa per km<sup>2</sup> di Desa Condongcatur.

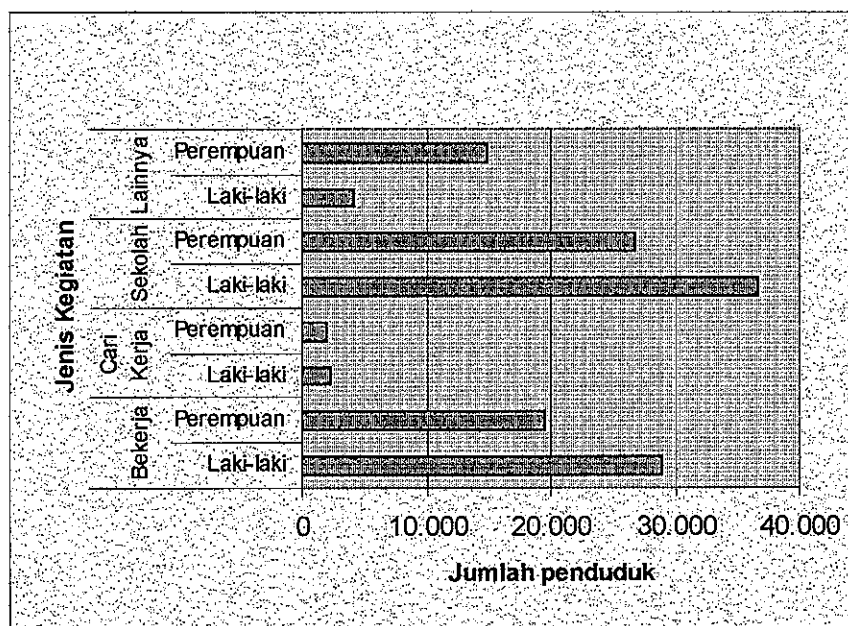
### 3.2.3.2. Kegiatan Penduduk Kecamatan Depok

Sedangkan untuk Kecamatan Depok, menurut kegiatannya sebagian besar penduduk Kecamatan Depok adalah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk bekerja. Masing-masing sebanyak 63.482 orang dan 48.397 orang.

**TABEL III.11**  
**JENIS KEGIATAN PENDUDUK KECAMATAN DEPOK**  
**TAHUN 2000**

Jenis Kegiatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bekerja	28.843	19.554	48.397
Cari kerja	2.327	2.026	4.353
Sekolah	36.655	26.827	63.482
Lainnya	4.080	14.856	18.936

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS



**GAMBAR 3.3.**  
**JENIS KEGIATAN PENDUDUK KECAMATAN DEPOK**  
**TAHUN 2000**

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS

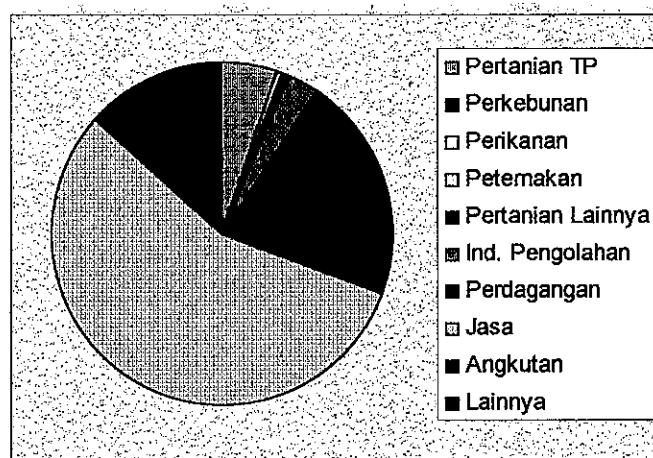
### 3.2.3.3. Ketenagakerjaan Kecamatan Depok

Mayoritas penduduk di Kecamatan Depok sebagaimana halnya Kota Yogyakarta bekerja dilapangan usaha jasa dan perdagangan. Data selengkapnya pekerjaan penduduk menurut lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel III.12 berikut:

**TABEL III.12**  
**JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**DI KECAMATAN DEPOK**  
**TAHUN 2000**

Lapangan Usaha	Jumlah
Pertanian Tanaman Pangan	2.499
Perkebunan	64
Perikanan	56
Peternakan	212
Pertanian lainnya	262
Industri Pengolahan	1.511
Perdagangan	10.281
Jasa	27.019
Angkutan	829
Lainnya	5.664

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS



**GAMBAR 3.4.**  
**LAPANGAN USAHA PENDUDUK BEKERJA**  
**DI KECAMATAN DEPOK**  
**TAHUN 2000**

Sumber: Sensus Penduduk 2000, BPS

Lapangan usaha penduduk bekerja di Kecamatan Depok tahun 2000 menunjukkan adanya pergeseran mata pencaharian penduduk, dimana pada periode 1990/1991 (RDTRK Depok, 1991) sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian/petani (21,15%) dan PNS/ABRI (28,17%). Pergeseran ini kemungkinan diakibatkan oleh adanya interaksi antara Kecamatan Depok dengan Kota Yogyakarta

### **3.2.4. Fasilitas Sosial Kecamatan Depok**

#### **3.2.4.1. Fasilitas Pendidikan Kecamatan Depok**

Menurut data BPS (2002), di Kecamatan Depok terdapat fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang berupa 56 unit taman kanak-kanak (TK), 62 unit sekolah dasar (SD) dan empat unit Madrasah Ibtida'iah (MI), 13 unit sekolah menengah pertama (SMP), empat unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), tujuh unit sekolah menengah umum (SMU), tiga unit sekolah menengah kejuruan (SMK) dan tiga unit Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan jumlah perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Depok adalah sebanyak 17 unit, yaitu:

- a. Universitas Gadjah Mada
- b. Universitas Negeri Yogyakarta
- c. IAIN Sunan Kalijaga
- d. ISI Yogyakarta
- e. AAU Yogyakarta
- f. IKIP Sanata Dharma
- g. UPN "Veteran" Yogyakarta
- h. Universitas Atmajaya
- i. Universitas Islam Indonesia
- j. IKIP Veteran
- k. STIPER

- l. Universitas Proklamasi
- m. STT NAS
- n. STIE YKPN Yogyakarta
- o. API
- p. AMTA Yogyakarta
- q. AKTK Yogyakarta

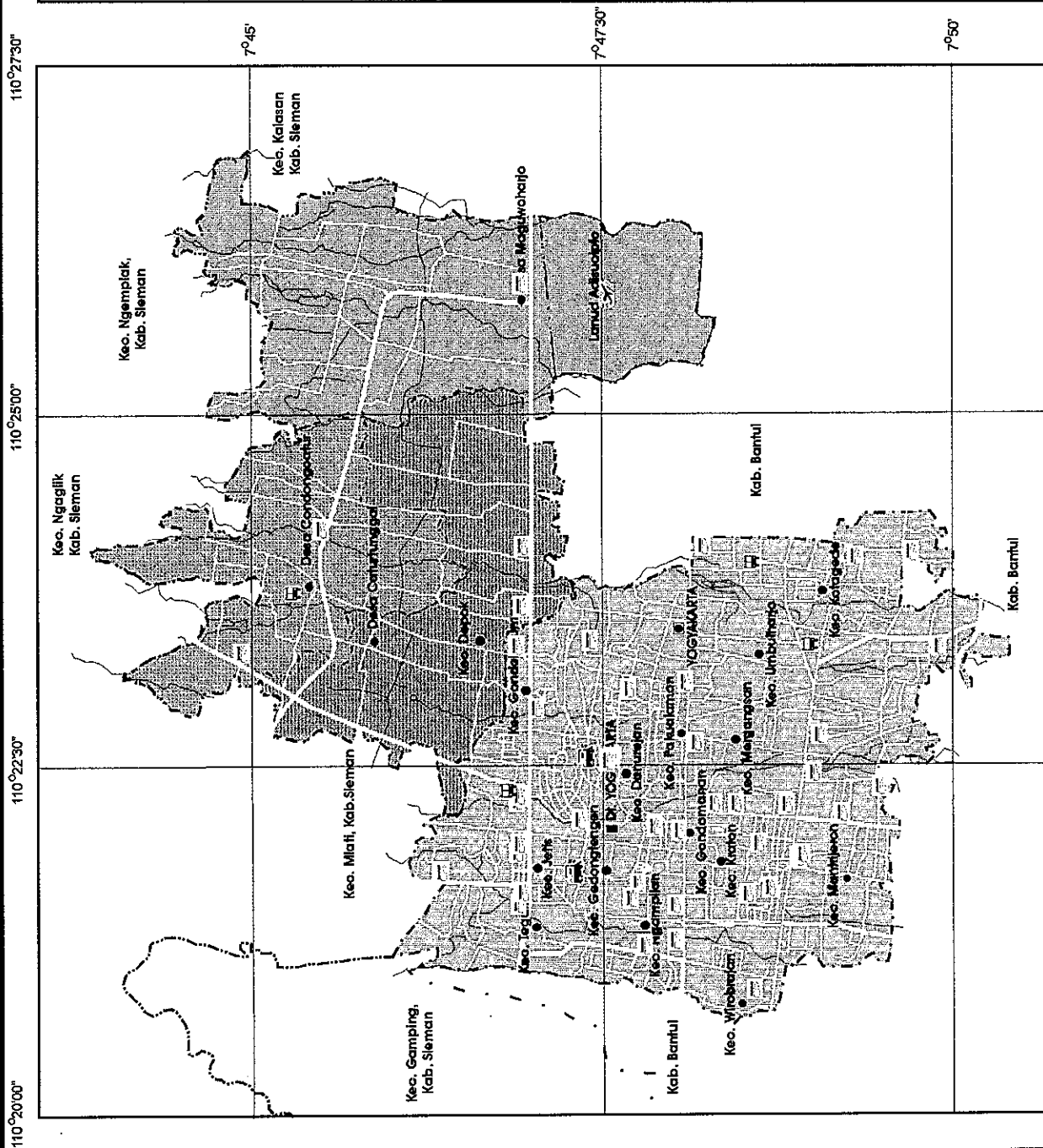
#### **3.2.4.2. Fasilitas Kesehatan Kecamatan Depok**

Menurut data BPS (2002), fasilitas kesehatan Kecamatan Depok yang tersedia secara lengkap ditunjukkan pada Tabel III.13 di bawah ini:

**TABEL III.13**  
**JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN DEPOK**  
**TAHUN 2002**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Puskesmas	2
2	Puskesmas Pembantu	4
3	Posyandu	69
4	Rumah Bersalin Swasta	3
5	Rumah Sakit Khusus	1
6	Rumah Sakit Swasta	1
7	Balai Pengobatan Swasta	33
8	Apotik	2
9	Puskesmas Keliling	1
10	Rumah sakit Pemerintah	1

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2002














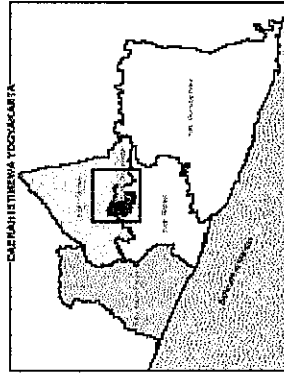
**MAGISTER**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS:  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

**Gambar 3.5**  
**PETA SEBARAN PASAR**

**LEGENDA:**

- |   |                              |   |          |
|---|------------------------------|---|----------|
|  | Jalan Negara                 |  | Bandara  |
|  | Jalan Popinsi                |  | Stasiun  |
|  | Jalan Kabupaten              |  | Sungai   |
|  | Batas Administrasi Kabupaten |  | Terminal |
|  | Batas Administrasi Kecamatan |  | Pasir    |
|  | Batas Administrasi Kelurahan |   |          |



Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA





MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS:

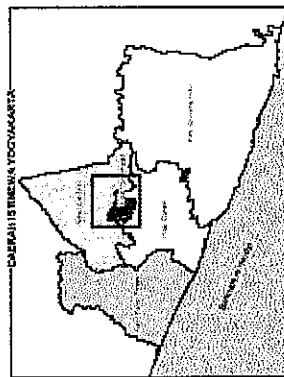
INTERAKSI KEMILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

Gambar 3.6

SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN

LEGENDA:

- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bandara
- Universitas
- Sekolah



0 700 1.750 m

1:70.000

Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA

110°27'30"

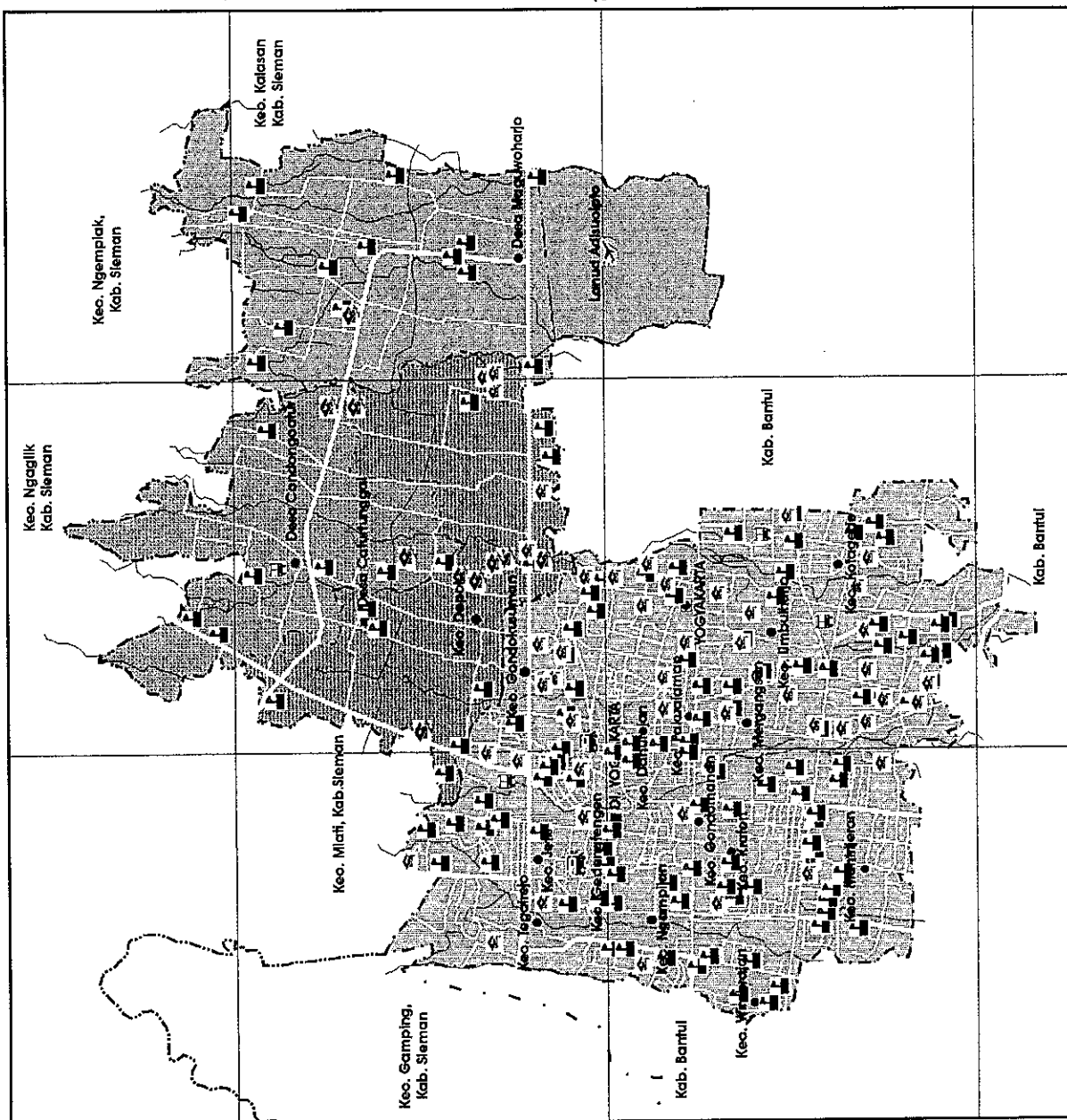
110°25'00"

110°22'30"

7°45'

7°47'30"

7°50'



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN INTERAKSI KEWILAYAHAN KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA**

#### **4.1. Analisis Keterkaitan Ekonomi**

Dalam analisis keterkaitan ekonomi, variabel yang diturunkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian adalah keterkaitan hubungan produksi, pola konsumsi dan berbelanja, pola aliran pendapatan, serta pola aliran modal. Satuan yang digunakan bukan satuan masing-masing komoditas, tetapi dikonversikan dalam satuan persen dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisa keterkaitan ekonomi secara keseluruhan mengingat analisa keterkaitan ekonomi yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan satuan yang berbeda-beda.

##### **4.1.1. Keterkaitan Produksi**

Keterkaitan produksi dilihat baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang. Keterkaitan ke depan adalah keterkaitan dari kegiatan produksi yang diteliti dengan kegiatan produksi lanjutan, sementara keterkaitan ke belakang berkaitan dengan kegiatan lain yang menyediakan bahan baku produksi.

##### **4.1.1.1. Keterkaitan Produksi Kegiatan Pertanian**

Dari hasil penelitian keterkaitan ke belakang produksi pertanian tanaman pangan menunjukkan bahwa besaran nilai benih dan pupuk yang dibeli petani per bulannya menunjukkan bahwa nilai benih dan pupuk yang didatangkan Kota Yogyakarta adalah nihil. Benih dan pupuk yang digunakan petani di Kecamatan Depok dipenuhi dari dalam wilayah Kecamatan Depok sendiri dan dari wilayah Kecamatan lain di Kabupaten Sleman yang lokasinya berbatasan. Nilai benih yang didatangkan tiap bulannya dari dalam wilayah

Kecamatan Depok adalah sebesar Rp.310.500,00 atau 56% dari total benih dan pupuk yang didapatkan responden (Rp.555.000,00). Sedangkan yang didapatkan dari Kecamatan lain di Kabupaten Sleman adalah sebesar 44% (Rp.244.500,00).

**TABEL IV.1**  
**NILAI BELI BENIH DAN PUPUK**  
**BERDASAR LOKASI PEMBELIAN**

Asal Responden	Nilai (Rupiah) dan Persentase (%) Pembelian Benih dan Pupuk			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kecamatan Lainnya	
Caturtunggal	163.000	0	0	163.000
	29%	0%	0%	29%
Maguwoharjo	0	0	244.500	244.500
	0%	0%	44%	44%
Condongcatur	147.500	0	0	147.500
	27%	0%	0%	27%
Jumlah	310.500	0	244.500	555.000
Persentase	56%	0%	44%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Bagi petani yang mendapatkan benih dan pupuk dari kecamatan lain di Kabupaten Sleman alasan yang mendasari adalah kelengkapan dan kualitas benih serta pupuk. Sehingga petani tersebut dapat sekaligus mendapatkan kebutuhan pertanian lainnya. Meskipun demikian, petani yang mendapatkan benih dan pupuk dari kecamatan lain mengalami hambatan berupa sulitnya memperoleh alat transportasi.

Hal yang berbeda ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan petani akan peralatan pertanian. Sebanyak 67% petani memperoleh peralatan tradisional pertanian dari wilayah lain di Kabupaten Sleman, sementara petani lainnya 33% mendapatkan peralatan tradisional pertanian dari wilayah setempat di Kecamatan Depok. Tidak ada responden yang mendapatkan peralatan tradisional pertanian dari Kota Yogyakarta.

Adapun hambatan dalam memperoleh peralatan pertanian dari luar wilayah Kecamatan Depok seperti halnya dalam memperoleh benih dan pupuk adalah sulitnya memperoleh alat transportasi. Kesulitan tersebut karena keterbatasan jumlah armada yang



beroperasi di wilayah tempat tinggal responden sehingga jarak antar armada cukup lama. Hal ini menyebabkan inefisiensi waktu bagi responden.

**TABEL IV.2.**  
**TEMPAT PEMBELIAN PERALATAN TRADISIONAL PERTANIAN**

Asal Responden	Tempat pembelian peralatan tradisional pertanian			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kecamatan Lainnya	
Caturtunggal	0	0	1	1
	0%	0%	33%	33%
Maguwoharjo	1	0	0	1
	33%	0%	0%	33%
Condongcatur	0	0	1	1
	0%	0%	33%	33%
Jumlah	1	0	2	3
Persentase	33%	0%	67%	100%

\* Catatan : termasuk dalam alat tradisional adalah cangkul, sabit, luku, garu, ketam

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Sementara untuk peralatan mesin pertanian Kota Yogyakarta lebih dominan dalam penyediaannya dibandingkan Kecamatan Depok. Sebanyak 67% petani mendapatkan peralatan pertanian dari mesin di Kota Yogyakarta. Lainnya mendapatkan peralatan pertanian dari mesin di wilayah setempat di Kecamatan Depok.

**TABEL IV.3.**  
**TEMPAT PEMBELIAN PERALATAN MESIN PERTANIAN**

Asal Responden	Tempat pembelian peralatan mesin pertanian			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kecamatan Lainnya	
Caturtunggal	0	1	0	1
	0%	33%	0%	33%
Maguwoharjo	0	1	0	1
	0%	33%	0%	33%
Condongcatur	1	0	0	1
	33%	0%	0%	33%
Jumlah	1	2	0	3
Persentase	33%	67%	0	100%

\* Catatan : termasuk dalam alat mesin pertanian adalah alat semprot insektisida, luku mesin, dll

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Dilihat dari keterkaitan ke depan, pertanian di Kecamatan Depok tidak memiliki keterkaitan produksi ke depan dengan wilayah di luar Kecamatan Depok. Hasil pertanian tanaman pangan yang dijual responden semuanya dijual di wilayah setempat sebagai bahan kegiatan perdagangan untuk konsumsi masyarakat. Menurut sepengetahuan responden tidak ada hasil pertanian responden yang dijual untuk kegiatan industri yang melakukan pengolahan lanjut atas hasil pertanian responden. Total penjualan hasil pertanian responden per bulan adalah sebesar 750 Kg atau sebesar Rp.1.725.000,00

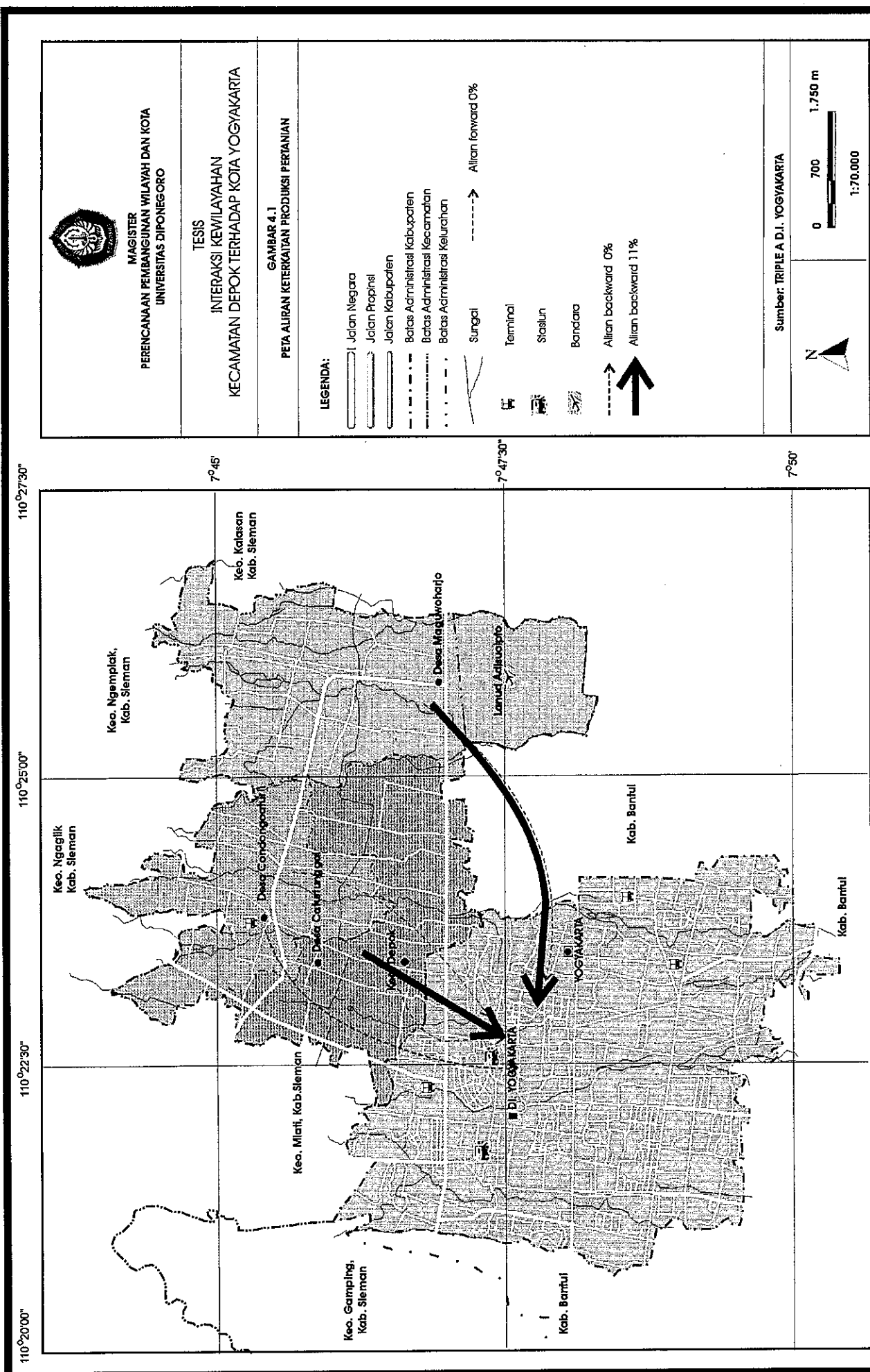
**TABEL IV.4**  
**NILAI JUAL HASIL PRODUKSI PERTANIAN**  
**BERDASAR LOKASI PENJUALAN**

Asal Responden	Nilai (Rupiah) dan Persentase (%) Penjualan Hasil Produksi Pertanian			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kecamatan Lainnya	
Caturtunggal	450.000	0	0	450.000
	26,09%	0%	0%	26,09%
Maguwoharjo	875.000	0	0	875.000
	50,72%	0%	0%	50,72%
Condongcatur	400.000	0	0	400.000
	23,19%	0%	0%	23,19%
Jumlah	1.725.000	0	0	1.725.000
Persentase	100%	0%	0%	100%

\* Hasil produksi pertanian: padi

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Responden petani tidak melakukan penjualan hasil pertanian tanaman pangannya ke Kota Yogyakarta karena belum ada permintaan dari Kota Yogyakarta, selain itu responden sendiri mengalami hambatan dalam mengembangkan dan memasarkan usahanya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan modal, keterbatasan sarana transportasi, dan terlalu banyaknya pesaing.



#### 4.1.1.2. Keterkaitan Produksi Kegiatan Industri

Sementara bagi kegiatan industri keterkaitan produksi ke belakang dapat ditunjukkan dari sumber bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi. Hasil penelitian terhadap sektor industri diwakili oleh industri konveksi dengan hasil produksi berupa baju casual bernuansa batik.. Hasil penelitian sebagaimana terlihat pada Tabel IV.5 menunjukkan bahwa industri di wilayah Kecamatan Depok lebih banyak mendatangkan bahan baku dari wilayah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan bahan baku yang didatangkan dari Kota Yogyakarta hanya untuk satu item saja dari bahan baku yang diperlukan.

Dilihat dari nilai bahan baku yang didatangkan, nilai bahan baku dari Kota Yogyakarta yang didatangkan responden setiap bulannya juga jauh dari nilai bahan baku yang didatangkan dari wilayah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nilai bahan baku yang didatangkan dari Kota Yogyakarta hanyalah sebesar Rp.500.000,00 atau 7,69% dari total nilai bahan baku (Rp.6.500.000,00).

**TABEL IV.5.**  
**TEMPAT PEMBELIAN BAHAN BAKU DAN PERALATAN INDUSTRI**

Jenis	Tempat pembelian bahan baku dan peralatan industri			
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lain di Kab. Sleman	Lainnya*
Rayon	-	-	-	•
Sutra	-	-	-	•
Katun	-	-	-	•
Obat-obatan batik	-	•	-	-
Mesin-mesin	-	-	-	•

\* Lainnya: Solo, Bandung, Jakarta

Sumber: Hasil analisis, 2004.

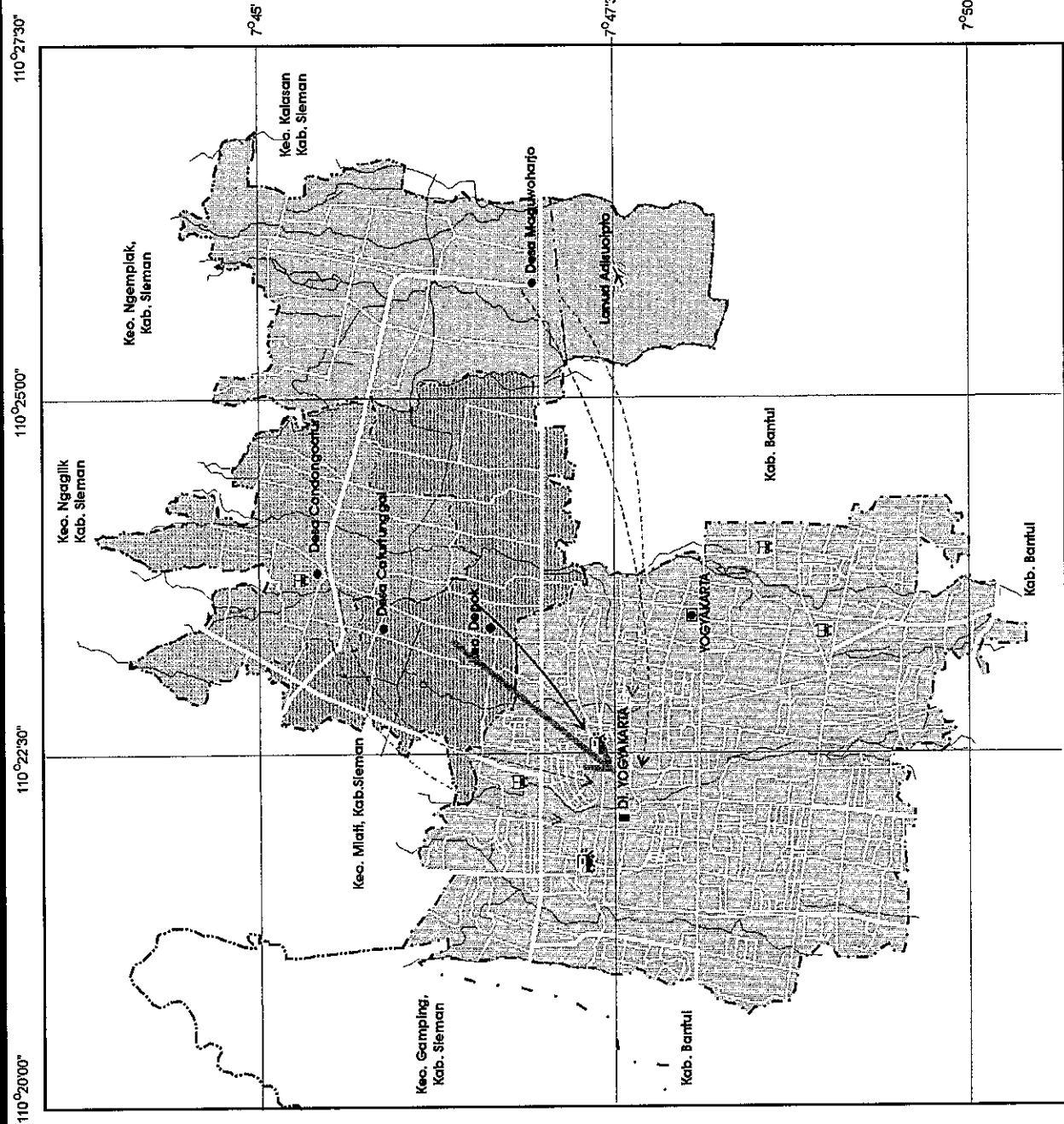
Dilihat dari keterkaitan produksi ke depan, kegiatan industri responden tidak memiliki keterkaitan produksi ke depan sebagai bahan baku industri. Sementara untuk keterkaitan dengan kegiatan perdagangan, hasil produksi responden tidak memiliki keterkaitan dengan Kota Yogyakarta, karena perdagangan di lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga dilakukan sendiri oleh responden. Adanya keterkaitan dengan kegiatan perdagangan hanya dengan pedagang-pedagang di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, namun jumlah dan nilai barang yang dijual jauh lebih kecil dari yang diperdagangkan sendiri oleh responden dimana permintaan dari pedagang di luar DIY bukanlah permintaan yang bersifat rutin. Sedangkan yang dijual kepada pembeli perorangan di Kota Yogyakarta hanya berkisar 5-10 potong perbulan dengan nilai penjualan antara Rp.300.000,00 - Rp.3.000.000,00. Secara keseluruhan, nilai hasil produksi yang mampu dijual responden per bulannya adalah antara Rp.12.000.000,00 – Rp.90.000.000,00.

**TABEL IV.6.**  
**NILAI JUAL HASIL INDUSTRI**  
**BERDASAR LOKASI PENJUALAN**

Asal Responden	Nilai (Rupiah) dan Persentase (%) Penjualan Hasil Produksi Industri			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Wilayah Lainnya*	
Caturtunggal	0	1.650.000	51.000.000	52.650.000
	0%	3,13%	96,87%	100%
Maguwoharjo	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%
Condongcatur	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%
Jumlah	0	1.650.000	51.000.000	52.650.000
Persentase	0%	3,13%	96,87%	100%

\* Wilayah Lainnya: Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Australia

Sumber: Hasil analisis, 2004.



MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

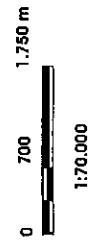
TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

GAMBAR 4.2  
PETA ALURAN KETERKATAN PRODUKSI INDUSTRI

LEGENDA:

- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bandara
- Aliran backward 0%
- Aliran backward 7,69%
- Aliran forward 0%
- Aliran forward 3,13%

Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA



#### 4.1.1.3. Keterkaitan Produksi Kegiatan Perdagangan

Penelitian terhadap keterkaitan ke belakang kegiatan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan lokasi pembelian barang-barang yang akan diperdagangkan. Adapun jenis-jenis barang dagangan yang didatangkan oleh responden adalah barang-barang dagangan yang berupa sandang, minyak tanah, minyak goreng, aqua, beras, gula pasir, rokok, sabun, odol, kedele, telur ayam ras, frame, lensa, kayu. Hasil penelitian kegiatan perdagangan menunjukkan bahwa dari nilai barang dagangan yang didatangkan responden, Kota Yogyakarta memberikan nilai terbesar dibanding lokasi lainnya, yaitu sebesar Rp.127.312.075,00 atau 41% dari total nilai barang dagangan yang didatangkan responden (Rp.314.027.075,00). Data selengkapnya ditunjukkan pada Tabel IV.7.

**TABEL IV.7.**  
**NILAI BELI BARANG DAGANGAN**  
**BERDASAR LOKASI PEMBELIAN**

Asal Responden	Nilai (Rupiah) Dan Persentase (%) Pembelian Barang Dagangan				Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya	
Caturtunggal	5.240.000	2.000.000	30.935.000	29.910.000	68.085.000
	2%	1%	10%	10%	22%
Maguwoharjo	12.480.000	12.600.000	0	7.850.000	32.930.000
	4%	4%	0%	2%	10%
Condongcatur	17.000.000	112.712.075	71.800.000	11.500.000	213.012.075
	5%	36%	23%	4%	68%
Jumlah	34.720.000	127.312.075	102.735.000	49.260.000	314.027.075
Persentase	11%	41%	33%	16%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Hambatan yang dirasakan responden pedagang dalam mendatangkan barang dagangan dari luar Kecamatan Depok adalah dalam hal transportasi, yaitu sulitnya memperoleh alat transportasi. Sedangkan dalam mendatangkan barang dagangan dari Kota Yogyakarta sebagian responden mendapatkan kemudahan dari adanya distributor yang mendatangi responden.

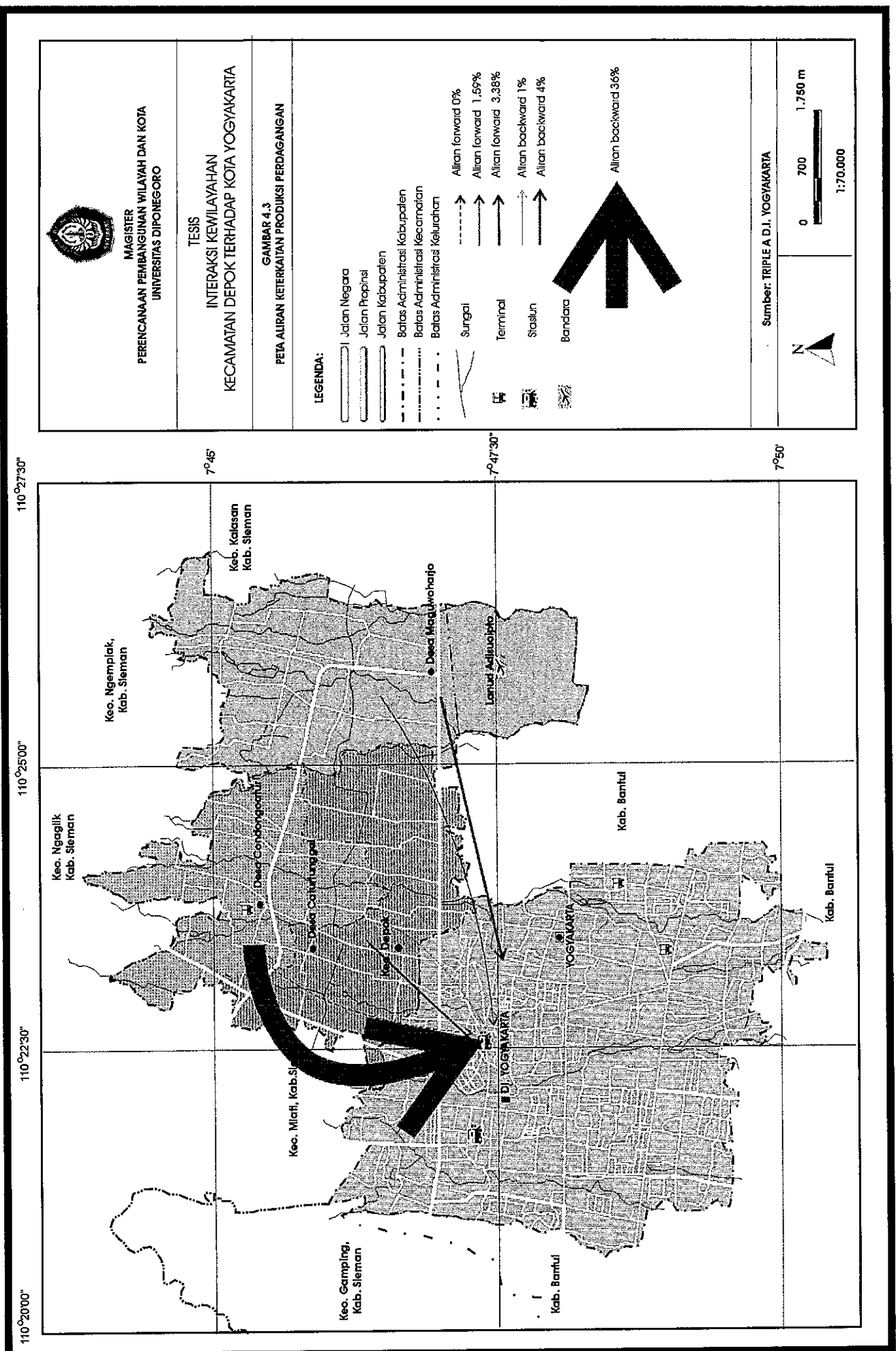
Bila dilihat dari tujuan pemasarannya, total nilai penjualan barang dagangan yang dipasarkan di wilayah Kecamatan Depok adalah Rp.433.172.825,00 atau sebesar 94,12% dari total nilai penjualan barang dagangan responden (Rp.460.242.825,00). Sedangkan nilai penjualan barang dagangan yang dipasarkan ke wilayah Kota Yogyakarta dan kecamatan lainnya dalam Kabupaten Sleman masing-masing adalah Rp.22.850.000,00 (4,96%) dan Rp.4.220.000,00 (0,92%). Kecilnya nilai barang dagangan yang dijual di luar Kecamatan Depok adalah karena para responden menghadapi terlalu banyaknya pesaing dan kurangnya permodalan untuk memperkuat usahanya.

**TABEL IV.8.**  
**NILAI JUAL BARANG DAGANGAN**  
**BERDASAR LOKASI PENJUALAN**

Asal Responden	Nilai (Rupiah) Dan Persentase (%) Penjualan Barang Dagangan			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	
Caturtunggal	93.800.000	15.550.000	0	109.350.000
	20,38%	3,38%	0%	23,76%
Maguwoharjo	28.000.000	7.300.000	4.220.000	39.520.000
	6,08%	1,59%	0,92%	8,59%
Condongcatur	311.372.825	0	0	311.372.825
	67,65%	0%	0%	67,65%
Jumlah	433.172.825	22.850.000	4.220.000	460.242.825
Persentase	94,12%	4,96%	0,92%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2004.





#### 4.1.1.4. Keterkaitan Produksi Kegiatan Jasa

Pada kegiatan jasa, kegiatan jasa yang diamati adalah jasa sewa bangunan dan tanah, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa hiburan dan rekreasi, jasa perkantoran, dan jasa perorangan. Hasil analisa keterkaitan ke belakang kegiatan produksi jasa ditunjukkan dari lokasi asal bahan baku pendukung jasa. Hasil penelitian produksi jasa di Kecamatan Depok menunjukkan bahwa sebagian besar bahan pendukung kegiatan jasa yang dilakukan oleh responden didatangkan dari Kota Yogyakarta. Hasil selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

**TABEL IV.9.**  
**TEMPAT PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG KEGIATAN JASA**

Asal Responden	Tempat Pembelian Bahan Pendukung Kegiatan Jasa			Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Lainnya	
Caturtunggal	13	20	1	34
	16,05%	24,69%	1,23%	41,98%
Maguwoharjo	0	18	8	26
	0	22,22%	9,88%	32,10%
Condongcatur	3	9	9	21
	3,70%	11,11%	11,11%	25,93%
Jumlah	16	47	18	81
Persentase	19,75%	58,02%	22,22%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Menurut responden, dipilihnya Kota Yogyakarta untuk mendatangkan bahan pendukung kegiatan jasa adalah karena di Kota Yogyakarta bahan pendukung jasa dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Selain itu, di Kota Yogyakarta terdapat lebih banyak pilihan, lebih banyak stok, kualitas lebih bagus, serta lebih mengikuti perkembangan model-model terbaru. Beberapa responden bahkan mengalami kemudahan dalam mendapatkan bahan pendukung jasa dari Kota Yogyakarta dimana responden tidak perlu pergi ke Kota Yogyakarta melainkan distributor dari Kota Yogyakarta yang

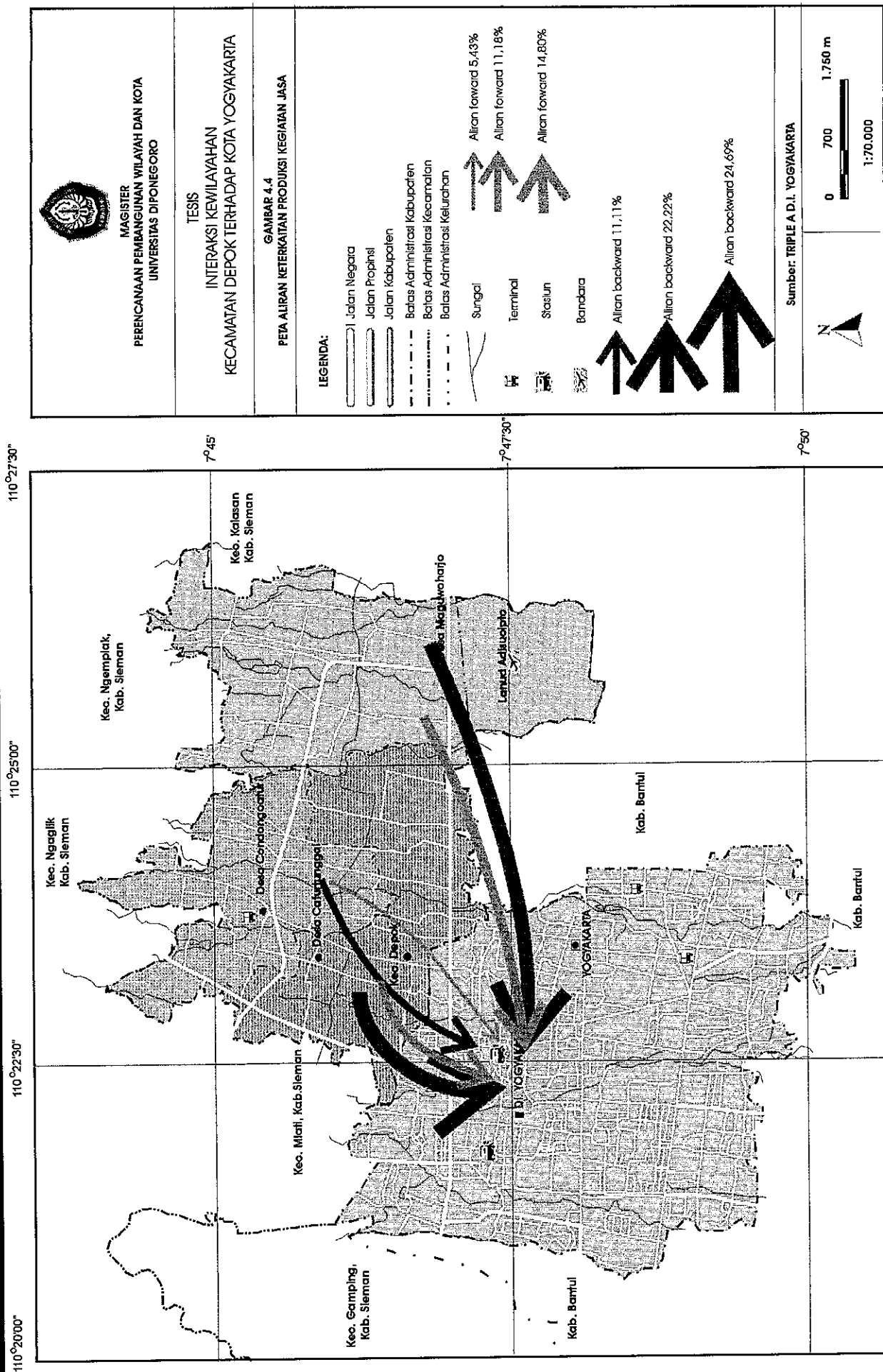
mendatangi responden. Dengan adanya kemudahan tersebut responden dapat menghemat waktu dan biaya transportasi.

Bila dilihat dari nilai jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen jasa, maka wilayah yang paling banyak memanfaatkan jasa dari Kecamatan Depok adalah dari dalam wilayah Kecamatan Depok sendiri (Rp.104.690.000,00 atau 51,64%). Pengguna jasa terbesar kedua adalah dari Kota Yogyakarta (Rp.63.660.000,00 atau 31,40%).

**TABEL IV.10.**  
**NILAI JASA YANG DIMANFAATKAN KONSUMEN**  
**BERDASAR LOKASI KONSUMEN YANG MEMANFAATKAN**

Asal Responden	Nilai (Rupiah) dan Persentase (%) Pemanfaatan Jasa				Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya	
Caturtunggal	30.940.000	22.660.000	100.000	27.800.000	81.500.000
	15,26%	11,18%	0,05%	13,71%	40,20%
Maguwoharjo	31.750.000	30.000.000	0	0	61.750.000
	15,66%	14,80%	0%	0%	30,46%
Condongcatur	42.000.000	11.000.000	0	6.500.000	59.500.000
	20,72%	5,43%	0%	3,21%	29,35%
Jumlah	104.690.000	63.660.000	100.000	34.300.000	202.750.000
Persentase	51,64%	31,40%	0,05%	16,92%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2004



#### 4.1.1.5. Keterkaitan Produksi Kegiatan Lain-lain

Dalam sensus penduduk, pekerjaan penduduk yang masuk kategori lain-lain adalah pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan listrik, gas, dan air bersih. Kegiatan listrik meliputi pembangkitan atau penyaluran tenaga listrik dengan tujuan menjual, kegiatan air bersih meliputi pembersihan, pemurnian, dan proses kimiawi lain untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusiannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta. Sedangkan kegiatan bangunan meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan semua jenis konstruksi. Karena kegiatan listrik dan air bersih biasanya dilakukan oleh Pemerintah, maka dalam penelitian ini kegiatan lain-lain hanya diwakili oleh sektor bangunan.

Hasil penelitian kegiatan lain-lain yang diwakili oleh sektor bangunan menunjukkan bahwa peran Kota Yogyakarta sangat kecil. Sektor kegiatan lain-lain lebih banyak didukung oleh Kecamatan Depok dan kecamatan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

**TABEL IV.11.**  
**TEMPAT PEMBELIAN BAHAN BAKU SEKTOR BANGUNAN**

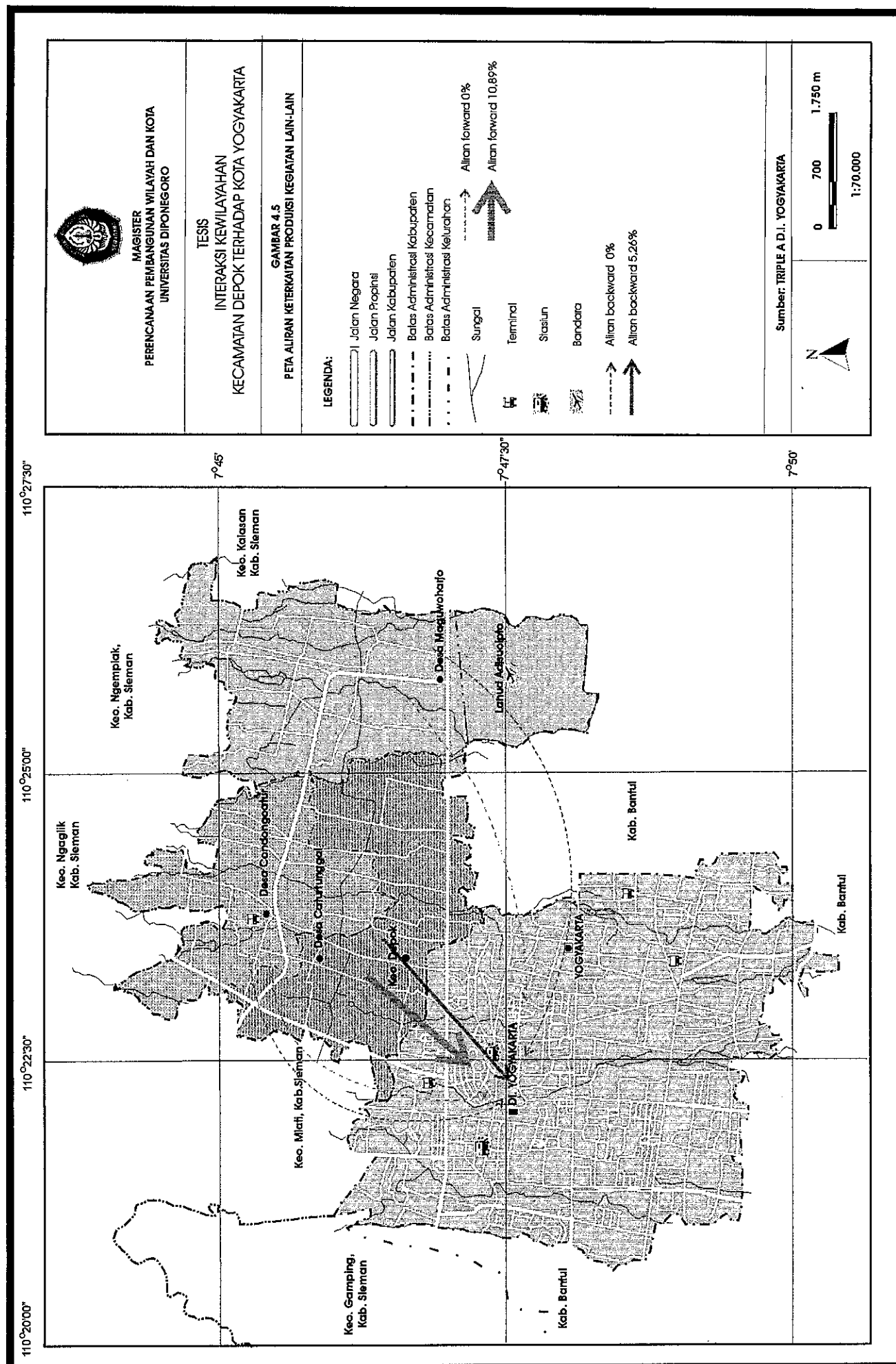
Asal Responden	Tempat Pembelian Bahan Baku Sektor Bangunan					Total
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lain di Kab. Sleman	Kab.lain di DIY	Luar DIY	
Caturtunggal	4	1	4	0	0	9
	21,05%	5,26%	21,05%	0	0	47,37%
Maguwoharjo	1	0	3	2	2	8
	5,26%	0	15,79%	10,53%	10,53%	42,11%
Condongcatur	2	0	0	0	0	2
	10,53%	0	0	0	0	10,53%
Jumlah	7	1	7	2	2	19
Persentase	36,84%	5,26%	36,84%	10,53%	10,53%	100

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Alasan didatangkannya bahan baku dari luar Kecamatan Depok adalah karena harga bahan baku yang lebih murah bila didatangkan dari luar, serta banyaknya stok yang

tersedia. Meskipun demikian, responden pada umumnya mengalami hambatan berupa kesulitan memperoleh alat transportasi untuk mendatangkan bahan baku tersebut.

Sedangkan dari sisi konsumen yang memanfaatkan kegiatan sektor bangunan di Kecamatan Depok sebagian besar adalah konsumen dari dalam wilayah Kecamatan Depok sendiri. Dari keseluruhan responden, hanya 33% responden yang menyatakan bahwa selain melayani Kecamatan Depok juga melayani wilayah lainnya, dengan perincian 16,67% selain melayani Kecamatan Depok juga melayani Kota Yogyakarta, dan 16,67% juga melayani Kabupaten Bantul. Akan tetapi permintaan dari luar wilayah Kecamatan Depok tersebut sangat jarang diperoleh/tidak rutin. Kalaupun ada permintaan dari luar wilayah Kecamatan Depok, responden tidak selalu dapat memenuhi permintaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tenaga pada responden, dimana biasanya untuk menghasilkan satu bangunan responden memerlukan waktu sebulan penuh. Oleh karena itu responden seringkali mengalami kesulitan untuk sekaligus mengerjakan permintaan lainnya.



#### 4.1.2. Aliran Pendapatan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden mendapatkan penghasilannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya di Kecamatan Depok. Tidak ada satupun responden mendapatkan penghasilannya dari kiriman yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Depok, termasuk didalamnya Kota Yogyakarta. Tidak ada responden yang mendapatkan kiriman uang secara rutin dari Kota Yogyakarta baik dari transfer maupun dari *remittance*.

Hal yang sama juga ditunjukkan pada pemanfaatan pendapatan yang diperoleh responden, dimana responden tidak ada yang setiap bulannya secara rutin mengeluarkan sejumlah uang ke Kota Yogyakarta.

Total penghasilan per bulan yang didapatkan responden dari dalam wilayah Kecamatan Depok adalah sebesar Rp.177.575.000,00, masing-masing dari penghasilan pokok sebesar Rp.157.350.000,00 dan dari penghasilan sampingan sebesar Rp.20.225.000,00. Sebagian besar penghasilan sampingan responden diperoleh dari kegiatan jasa, selebihnya diperoleh dari kegiatan perdagangan. Aliran penghasilan responden ditunjukkan pada tabel dan gambar di bawah ini

**TABEL IV.12.**  
**ALIRAN PENGHASILAN**

Asal Responden	Aliran Masuk Penghasilan				Total Penghasilan
	Penghasilan pokok	Penghasilan sampingan	Transfer	Remittance	
Caturtunggal	64.725.000	12.425.000	0	0	77.150.000
	36%	7%	0%	0%	43%
Maguwoharjo	38.100.000	1.400.000	0	0	39.500.000
	21%	1%	0%	0%	22%
Condongcatur	54.525.000	6.400.000	0	0	60.925.000
	31%	4%	0%	0%	34%
Jumlah	157.350.000	20.225.000	0	0	177.575.000
Persentase	89%	11%	0%	0%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

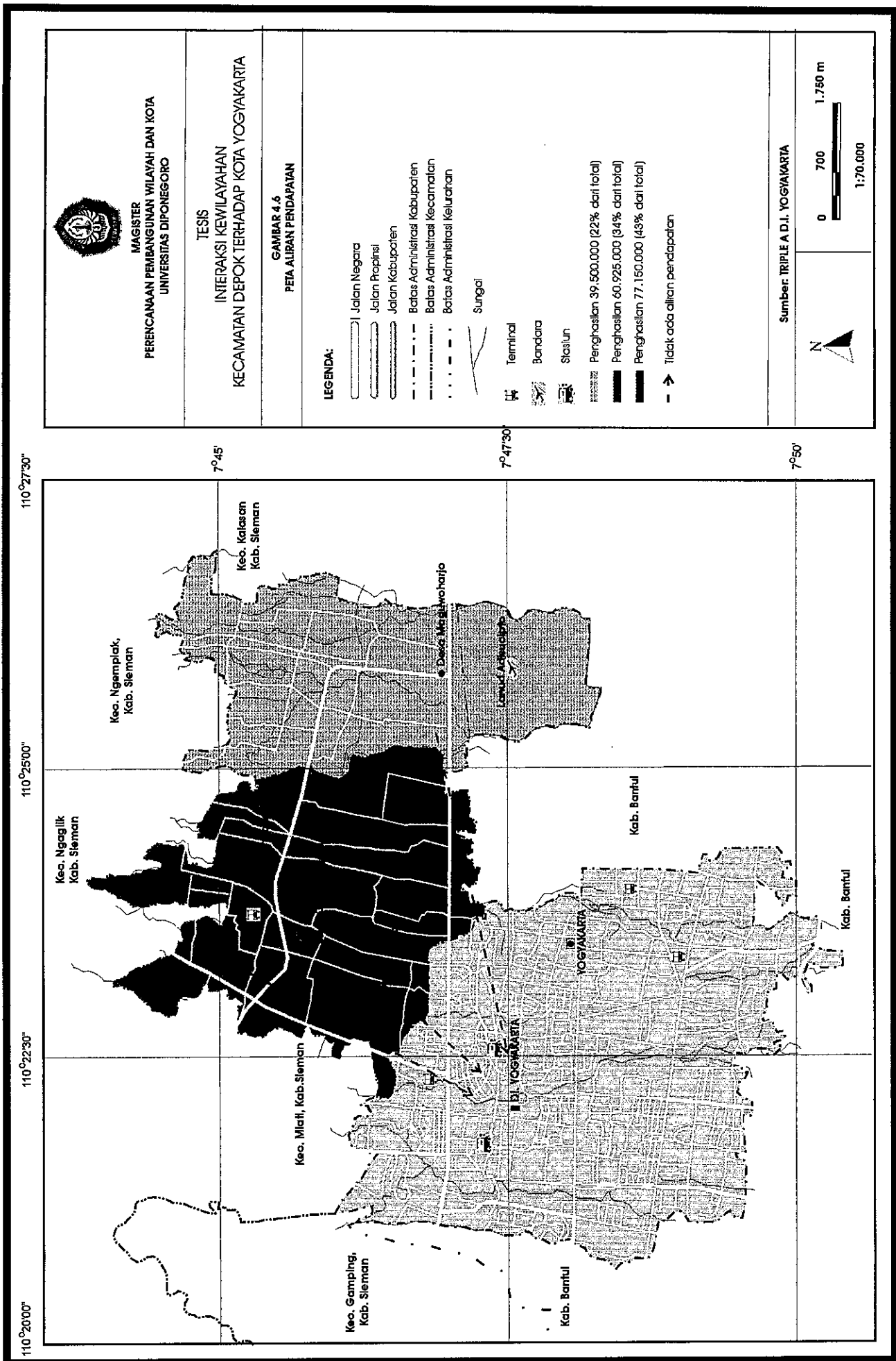


Tidak adanya aliran masuk maupun aliran keluar penghasilan secara rutin mungkin karena Kecamatan Depok telah tumbuh menjadi wilayah yang maju, sehingga dengan melakukan kegiatan usaha yang orientasinya lokal sekalipun penduduk bisa memperoleh pasar yang secara ekonomi menguntungkan. Begitupula tidak adanya responden yang secara rutin mengeluarkan pendapatannya ke Kota Yogyakarta dimungkinkan karena perkembangan di Kecamatan Depok telah menjadikan Kecamatan Depok cukup mampu menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan penduduk, sehingga penduduk tidak perlu memanfaatkan sarana-prasarana di Kota Yogyakarta, yang berarti tidak ada aliran penghasilan yang dikeluarkan secara rutin ke Kota Yogyakarta.

#### **4.1.3. Aliran Modal**

Modal merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha. Tak jarang kegiatan usaha yang dijalankan harus menghadapi masalah kekurangan modal guna memenuhi tuntutan perkembangan usaha. Tabungan merupakan salah satu cadangan dana yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Tabungan masyarakat dapat ditawarkan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk kredit untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk menambah permodalan usaha. Oleh karena itu, untuk melihat aliran modal disini digunakan parameter tabungan masyarakat sebagai cadangan modal yang dapat dimanfaatkan.

Menurut Sukirno (1976; 57), kemampuan bank perniagaan untuk memberikan pinjaman sangat tergantung pada tabungan masyarakat. Semakin besar tingkat tabungan masyarakat makin tinggi pula kemampuan bank perniagaan untuk menyediakan modal. Oleh karena itu akan sangat menguntungkan bagi suatu wilayah bila akumulasi modal yang besar dapat terjadi di wilayahnya, karena akan memberikan kemudahan bagi penduduknya untuk memperoleh cadangan modal.



Dari hasil penelitian tentang penghimpunan modal yang berupa tabungan, 63 % (34 tanggapan) tanggapan responden menyatakan memilih Kecamatan Depok baik pada lembaga keuangan (perbankan) maupun pada koperasi simpan pinjam yang berkembang di masyarakat. Sementara yang menyatakan menabung di Kota Yogyakarta sebanyak 37%.

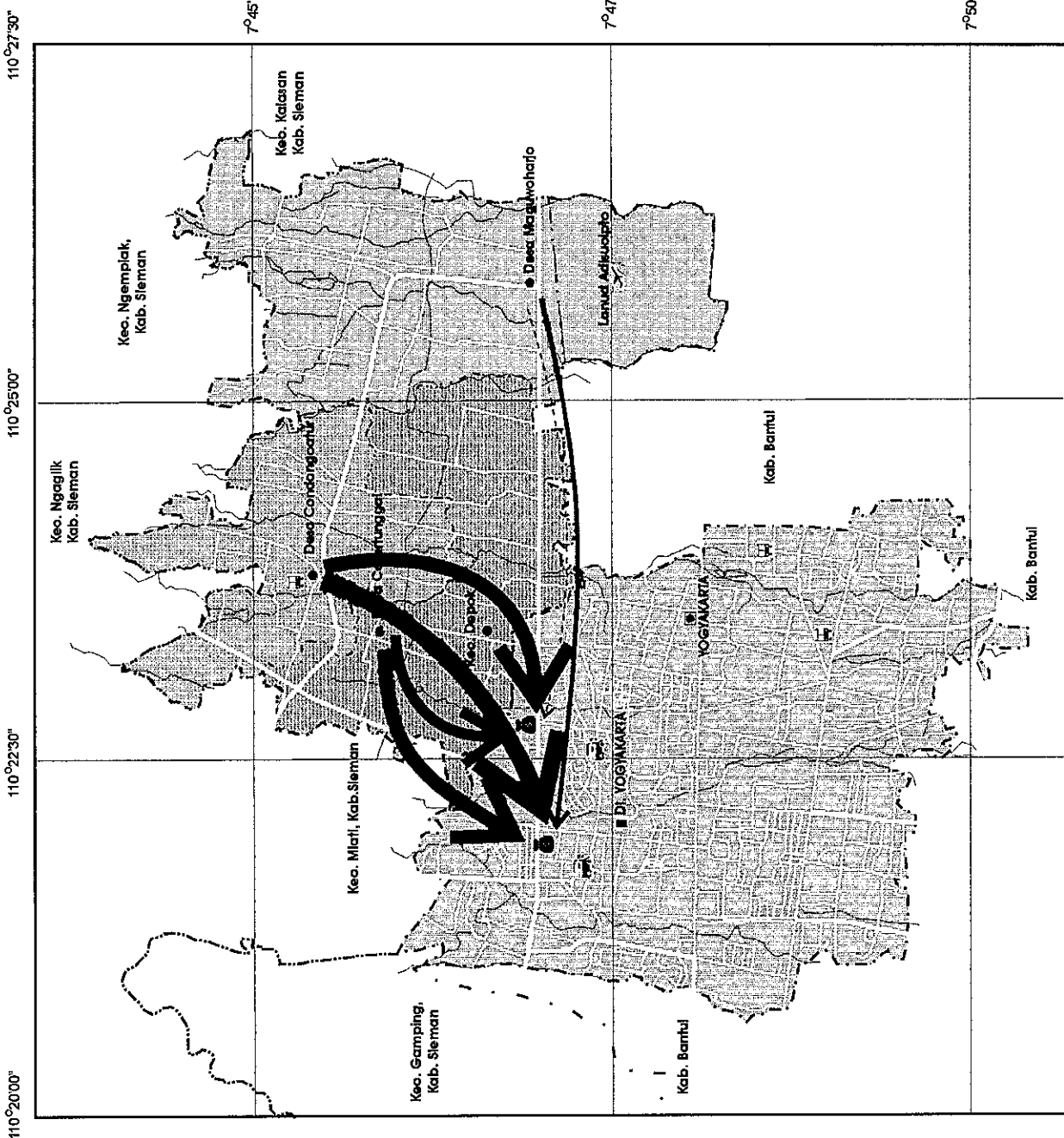
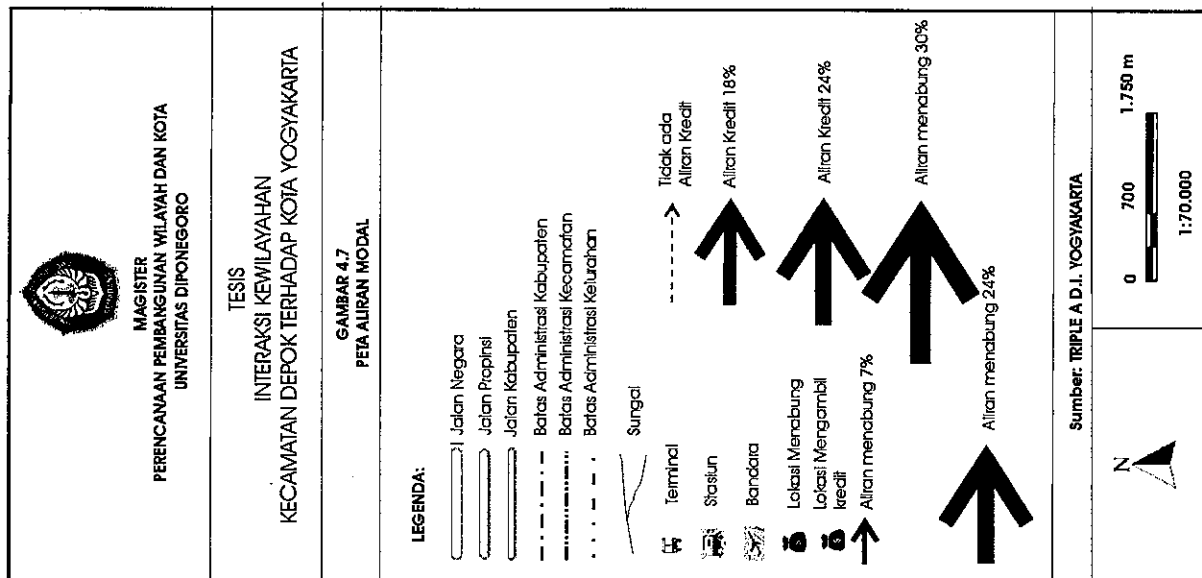
Adapun bila dilihat dari nilai tabungan, ternyata dari total Rp.44.600.000,00 tabungan responden, sebanyak Rp.26.800.000,00 (60%) ditabung di Kota Yogyakarta, sementara Rp.17.800.000,00 (40%) ditabung di Kecamatan Depok.

Sementara dari sisi pemanfaatan kredit ternyata hanya 12% responden yang memanfaatkan kredit. Adapun lembaga keuangan yang melayani kredit mereka sebagian besar dari Kecamatan Depok sendiri (67%) sementara sisanya (33%) dari Kota Yogyakarta. Hasil yang sama juga diperlihatkan dari nilai kredit, dimana sebagian besar kredit didapatkan dari Kecamatan Depok, yaitu sebesar Rp.2.791.667,00 per bulan atau 59% dari total nilai kredit (Rp.4.751.667,00), sementara nilai kredit yang diperoleh dari Kota Yogyakarta sebesar Rp.1.960.000,00 atau 41% dari total nilai kredit.

**TABEL IV.13.**  
**ALIRAN MODAL**

Asal Responden	Tabungan		Total	Kredit	
	Kecamatan Depok	Kota Yogyakarta		Kecamatan Depok	Kota Yogyakarta
Caturtunggal	6.175.000	10.600.000	16.775.000	-	835.000
	14%	24%	38%	0%	18%
Maguwoharjo	4.525.000	2.900.000	7.425.000	1.041.667	-
	10%	7%	17%	22%	0%
Condongcatur	7.100.000	13.300.000	20.400.000	1.750.000	1.125.000
	16%	30%	46%	37%	24%
Jumlah	17.800.000	26.800.000	44.600.000	2.791.667	1.960.000
Persentase	40%	60%	100%	59%	41%

Sumber: Hasil analisis, 2004.



#### 4.1.4. Pola Belanja Konsumen

Keterkaitan ekonomi juga dapat dilihat dari kebiasaan berbelanja. Kebiasaan berbelanja ini dibagi menjadi kebiasaan belanja barang-barang tingkat rendah dan barang-barang tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan barang-barang tingkat rendah dan tingkat tinggi mengacu pada konsep Christaller (Daldjoeni, 2003; 153). Barang tingkat rendah adalah barang yang berthreshold kecil dan memiliki range terbatas. Sedangkan barang tingkat tinggi adalah barang yang berthreshold besar dan memiliki range besar. Adapun yang dimaksud dengan threshold suatu barang adalah minimum penduduk yang diperlukan untuk kelancaran atau berkesinambungnya suplai barang. Sedangkan yang dimaksud dengan range adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya.

Termasuk didalam kategori barang-barang tingkat rendah adalah barang kebutuhan sehari-hari. Barang-barang kebutuhan sehari-hari dalam hal ini adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara rutin sebagai bahan pokok, seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, minyak tanah, dan lain-lain yang termasuk dalam komponen sembako. Selain itu, barang lain yang termasuk dalam kategori barang-barang tingkat rendah adalah barang-barang kelontong yang berupa sabun, odol, shampoo.

Hasil penelitian tentang kebiasaan berbelanja kebutuhan sehari-hari menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63,77%) memiliki kebiasaan berbelanja kebutuhan sehari-hari di wilayah setempat, yaitu di Kecamatan Depok. Secara lengkap kebiasaan responden berbelanja kebutuhan sehari-hari ditunjukkan pada tabel IV.14.

**TABEL IV.14.**  
**LOKASI BELANJA KEBUTUHAN SEHARI-HARI**

Asal Responden	Tempat Belanja Kebutuhan Sehari-hari			
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya
Caturtunggal	24	13	0	0
	34,78%	18,84%	0%	0%
Maguwoharjo	10	4	1	0
	14,49%	5,80%	1,45%	0%
Condongcatur	10	5	2	0
	14,49%	7,25%	2,90%	0%
Jumlah	44	22	3	0
Persentase	63,77%	31,88%	4,15%	0%

Sumber: Hasil analisis, 2004

Sementara bila dilihat dari frekuensi kunjungan belanja kebutuhan sehari-hari ke Kota Yogyakarta, mayoritas responden (54%) menyatakan sangat jarang berbelanja ke Kota Yogyakarta. Berikut adalah hasil selengkapnya:

**TABEL IV.15**  
**FREKUENSI BELANJA KEBUTUHAN SEHARI-HARI**  
**KE KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Belanja Kebutuhan Sehari-hari			
	Sehari sekali	Seminggu sekali	Sebulan sekali	Sangat Jarang
Caturtunggal	1	8	4	12
	2%	16%	8%	24%
Maguwoharjo	1	2	1	6
	2%	4%	2%	12%
Condongcatur	0	3	3	9
	0%	6%	6%	18%
Jumlah	2	13	8	27
Persentase	4%	26%	16%	54%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Hasil penelitian kebiasaan responden berbelanja kebutuhan akan barang kelontong menunjukkan bahwa sebagian besar responden (53,24%) memiliki kebiasaan berbelanja barang kelontong di wilayah setempat, yaitu di Kecamatan Depok. Secara lengkap kebiasaan responden berbelanja barang kelontong ditunjukkan pada tabel IV.16.

**TABEL IV.16.**  
**LOKASI BELANJA BARANG KELONTONG**

Asal Responden	Tempat Belanja Barang Kelontong			
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya
Caturtunggal	21	18	0	0
	27,27%	23,38%	0%	0%
Maguwoharjo	10	9	0	0
	13%	11,68%	0%	0%
Condongcatur	10	8	1	0
	13%	10,39%	1,30%	0%
Jumlah	41	35	1	0
Persentase	53,25%	45,45%	1,30%	0%

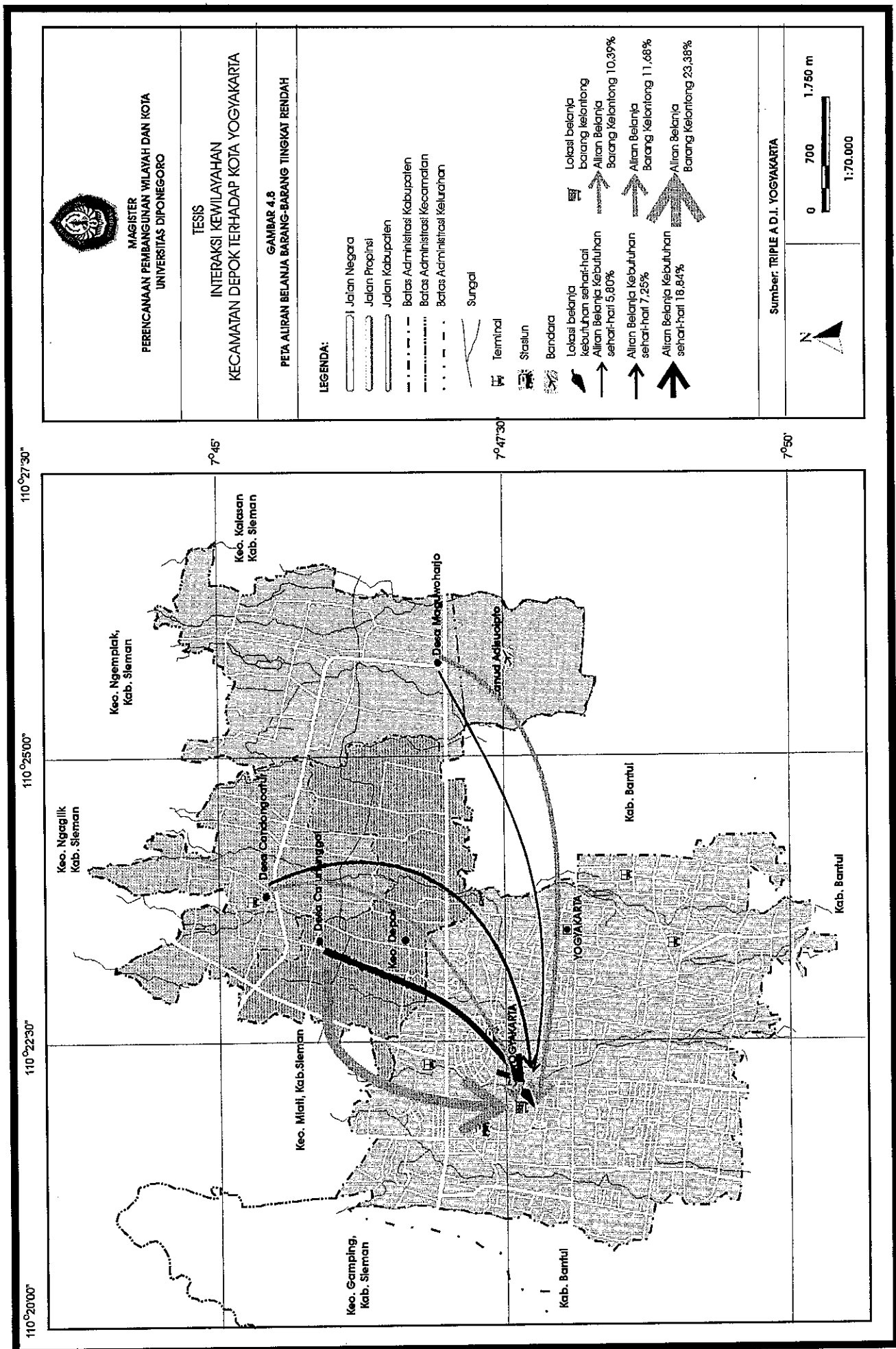
Sumber: Hasil analisis, 2004

Sementara bila dilihat dari frekuensi kunjungan belanja barang kelontong ke Kota Yogyakarta, mayoritas responden (54%) menyatakan berbelanja ke Kota Yogyakarta sebulan sekali. Berikut adalah hasil selengkapnya:

**TABEL IV.17.**  
**FREKUENSI BELANJA BARANG KELONTONG**  
**KE KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Belanja Barang Kelontong			
	Sehari sekali	Seminggu sekali	Sebulan sekali	Sangat Jarang
Caturtunggal	0	2	17	6
	0%	4%	34%	12%
Maguwoharjo	0	4	6	5
	0%	8%	12%	10%
Condongcatur	0	3	4	3
	0%	6%	8%	6%
Jumlah	0	9	27	14
Persentase	0%	18%	54%	28%

Sumber: Hasil analisis, 2004.





Barang-barang tingkat tinggi yang diteliti adalah sandang, bahan bangunan dan elektronik. Hasil penelitian kebiasaan responden berbelanja kebutuhan akan sandang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (88,46%) memiliki kebiasaan berbelanja sandang di Kota Yogyakarta. Secara lengkap kebiasaan responden berbelanja sandang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**TABEL IV.18.**  
**LOKASI BELANJA SANDANG**

Asal Responden	Tempat Belanja Sandang			
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya
Caturtunggal	2	23	0	2
	3,84%	44,23%	0%	3,84%
Maguwoharjo	1	11	1	0
	1,92%	21,15%	1,92%	0%
Condongcatur	0	12	0	0
	0%	23,07%	0%	0%
Jumlah	3	46	1	2
Persentase	5,76%	88,46%	1,92%	3,84%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Sementara bila dilihat dari frekuensi kunjungan belanja sandang ke Kota Yogyakarta, mayoritas responden (54%) menyatakan berbelanja ke Kota Yogyakarta setahun sekali. Berikut adalah hasil selengkapnya:

**TABEL IV.19.**  
**FREKUENSI BELANJA SANDANG**  
**KE KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Belanja Sandang				
	Sebulan sekali	3 bulan sekali	6 bulan sekali	Setahun sekali	Sangat Jarang
Caturtunggal	7	1	1	15	1
	14%	2%	2%	30%	2%
Maguwoharjo	2	3	3	3	2
	4%	6%	6%	6%	4%
Condongcatur	1	6	0	4	1
	2%	12%	0%	8%	2%
Jumlah	10	10	4	22	4
Persentase	20%	20%	8%	44%	8%

Sumber: Hasil analisis, 2004

Hasil penelitian atas bahan bangunan menunjukkan bahwa sebagian besar (68,75%) responden memiliki kebiasaan belanja bahan bangunan di wilayah setempat, yaitu di Kecamatan Depok. Secara lengkap kebiasaan responden berbelanja bahan bangunan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**TABEL IV.20.**  
**LOKASI BELANJA BAHAN BANGUNAN**

Asal Responden	Tempat Belanja Bahan Bangunan			
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya
Caturtunggal	24	8	0	0
	37,50%	12,50%	0%	0%
Maguwoharjo	10	5	2	0
	15,63%	7,81%	3,13%	0%
Condongcatur	10	4	1	0
	16%	6,25%	2%	0%
Jumlah	44	17	3	0
Persentase	68,75%	26,56%	4,69%	0%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

Sementara bila dilihat dari frekuensi kunjungan belanja bahan bangunan ke Kota Yogyakarta, mayoritas responden (68%) menyatakan sangat jarang (kurang dari sebulan sekali) berbelanja ke Kota Yogyakarta. Berikut adalah hasil selengkapnya:

**TABEL IV.21.**  
**FREKUENSI BELANJA BAHAN BANGUNAN**  
**KE KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Belanja Bahan Bangunan				
	Sebulan sekali	3 bulan sekali	6 bulan sekali	Setahun sekali	Sangat Jarang
Caturtunggal	1	0	1	4	19
	2%	0%	2%	8%	38%
Maguwoharjo	1	0	0	4	8
	2%	0%	0%	8%	16%
Condongcatur	1	1	1	2	7
	2%	2%	2%	4%	14%
Jumlah	3	1	2	10	34
Persentase	6%	2%	4%	20%	68%

Sumber: Hasil analisis, 2004

Hasil penelitian tentang kebiasaan belanja responden akan barang-barang elektronik menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih memilih berbelanja di Kota Yogyakarta. Persentase responden yang memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat berbelanja barang-barang elektronik adalah 88,46%. Hanya sedikit yang memilih berbelanja barang-barang elektronik di Kecamatan Depok, Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sleman dan di wilayah lainnya di luar Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Persentase masing-masing adalah sebesar 5,77%, 1,92% dan 3,85%. Berikut ini adalah hasil selengkapnya:

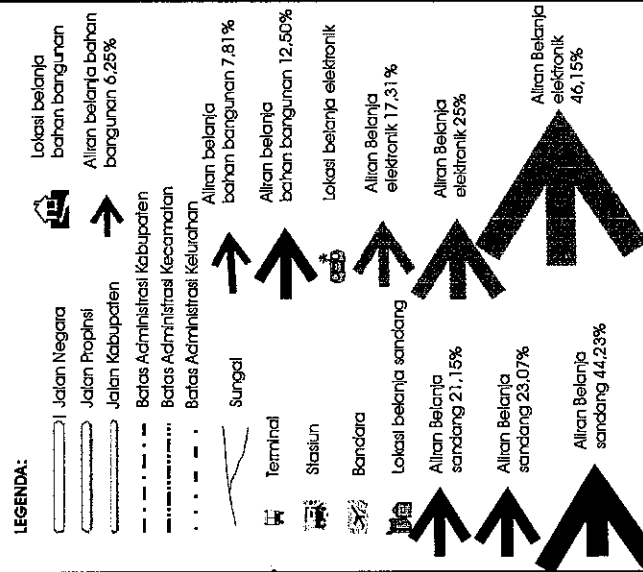
**TABEL IV.22.**  
**LOKASI BELANJA BARANG ELEKTRONIK**

Asal Responden	Tempat Belanja Barang Elektronik			
	Kec. Depok	Kota Yogyakarta	Kec. Lainnya di Kab. Sleman	Lainnya
Caturtunggal	1	24	0	1
	1,92%	46,15%	0%	1,92%
Maguwoharjo	0	13	1	0
	0%	25,00%	1,92%	0%
Condongcatur	2	9	0	1
	3,85%	17,31%	0%	1,92%
Jumlah	3	46	1	2
Persentase	5,77%	88,46%	1,92%	3,85%

Sumber: Hasil analisis, 2004.

TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

**GAMBAR 4.9**  
**PETA ALIRAN BELANJA BARANG-BARANG TINGKAT TINGGI**

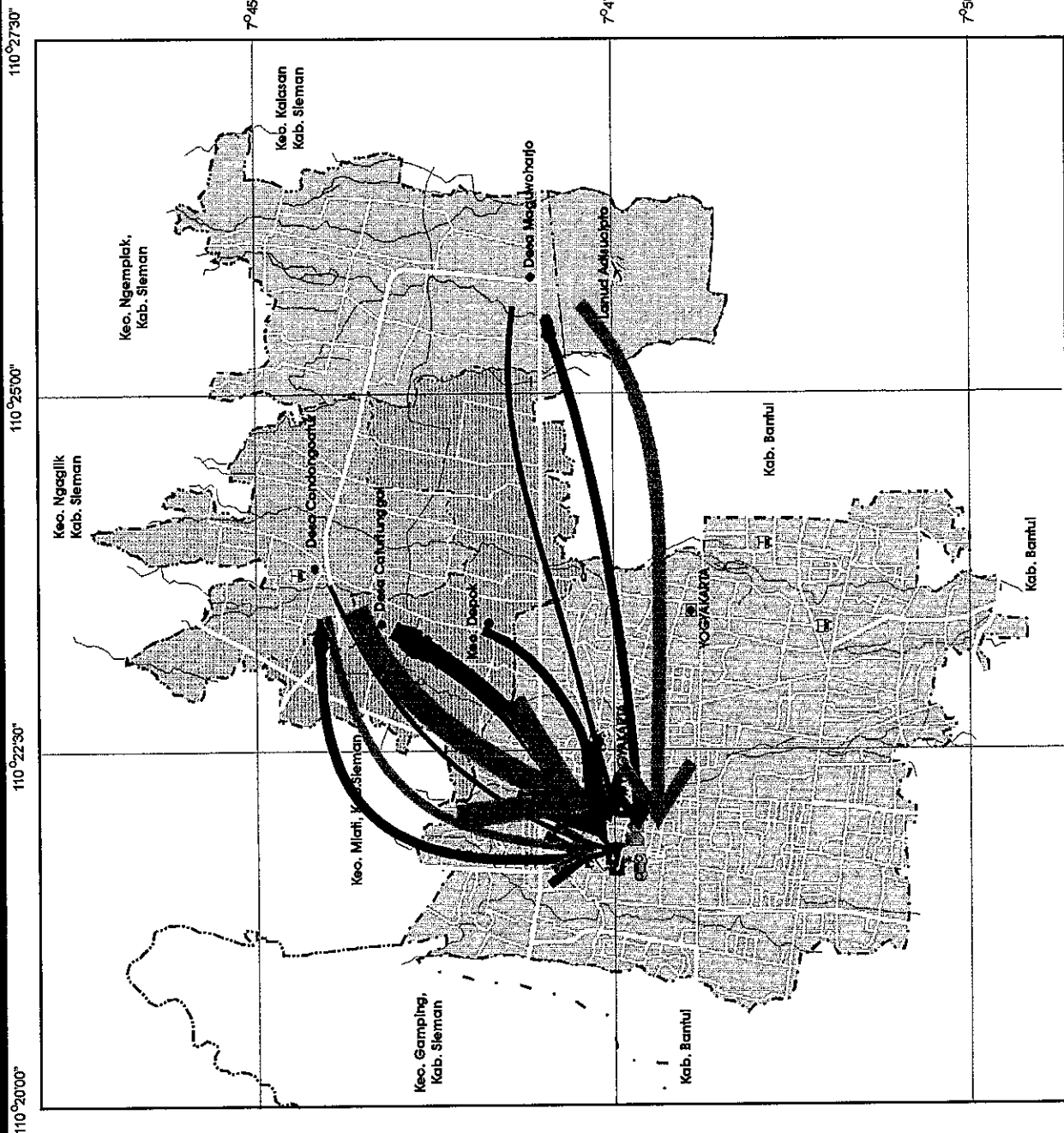


**Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA**



0 700 1.750 m

**1:70.000**



## 4.2. Analisis Keterkaitan Sosial

### 4.2.1. Analisis Interaksi Sosial

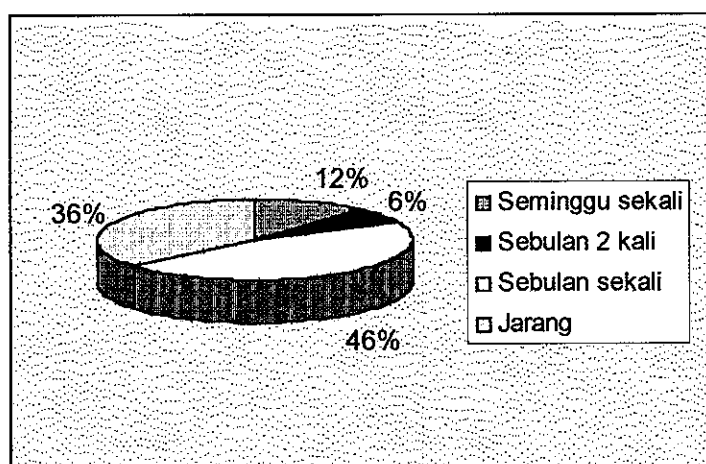
Keterkaitan sosial salah satunya dapat digambarkan dari pola kunjungan, interaksi kelompok sosial dan pola masyarakat, serta berdasarkan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan (Rondinelli, 1985; 146, 164)

Menurut hasil penelitian, sebagian besar responden menyatakan frekuensi kunjungan pada keluarga yang berada di Kota Yogyakarta dilakukan sebulan sekali. Berikut adalah hasil selengkapnya:

**TABEL IV.23.**  
**FREKUENSI KUNJUNGAN PADA KELUARGA**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Kunjungan			
	Seminggu sekali	Sebulan 2 kali	Sebulan sekali	Jarang
Caturtunggal	3	1	12	9
	6%	2%	24%	18%
Maguwoharjo	2	0	6	5
	4%	0%	12%	10%
Condongcatur	1	2	5	4
	2%	4%	10%	8%
Jumlah	6	3	23	18
Persentase	12%	6%	46%	36%

Sumber: Hasil analisis, 2004.



**GAMBAR 4.10**  
**FREKUENSI KUNJUNGAN PADA KELUARGA DI KOTA YOGYAKARTA**

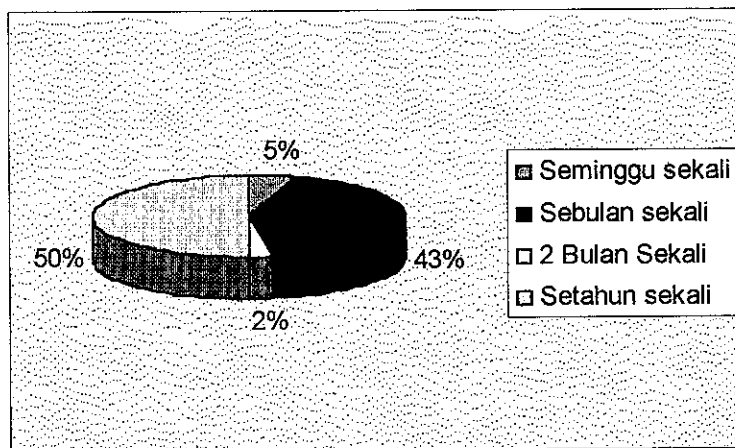
Sumber: Hasil analisis, 2004

Dari responden yang memiliki keluarga di Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki acara rutin (82%), yang berupa arisan keluarga, pertemuan keluarga/trah dan pengajian keluarga. Adapun frekuensi kegiatan rutin bersama keluarga tersebut kebanyakan dilakukan sebulan sekali.

**TABEL IV.24.**  
**FREKUENSI KEGIATAN RUTIN**  
**BERSAMA KELUARGA DI KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Kunjungan			
	Seminggu sekali	Sebulan sekali	2 Bulan Sekali	Setahun sekali
Caturtunggal	1	5	1	19
	2,44%	12,20%	2,44%	46,34%
Maguwoharjo	1	5	0	1
	2,44%	12,20%	0%	2,44%
Condongcatur	0	8	0	1
	0%	19,51%	0%	2,44%
Jumlah	2	18	1	21
Persentase	4,88%	43,90%	2,44%	51,22%

Sumber: Hasil analisis, 2004.



**GAMBAR 4.11.**  
**FREKUENSI KEGIATAN RUTIN**  
**BERSAMA KELUARGA DI KOTA YOGYAKARTA**

Sumber: Hasil analisis, 2004

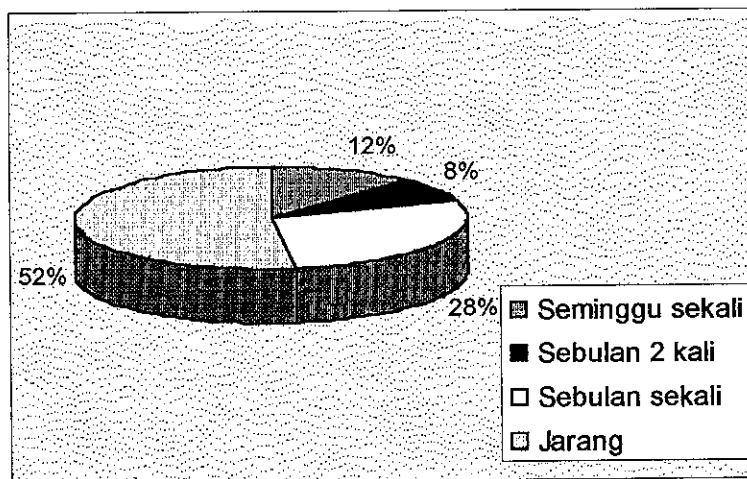
Sedangkan hasil penelitian terhadap kebiasaan responden untuk berkunjung kepada teman di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar responden jarang

melakukan kunjungan kepada temannya di Kota Yogyakarta, yaitu kurang dari sekali dalam sebulan. Berikut ini adalah hasil selengkapnya:

**TABEL IV.25.**  
**FREKUENSI KUNJUNGAN PADA TEMAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Kunjungan			
	Seminggu sekali	Sebulan 2 kali	Sebulan sekali	Jarang
Caturtunggal	2	2	7	14
	4%	4%	14%	28%
Maguwoharjo	0	1	5	7
	0%	2%	10%	14%
Condongcatur	4	1	2	5
	8%	2%	4%	10%
Jumlah	6	4	14	26
Persentase	12%	8%	28%	52%

Sumber: Hasil analisis, 2004.



**GAMBAR 4.12.**  
**FREKUENSI KUNJUNGAN PADA TEMAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**

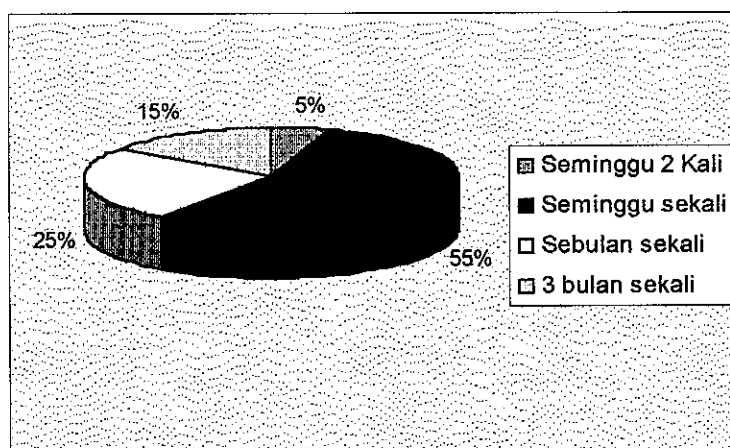
Sumber: Hasil analisis, 2004

Sebagian besar responden yang memiliki teman di Kota Yogyakarta tidak memiliki acara rutin (60,78%). Sedangkan dari responden yang memiliki acara rutin bersama temannya yang berada di Kota Yogyakarta sebagian besar menyatakan bahwa acara rutin dilakukan seminggu sekali.

**TABEL IV.26.**  
**FREKUENSI KEGIATAN RUTIN**  
**BERSAMA TEMAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Asal Responden	Frekuensi Kunjungan			
	Seminggu 2 Kali	Seminggu sekali	Sebulan sekali	3 bulan sekali
Caturtunggal	1	5	1	1
	5%	25%	5%	5%
Maguwoharjo	0	2	3	1
	0%	10%	15%	5%
Condongcatur	0	4	1	1
	0%	20%	5%	5%
Jumlah	1	11	5	3
Persentase	5%	55%	25%	15%

Sumber: Hasil analisis, 2004.



**GAMBAR 4.13.**  
**FREKUENSI ACARA RUTIN**  
**BERSAMA TEMAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Sumber: Hasil analisis, 2004

Sedangkan hasil penelitian tentang keterlibatan responden terhadap kegiatan sosial yang memiliki jaringan dari Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar (66%) responden tidak mengikuti organisasi sosial yang memiliki jaringan dari Kota Yogyakarta. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 34% mengikuti organisasi sosial dibidang keagamaan.



### 4.3. Analisis Keterkaitan Pemanfaatan Pelayanan Sosial

Dalam analisis ini akan dilihat tentang pemanfaatan pelayanan sosial yang berupa fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Hasil penelitian tentang pemanfaatan fasilitas pendidikan menunjukkan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar) sebagian besar responden (83,87%) lebih memilih memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Depok.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah, pada sekolah menengah tingkat pertama Kecamatan Depok dan Kota Yogyakarta memiliki posisi yang sama sebagai wilayah yang dituju responden untuk mendapatkan pelayanan pendidikan (masing-masing 46,15%). Sisanya, sebagian kecil memilih wilayah lain di luar Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Pada sekolah menengah tingkat atas sebagian besar (77,77%) responden memilih Kota Yogyakarta untuk mendapatkan fasilitas pendidikan.

Pada jenjang pendidikan tinggi Kecamatan Depok dipilih oleh sebagian besar responden (46,15%) sebagai tempat untuk memperoleh layanan pendidikan. Pilihan kedua adalah Kota Yogyakarta (30,77%). Selebihnya memilih wilayah lain di Kabupaten Sleman.

Sedangkan untuk hasil penelitian terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (87,5%) lebih memilih memanfaatkan puskesmas yang ada di wilayah setempat. Hanya sebagian kecil (12,5%) yang memanfaatkan puskesmas dari kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk Puskesmas di Kota Yogyakarta tidak ada responden yang memanfaatkan.

Untuk fasilitas kesehatan yang berupa rumah sakit sebagian besar responden (71,43%) memanfaatkan rumah sakit yang ada di Kota Yogyakarta. Selebihnya (28,57%) memanfaatkan rumah sakit di kecamatan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan dari dokter praktek sebagian besar responden (83,33%) mendapatkannya dari Kecamatan Depok. Selebihnya di Kota Yogyakarta (13,33%) dan kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Sleman (3,33%).



MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

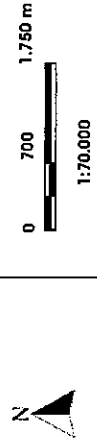
TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

GAMBAR 4.14  
PETA ALIRAN PEMANFAATAN FASILITAS PENDIDIKAN

LEGENDA:

- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bandara
- Sekolah Dasar
- Sekolah Lanjutan
- Tingkat Pertama
- Sekolah Lanjutan
- Tingkat Atas
- Perguruan Tinggi
- Aritan pemanfaatan SD (16,13%)
- Aritan pemanfaatan SLTP (46,15%)
- Aritan pemanfaatan SLTA (77,77%)
- Aritan pemanfaatan PT (80,77%)

Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA

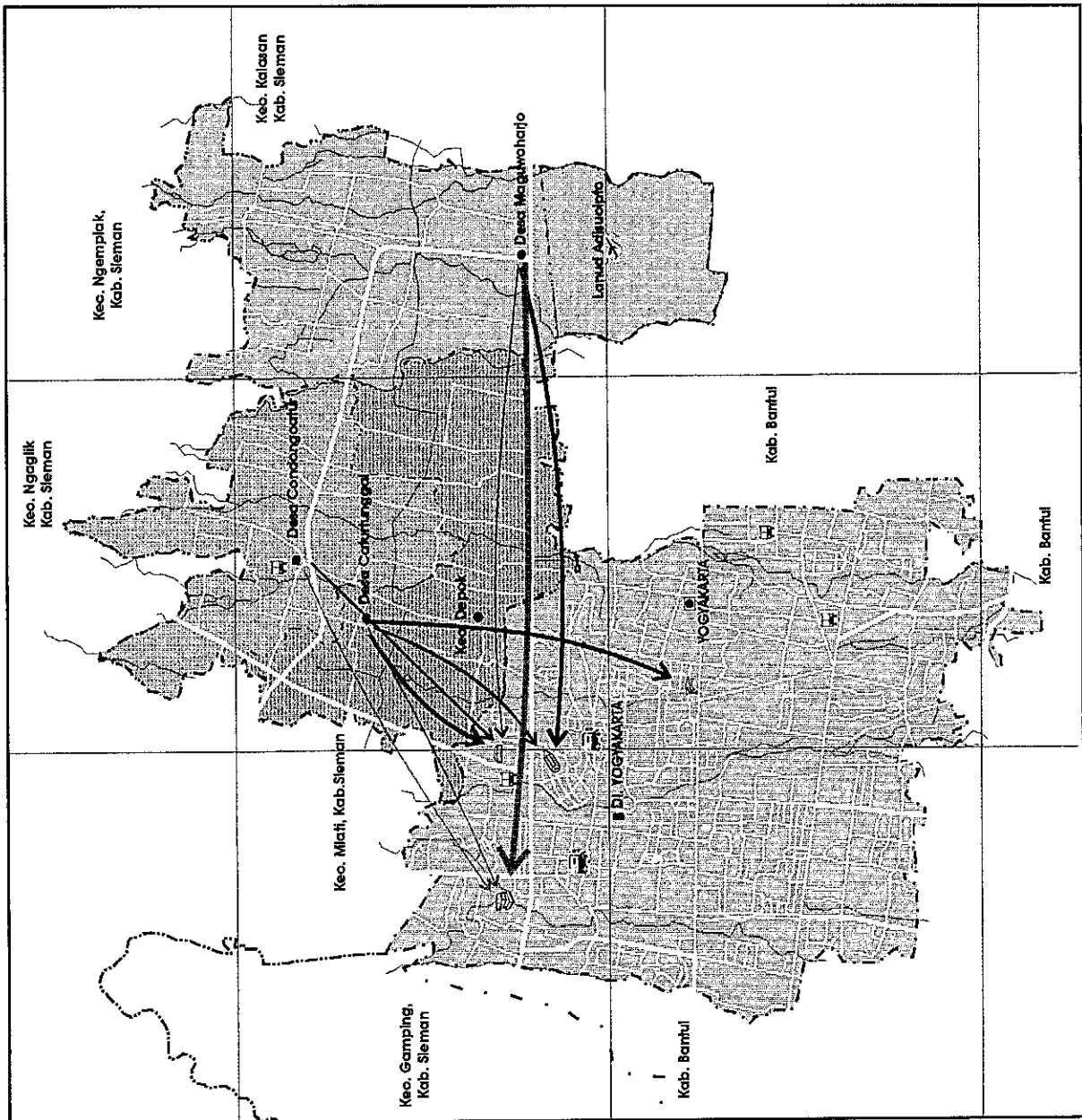


110°27'30"

110°25'00"

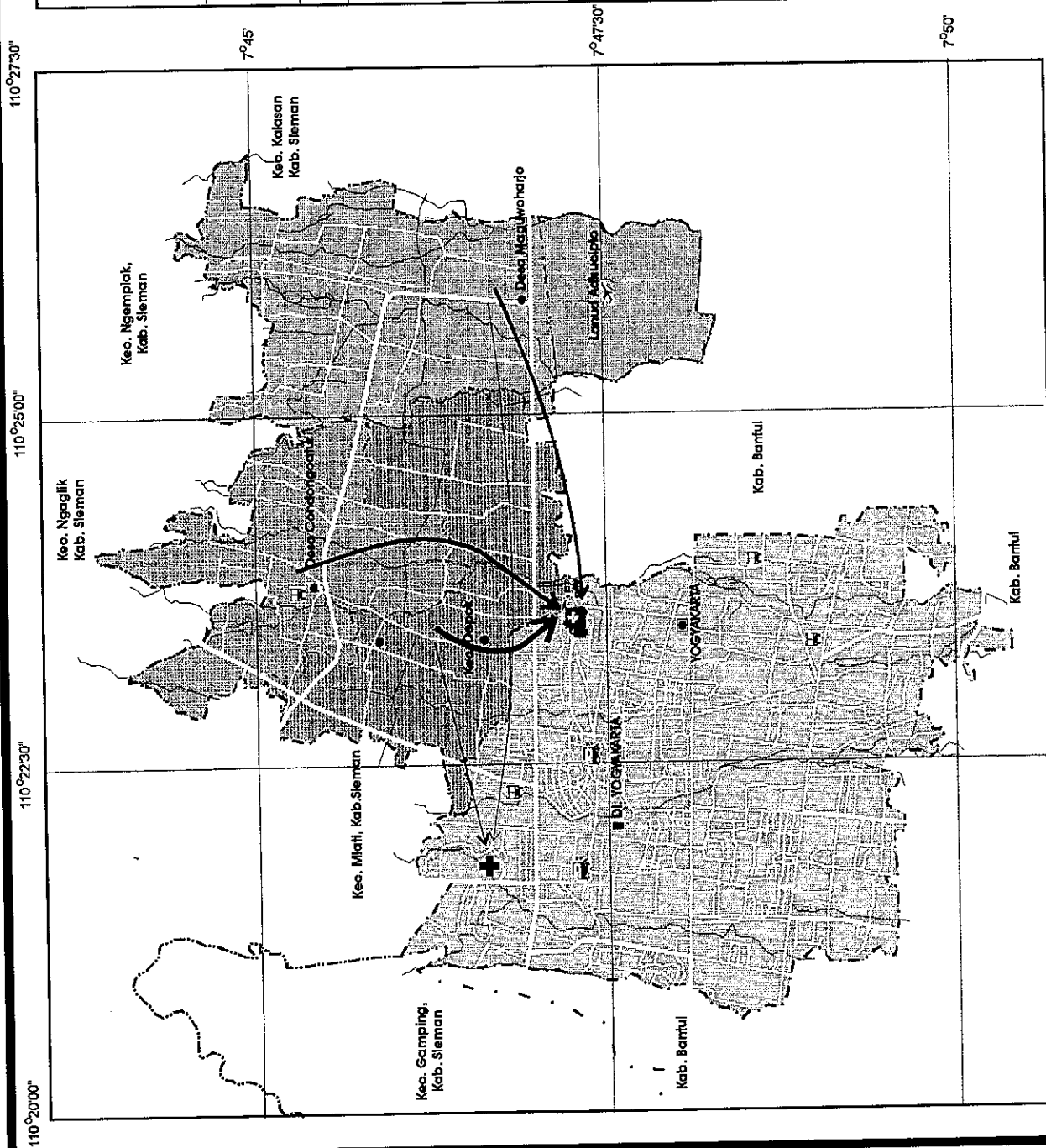
110°22'30"

110°20'00"



7°47'30"

7°50'



















**MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

**GAMBAR 4.15**  
**PETA ALIRAN PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN**

**LEGENDA:**

- |   |   |
|---|---|
|    | Jalan Negara                                |
|    | Jalan Propinsi                              |
|    | Jalan Kabupaten                             |
|    | Batas Administrasi Kabupaten                |
|    | Batas Administrasi Kecamatan                |
|    | Batas Administrasi Kelurahan                |
|    | Sungai                                      |
|    | Terminal                                    |
|    | Stasiun                                     |
|    | Bandara                                     |
|    | Puskesmas                                   |
|  | Rumah Sakit                                 |
|  | Dokter Praktek                              |
|  | Aliiran pemanfaatan PUSKEMAS (0%)           |
|  | Aliiran Pemanfaatan Rumah Sakit (71,43%)    |
|  | Aliiran Pemanfaatan Dokter Praktek (13,33%) |

Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA



0 700 1.750 m  
1:70.000

#### 4.4. Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta

##### 4.4.1. Keterkaitan Ekonomi

Kuat lemahnya interaksi dilihat dari nilai rata-rata persentase tanggapan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan *production linkage investigation*, aliran pendapatan, aliran modal, dan kebiasaan/perilaku konsumsi dan berbelanja.

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan dibagi menjadi tiga kelas intensitas interaksi, yaitu interaksi lemah, interaksi sedang, dan interaksi kuat.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, maka pembagian kelas intensitas didasarkan pada:

- Intensitas interaksi lemah jika nilai persentase :  $0\% < x < 33,33\%$
- Intensitas interaksi sedang jika nilai persentase :  $33,33\% < x < 66,67\%$
- Intensitas interaksi kuat jika nilai persentase :  $66,67\% < x < 100\%$

Hasil perhitungan rata-rata persentase tanggapan responden atas *production linkage* adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.27.**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS KETERKAITAN PRODUKSI**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
I.	<i>Backward linkage</i>					
A	Pertanian Tanaman Pangan	40,67	22,33	Lemah	37,00	0,00
B	Industri	0	7,69	Lemah	0	92,31
C	Perdagangan	11,00	41,00	Sedang	33,00	16,00
D	Jasa	19,75	58,02	Sedang	0	22,02
E	Lain-lain	36,84	5,26	Lemah	36,84	21,06
	<i>rata-rata backward linkage</i>	21,65	26,86	Lemah	21,37	30,28
II.	<i>Forward linkage</i>					
A	Pertanian Tanaman Pangan	100,00	0,00	Lemah	0,00	0,00
B	Industri	0	3,33	Lemah	0	96,67
C	Perdagangan	94,12	4,96	Lemah	0,92	0
D	Jasa	51,64	31,4	Lemah	0,05	16,92

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
E	Lain-lain	98	0,5	Lemah	1	0,5
	<b>rata-rata <i>forward linkage</i></b>	68,75	8,04	Lemah	0,39	22,82
	Jumlah Keterkaitan Produksi	90,40	34,90		21,76	53,10
	<b>Rata-rata keterkaitan produksi</b>	45,20	17,45	Lemah	10,88	26,55

Sumber: Hasil analisis, 2004

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.27, intensitas interaksi pertanian Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam *backward linkage* adalah interaksi lemah. Hasil yang sama ditunjukkan pada intensitas interaksi pertanian secara *forward linkage* terhadap Kota Yogyakarta. Ini berarti ketergantungan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam kegiatan pertanian hanyalah kecil. Kondisi ini dapat dimaklumi karena Kota Yogyakarta selaku kota dengan orde yang tinggi melayani kebutuhan/pelayanan tingkat tinggi yang *threshold* dan *rangennya* besar. Sementara untuk bahan baku pertanian sebagian besar merupakan barang tingkat rendah sehingga sudah cukup banyak disediakan secara lokal. Sementara dari sisi lemahnya intensitas interaksi secara *forward* juga dapat dipahami dimana keterbatasan lahan pertanian di Kecamatan Depok tidak memungkinkan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah yang besar, sehingga hanya mampu dimanfaatkan di wilayah setempat.

Kemampuan Kecamatan Depok untuk memenuhi kebutuhan petaninya memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga bagi petani dimana petani tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan benih dan pupuk yang dibutuhkannya. Terlebih lagi bila memperhatikan bahwa para petani merasakan hambatan transportasi untuk berbelanja kebutuhan pertanian keluar wilayah Kecamatan Depok.

Dari kondisi ini, bila mengacu kepada teori yang mendasari terjadinya interaksi dapat dikatakan bahwa kurang ada komplementaritas antara Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta.

Satu hal yang cukup mengkhawatirkan adalah bahwa keberadaan kios Koperasi Unit Desa di Kecamatan Depok yang berlokasi di timur Sub Terminal Condongcatur saat ini kurang mengkonsentrasikan usahanya pada penyediaan kebutuhan pertanian. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini KUD justru lebih banyak menyediakan barang-barang kelontong.

Sedangkan interaksi kegiatan industri Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta secara *backward* termasuk dalam kategori interaksi lemah. Hasil yang sama ditunjukkan pada interaksi secara *forward*. Hasil tersebut memiliki arti bahwa kegiatan industri kurang memiliki keterkaitan produksi terhadap Kota Yogyakarta, baik dalam mendatangkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi maupun untuk pemasaran hasil industrinya bagi kegiatan produksi lanjutan.

Lemahnya interaksi industri terhadap Kota Yogyakarta dapat dimaklumi karena Kota Yogyakarta sendiri bukanlah merupakan Kota yang perkembangannya didukung oleh kemajuan industri. Sehingga sektor perdagangan yang berkembang kurang banyak menyediakan bahan-bahan baku industri. Dengan kurangnya dukungan Kota Yogyakarta terhadap kegiatan industri di Kecamatan Depok inilah maka kegiatan industri di Kecamatan Depok kemudian mengandalkan wilayah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan baku. Mengacu pada teori, ini bisa diartikan ada *intervening opportunity*, yaitu daerah tujuan alternatif yang dapat menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih bagus.

Sementara kurangnya kemampuan secara *forward* dalam memasarkan hasil produksi industri ke Kota Yogyakarta dimungkinkan karena produk yang dihasilkan adalah produk dengan ciri daerah yang bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah bukan merupakan barang yang unik. Oleh karena itu, *forward linkage*-nya lebih kuat ke wilayah-wilayah lain di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan barang hasil industri tersebut sebagai cinderamata.

Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah lemahnya interaksi didalam wilayah Kecamatan Depok sendiri untuk kegiatan industri. Ini berarti tidak berakarnya kegiatan industri pada wilayah setempat di Kecamatan Depok. Akibatnya dalam jangka panjang dikhawatirkan Kecamatan Depok akan dirugikan dengan lebih banyaknya uang yang mengalir ke luar.

Pada kegiatan perdagangan, diketahui bahwa intensitas interaksi secara *backward* terhadap Kota Yogyakarta termasuk kategori interaksi sedang, yang berarti Kecamatan Depok cukup tergantung pada Kota Yogyakarta dalam mendapatkan barang-barang untuk diperdagangkan kembali. Hasil ini dapat dimaklumi karena Kota Yogyakarta memiliki sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor dalam PDRB yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Oleh karena itu sangat dimungkinkan peran Kota Yogyakarta terhadap kegiatan perdagangan di Kecamatan Depok menjadi dominan. Sedangkan secara *forward*, intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Hal ini dimungkinkan karena kuatnya sektor perdagangan di Kota Yogyakarta membawa implikasi tingginya persaingan dengan pedagang-pedagang yang ada di Kota Yogyakarta sehingga pedagang dari Kecamatan Depok kurang mampu meraih pasar dari Kota Yogyakarta.



Pada kegiatan jasa dapat diketahui bahwa secara *backward*, intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah intensitas yang sedang. Ini berarti Kecamatan Depok cukup mengandalkan Kota Yogyakarta untuk menyediakan bahan baku pendukung kegiatan jasa. Hasil ini sangat dimungkinkan mengingat Kota Yogyakarta memiliki sektor jasa yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Sementara untuk *forward linkage*, interaksi terhadap Kota Yogyakarta tergolong lemah. Ini berarti Kecamatan Depok kurang mampu bersaing dalam memasarkan jasanya ke wilayah Kota Yogyakarta.

Pada kegiatan lain-lain dapat diketahui bahwa interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam *backward linkage* termasuk dalam kategori interaksi lemah. Ini berarti Kecamatan Depok tidak tergantung kepada Kota Yogyakarta dalam memperoleh bahan baku sektor lain-lain (bangunan). Hasil ini dimungkinkan karena Kecamatan Depok relatif dekat dengan sumber-sumber bahan bangunan, kecuali untuk bahan-bahan bangunan yang dihasilkan oleh pabrik. Ini berarti ada *intervening opportunity* dalam menyediakan bahan bangunan.

Perhitungan atas *forward linkage* juga menunjukkan lemahnya interaksi. Ini berarti sektor lain-lain di Kecamatan Depok masih kurang dalam memasarkan ke Kota Yogyakarta.



MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

GAMBAR 4.16  
PETA BACKWARD LINKAGE KETERKAITAN PRODUKSI

LEGENDA:

- Jalan Negara
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bandara
- Pertanian
- Industri
- Perdagangan
- Jasa
- Lain-lain

Interaksi backward linkage pertanian: 22,33%

Interaksi backward linkage industri: 7,69%

Interaksi backward linkage perdagangan: 41,00%

Interaksi backward linkage jasa: 58,02%

Interaksi backward linkage lain-lain: 5,26%

Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA



0 700 1.750 m

1:70.000

110°27'30"

110°25'00"

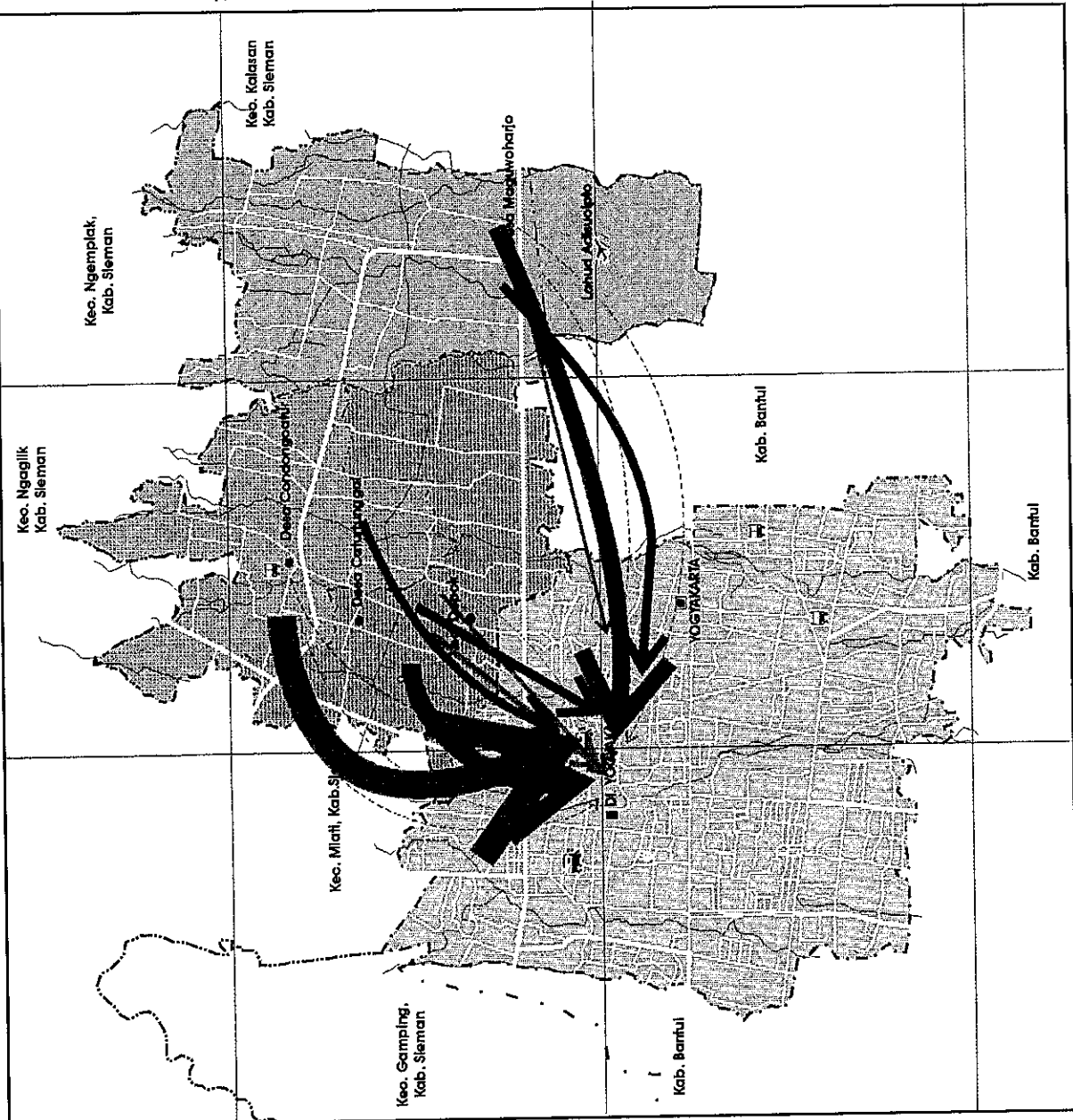
110°22'30"

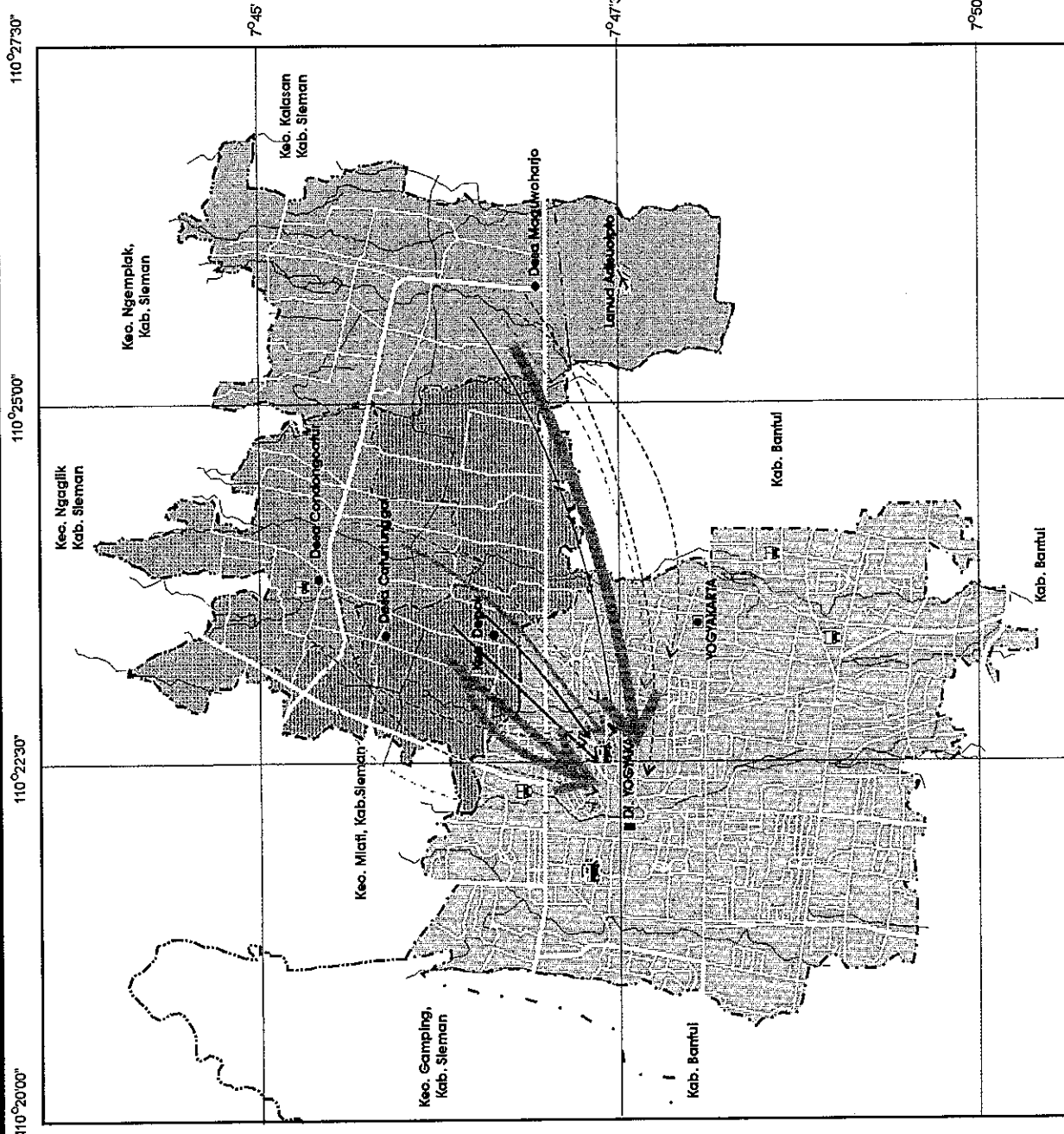
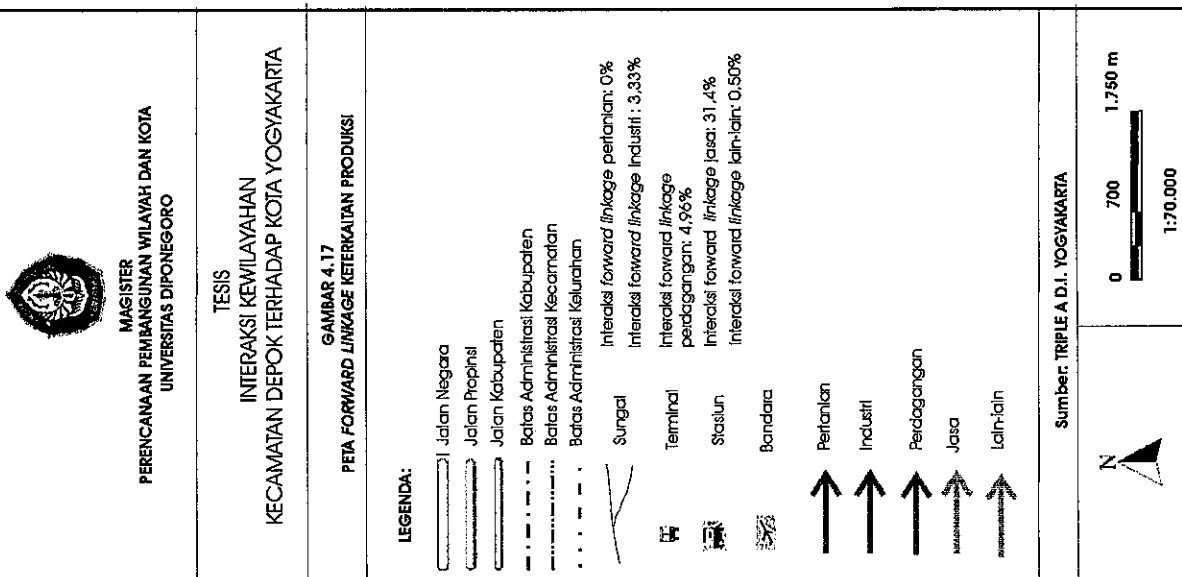
110°20'00"















7°45'

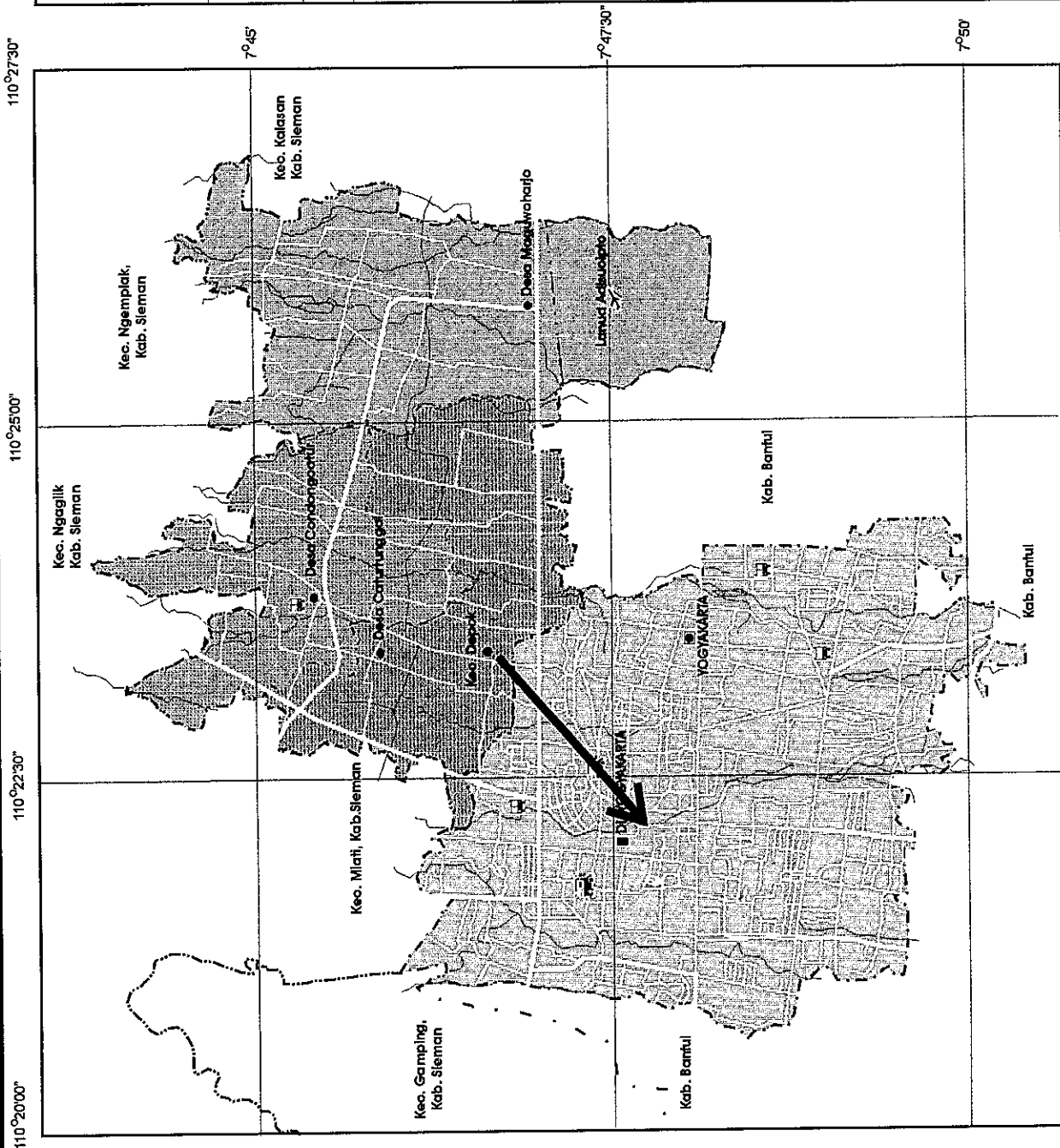
7°47'30"

7°50'





 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>TESIS INTERAKSI KEWILAYAHAN KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA</p>	<p>GAMBAR 4.18 PETA KETERKATAN PRODUKSI</p>
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Jalan Negara</li> <li> Jalan Propinsi</li> <li> Jalan Kabupaten</li> <li> Batas Administrasi Kabupaten</li> <li> Batas Administrasi Kecamatan</li> <li> Batas Administrasi Kelurahan</li> <li> Sungai</li> <li> Terminal</li> <li> Stasiun</li> <li> Bandara</li> </ul> <p style="text-align: center;">   Keterkaitan produksi sedang (17,45%) </p>		
<p>Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="1278 506 1358 674">  </div> <div data-bbox="1278 226 1374 461">  <p>0 700 1.750 m 1:70.000</p> </div> </div>		



Dari hasil perhitungan *production linkage* tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan keterkaitan produksi ke belakang (*backward*), intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Begitupula dengan keterkaitan produksi kedepan (*forward*). Secara keseluruhan dari *production linkage* diketahui bahwa keterkaitan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah.

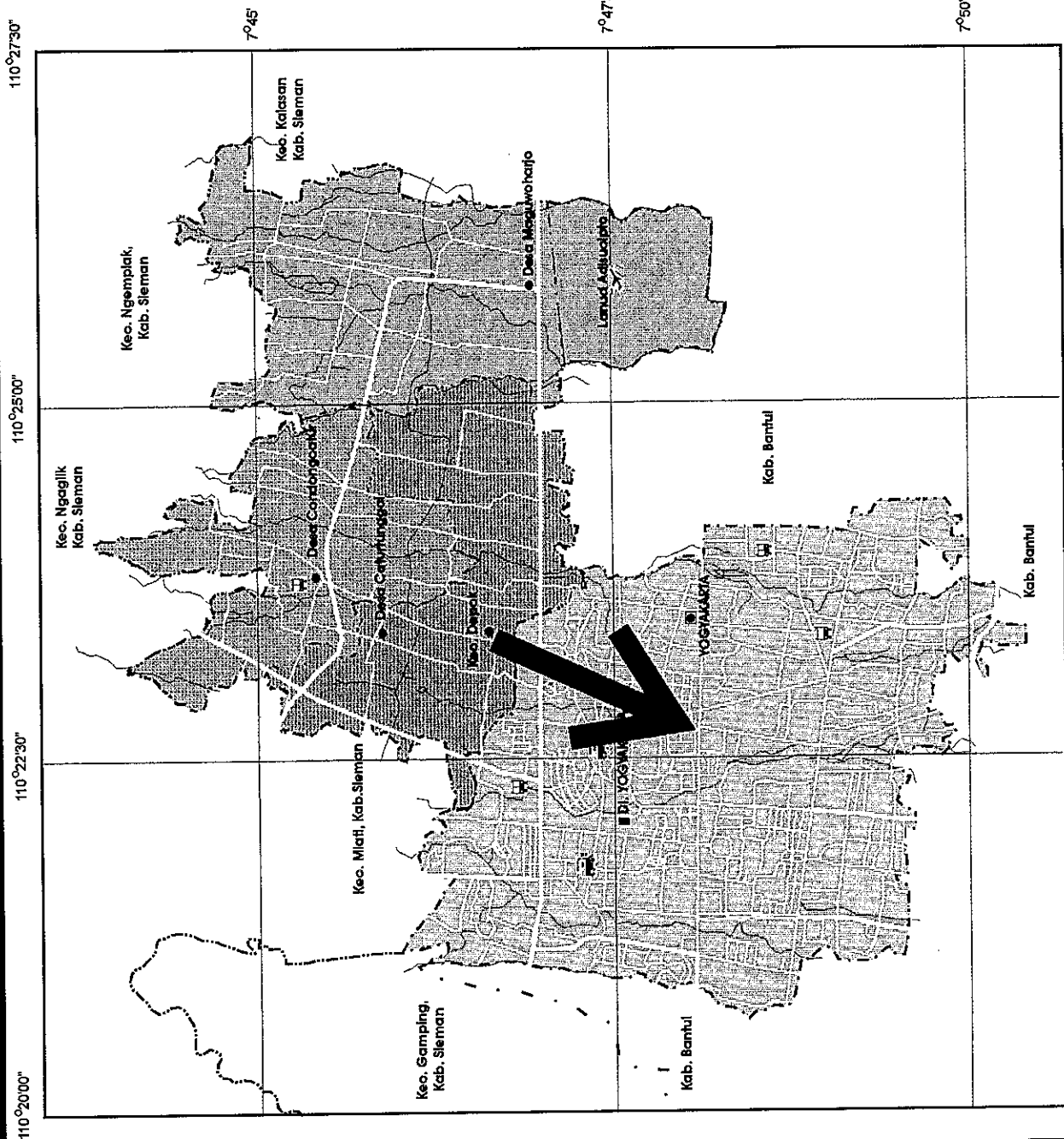
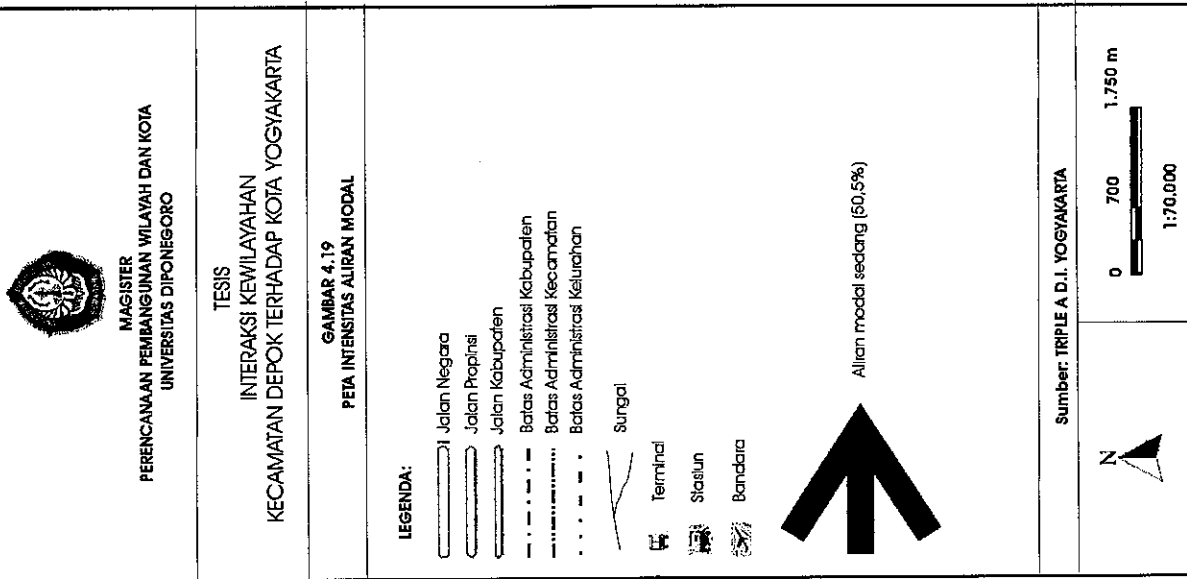
Pada aliran pendapatan dimana Kecamatan Depok tidak memperoleh aliran masuk penghasilan dari Kota Yogyakarta dan tidak mengalirkan sebagian penghasilannya secara rutin ke Yogyakarta maka dapat diketahui bahwa intensitas Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta bila dilihat dari aliran pendapatan adalah lemah. Ini berarti aliran uang dari hasil pendapatan lebih banyak beredar di Kecamatan Depok sendiri.

Sementara untuk aliran modal, perhitungan interaksi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**TABEL IV.28**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS ALIRAN MODAL**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta
I.	Aliran Akumulasi Modal			
	Tabungan	40	60	Sedang
II.	Aliran Pemanfaatan Modal			
	Kredit	59	41	Sedang
	Rata-rata	49,5	50,5	Sedang

Sumber: Hasil analisis, 2004



Berdasar hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa baik dalam pengakumulasian modal maupun pemanfaatan modal, intensitas interaksi permodalan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah sedang. Ini berarti Kecamatan Depok masih cukup memiliki ketergantungan terhadap Kota Yogyakarta dalam penyediaan modal bagi penduduknya. Implikasi negatif dari hasil ini adalah masih adanya pelarian modal oleh penduduk Kecamatan Depok ke Kota Yogyakarta.

Pada kebiasaan berbelanja penduduk Kecamatan Depok, perhitungan intensitas interaksi ditunjukkan pada tabel berikut:

**TABEL IV.29**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS KEBIASAAN BERBELANJA**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
I.	Kebiasaan berbelanja barang-barang tingkat rendah					
A.	Kebiasaan belanja barang sehari-hari	63,77	31,88	Lemah	4,15	0
B.	Kebiasaan belanja barang kelontong	53,25	45,45	Sedang	1,30	0
	Rata-rata barang tingkat rendah	58,51	38,67	Sedang	2,73	0
II.	Kebiasaan berbelanja barang-barang tingkat tinggi					
A.	Kebiasaan belanja sandang	5,76	88,46	Kuat	1,92	3,84
B.	Kebiasaan belanja bahan bangunan	68,75	26,56	Lemah	4,69	0
C.	Kebiasaan belanja elektronik	5,77	88,46	Kuat	1,92	3,85
	Rata-rata barang tingkat tinggi	26,76	67,83	Kuat	2,84	2,56
III.	Rata-rata kebiasaan berbelanja	42,64	53,25	Sedang	2,78	1,28

Sumber: Hasil analisis, 2004

Berdasarkan kategori tersebut, interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam berbelanja barang-barang tingkat rendah termasuk pada interaksi yang lemah. Hasil tersebut diperkuat dengan frekuensi belanja barang-barang tersebut ke Kota Yogyakarta yang mayoritas menyatakan antara sebulan sekali hingga sangat jarang.



MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

GAMBAR 4.20  
PETA INTENSITAS KEBIASAAN BELANJA

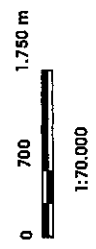
LEGENDA:

- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bandara

Intensitas kebiasaan belanja  
= sedang (53,25%)



Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA



110°27'30"

110°25'00"

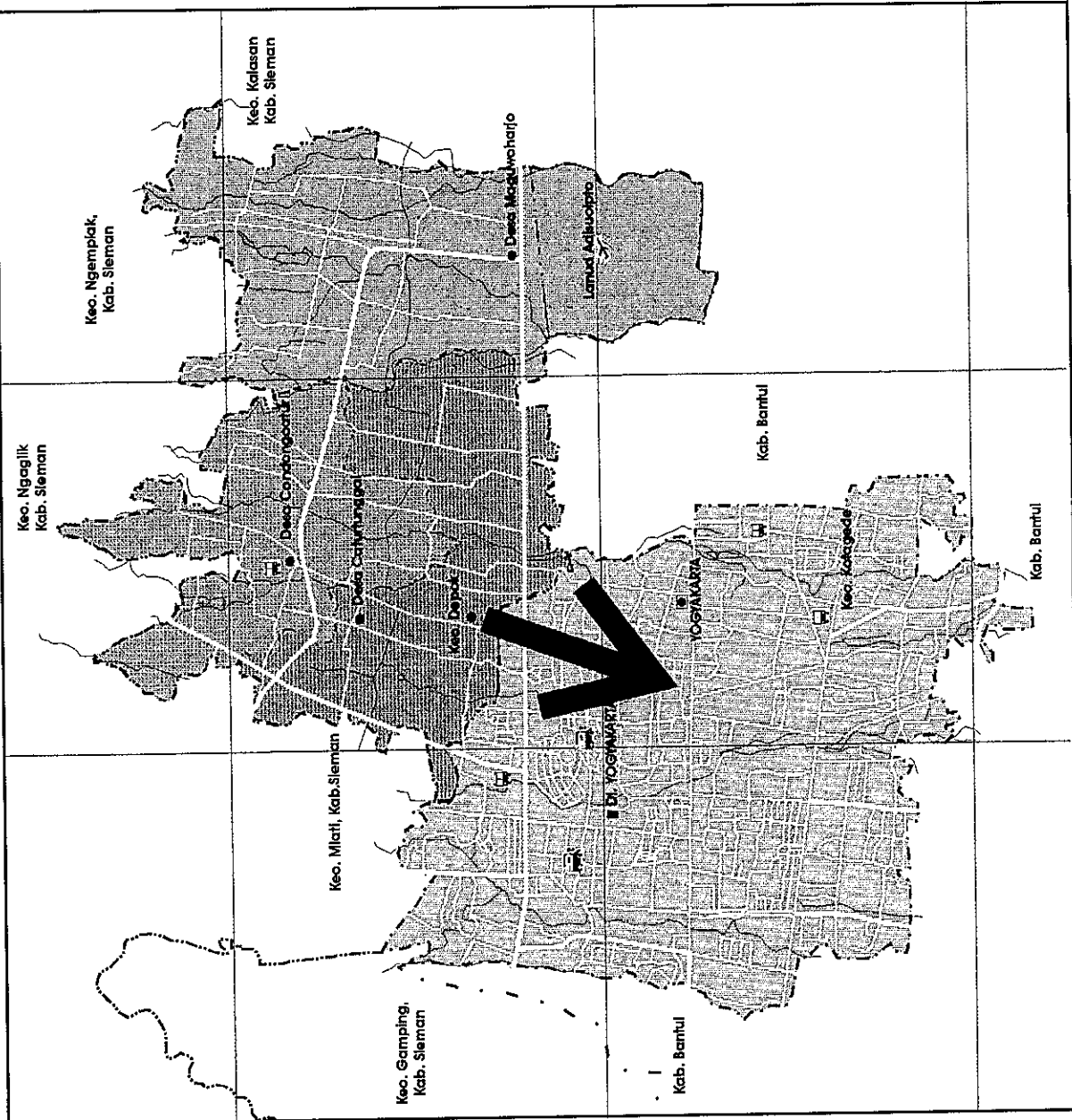
110°22'30"

110°20'00"

7°45'

7°47'30"

7°50'





Untuk barang-barang tingkat rendah frekuensi ini termasuk kurang *intense*. Ini dapat dimaklumi dengan memperhatikan sifat barang-barang tersebut yang memiliki *range* terbatas dan *threshold* yang kecil, sehingga Kecamatan Depok mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri.

Pada kebiasaan berbelanja penduduk untuk barang-barang tingkat tinggi kelas interaksi interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta termasuk pada interaksi yang tinggi. Hasil inipun dapat dimaklumi dengan memperhatikan sifat barang-barang tersebut yang memiliki *range* dan *threshold* yang besar. Menurut Daldjoeni biasanya barang dan jasa tingkat tinggi terdapat di kota-kota besar yang penduduknya banyak. Kota-kota tersebut menyajikan berbagai barang dan jasa untuk wilayah di sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki (2004; 153). Hal ini sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Dati II Sleman yang mengacu Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinyatakan dalam dokumen tersebut bahwa Kota Yogyakarta memiliki hirarki I, yang berarti mempunyai fungsi melayani daerah lainnya dalam lingkup regional. Jadi sudah sewajarnya bila barang-barang tingkat tinggi tersebut dilayani oleh Kota Yogyakarta.

Barang-barang tingkat tinggi biasanya tidak dikonsumsi secara periodik dalam jangka waktu yang pendek. Ini juga dibuktikan dari hasil penelitian bahwa frekuensi belanja barang-barang tingkat tinggi berkisar antara sebulan sekali hingga sangat jarang.

Secara keseluruhan intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta sebagai lokasi berbelanja menunjukkan intensitas yang sedang. Ini berarti Kecamatan Depok cukup tergantung pada Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan akan barang-barang belanjaan. Ini dapat dimaklumi karena disamping kedudukan Kota Yogyakarta pada hirarki yang lebih tinggi, juga dapat dilihat dari besarnya kontribusi

sektor perdagangan Kota Yogyakarta terhadap PDRB yang mengindikasikan kuatnya sektor perdagangan di Kota Yogyakarta. Penduduk Kecamatan Depok akan dapat memperoleh barang dagangan yang lebih bervariasi dan ketersediaan stok yang lebih banyak di Kota Yogyakarta.

Secara keseluruhan, untuk menilai intensitas interaksi ekonomi dilakukan perhitungan rata-rata nilai *production linkage*, aliran pendapatan, aliran modal dan kebiasaan berbelanja. Hasil perhitungan interaksi ekonomi adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.30.**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS INTERAKSI EKONOMI**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
1	<i>Production linkage</i>	45,20	17,45	Lemah	10,88	26,55
2	Aliran Pendapatan	100	0	Lemah	0	0
3	Aliran Modal	49,50	50,50	Sedang	0	0
4	Kebiasaan berbelanja	42,64	53,25	Sedang	2,78	1,28
	Rata-rata	59,34	30,3	Lemah	3,42	6,96

Sumber: Hasil analisis, 2004

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan intensitas interaksi ekonomi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Ini berarti secara ekonomi Kecamatan Depok kurang tergantung kepada Kota Yogyakarta.



MAGISTER  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS  
INTERAKSI KEWILAYAHAN  
KECAMATAN DEPOK TERHADAP KOTA YOGYAKARTA

GAMBAR 4.21  
PETA INTENSITAS INTERAKSI EKONOMI

LEGENDA:

- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- - - Batas Administrasi Kabupaten
- - - Batas Administrasi Kecamatan
- - - Batas Administrasi Kelurahan
- Sungai
- Terminal
- Stasiun
- Bandara

Alian modal  
= sedang (50,5%)

Keterkaitan produksi  
sedang (17,45%)

Alian Pendapatan (0%)

Intensitas kebiasaan belanja  
= sedang (53,25%)

Sumber: TRIPLE A D.I. YOGYAKARTA

0 700 1.750 m  
1:70.000



110°27'30"

110°25'00"

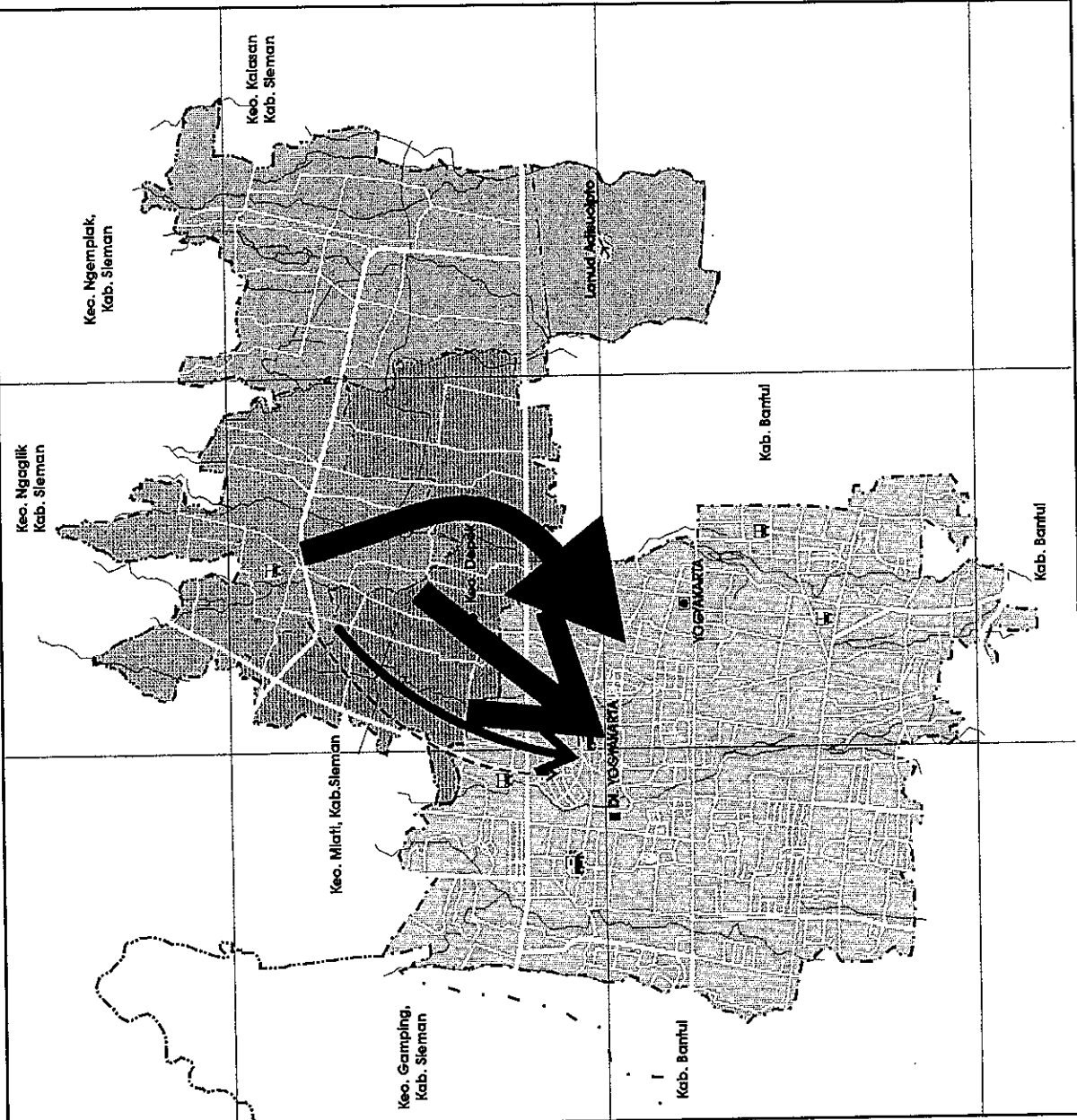
110°22'30"

110°20'00"

7°45'

7°47'30"

7°50'



#### 4.4.2. Keterkaitan Sosial

Keterkaitan sosial ini dilihat dari pola kunjungan terhadap keluarga dan teman di Kota Yogyakarta, serta dengan melihat keterlibatan terhadap organisasi sosial yang jaringannya dari Kota Yogyakarta. Dijadikannya frekuensi kunjungan keluarga dan teman sebagai indikator adalah karena keluarga dan teman merupakan orang-orang terdekat yang dapat menjadi media informasi.

Keuntungan yang didapatkan dari kunjungan kepada keluarga dan teman adalah dimungkinkannya mendapatkan informasi secara terbuka. Semakin banyak anggota keluarga atau teman yang dapat berkumpul pada satu tempat dan saat yang bersamaan akan semakin banyak memberikan manfaat. Manfaat tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya informasi dan pengalaman yang dapat dikumpulkan dari anggota keluarga atau teman sementara disisi yang lain tidak terjadi inefisiensi waktu. Pertemuan rutin bersama anggota keluarga atau teman dalam jumlah banyak pada saat yang bersamaan akan menghindarkan konsumsi waktu yang tidak produktif.

Penentuan kelas intensitas interaksi pada analisis interaksi sosial didasarkan pada frekuensi kunjungan dan acara rutin. Sedangkan keikutsertaan terhadap kegiatan sosial lebih dimaksudkan untuk mendukung hasil perhitungan.

Dengan pertimbangan bahwa kunjungan dalam periode waktu sebulan sekali dirasa cukup untuk dapat mengikuti perkembangan keadaan dan informasi, serta dengan pertimbangan bahwa kunjungan yang terlalu sering akan membawa kerugian berupa inefisiensi dana serta pemanfaatan waktu yang tidak produktif, maka jika sebagian besar periode kunjungan dilakukan sebulan sekali dapat dikatakan sebagai indikator adanya interaksi yang cukup (sedang). Dari pertimbangan ini kemudian kelas intensitas yang lain ditetapkan, yaitu: untuk frekuensi kunjungan kurang dari sebulan sekali dikategorikan

sebagai intensitas lemah, sedangkan untuk kunjungan lebih dari sebulan sekali dikategorikan sebagai intensitas kuat.

Berdasarkan hasil studi, dapat dikatakan bahwa intensitas interaksi sosial Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh karakter kedua wilayah tersebut, dimana keduanya sudah bercirikan kota. Menurut Wirth dalam Daldjoeni (2003; 38), kota adalah permukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena itu hubungan sosial antar penghuninya serba longgar, acuh dan relasinya tak pribadi (*impersonal relations*). Selain itu, ada kemungkinan karena keterbatasan lahan dan mahalannya lahan di Kota Yogyakarta telah menyebabkan penduduk Kota Yogyakarta akhirnya bermigrasi ke wilayah-wilayah di luar Kota Yogyakarta dimana lahan masih murah, sehingga interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi terhadap wilayah-wilayah limpahan migrasi tersebut.

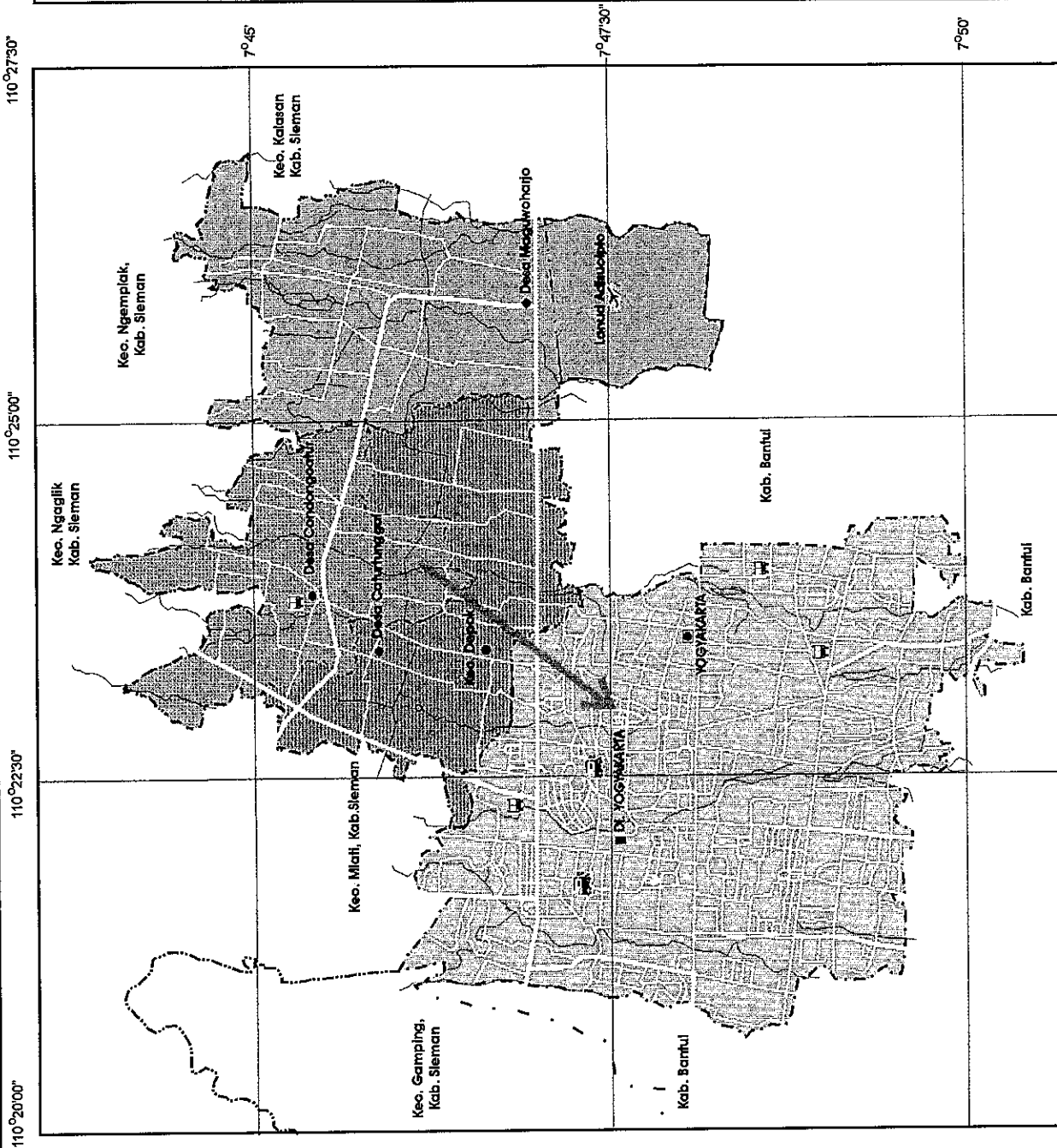
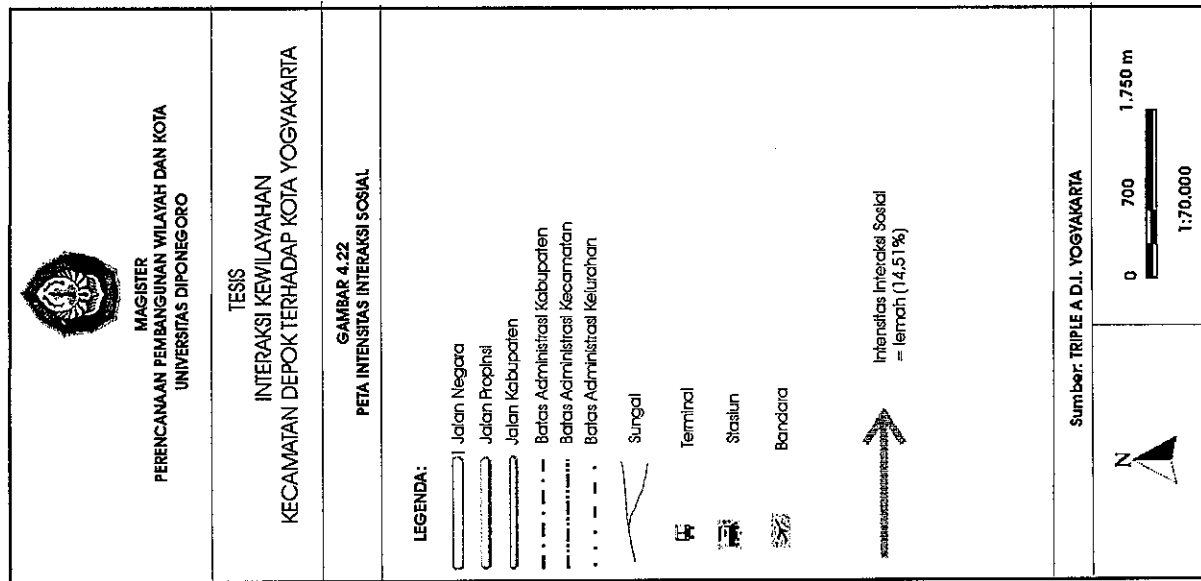
Hasil studi keterkaitan sosial ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.31.**  
**RATA-RATA FREKUENSI INTERAKSI SOSIAL**

Keterangan	Frekuensi Interaksi Sosial (%)		
	> sebulan sekali	Sebulan sekali	< sebulan sekali
Kunjungan pada keluarga di Kota Yogyakarta	5,88	15,03	11,76
Pertemuan Rutin bersama keluarga di Kota Yogyakarta	1,59	14,34	17,54
Kunjungan pada teman di Kota Yogyakarta	6,54	9,15	16,99
Pertemuan rutin bersama teman di Kota Yogyakarta	0,50	0,23	0,43
Total	14,51	38,76	46,72

Sumber: Hasil analisis, 2004

Lemahnya intensitas interaksi sosial juga dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan penduduk dalam organisasi sosial yang memiliki jaringan lintas wilayah Kota Yogyakarta dan Kecamatan Depok.



#### 4.4.3. Keterkaitan Pemanfaatan Pelayanan Sosial

Analisis keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial dilihat melalui dua variabel, yaitu pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Hasil perhitungan intensitas interaksi pemanfaatan pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.32**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS**  
**PEMANFAATAN PELAYANAN PENDIDIKAN**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas Interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
1	Sekolah Dasar	83,87	16,13	Lemah	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama	46,15	46,15	Sedang	0	7,69
3	Sekolah Menengah Atas	11,11	77,78	Kuat	0	11,11
4	Perguruan Tinggi	46,15	30,77	Lemah	23,08	0
	Rata-rata	46,82	42,71	Sedang	5,77	4,70

Sumber: Hasil analisis, 2004

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan dasar adalah lemah. Ini berarti responden lebih memilih memanfaatkan pelayanan pendidikan dasar di wilayah setempat. Sedangkan intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta untuk jenjang pendidikan menengah pertama diperoleh hasil bahwa Kecamatan Depok dan Kota Yogyakarta memiliki posisi yang berimbang dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan (intensitas interaksi sedang). Kecenderungan ini dimungkinkan karena alasan fisik siswa, dimana untuk anak-anak usia sekolah dasar secara fisik lebih menguntungkan bila mendapatkan pelayanan pendidikan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, selanjutnya pada anak usia sekolah menengah pertama dengan perkembangan fisik yang lebih kuat dan pertimbangan mutu pendidikan, maka jangkauan/jarak menjadi kurang relevan sebagai pertimbangan, sehingga kemudian ada yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang relatif lebih jauh dari lokasi tempat tinggal.

Sementara untuk intensitas interaksi Kecamatan Depok dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan menengah ke atas didapatkan hasil studi bahwa terjadi intensitas interaksi yang kuat dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Depok masih tergantung pada Kota Yogyakarta. Alasan yang mendasari lebih banyak karena pertimbangan mutu, dimana terdapat *image* bahwa pendidikan di Kota Yogyakarta memiliki mutu yang jauh lebih bagus. Oleh karena itu, agar dalam pendidikan tinggi nantinya mampu bersaing dengan calon mahasiswa dari berbagai daerah dalam lingkup yang lebih luas, maka ada kecenderungan memilih fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta untuk jenjang pendidikan tinggi tergolong lemah. Ini berarti Kecamatan Depok tidak tergantung pada Kota Yogyakarta dalam mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena Kecamatan Depok memiliki banyak fasilitas pendidikan tinggi di wilayahnya.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi pemanfaatan pelayanan pendidikan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah sedang (berimbang). Kedudukan Kecamatan Depok yang seimbang dengan Kota Yogyakarta ini sesuai dengan RUTRD Kabupaten Dati II Sleman yang menempatkan Kecamatan Depok sebagai kota hirarki II di Kabupaten Sleman yang salah satunya mengemban fungsi pusat pelayanan pendidikan.

Dalam hal pemanfaatan fasilitas kesehatan, hasil perhitungan intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dapat ditunjukkan pada Tabel IV.33



**TABEL IV.33**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS**  
**PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
1	Puskesmas	87,50	0	Lemah	12,50	0
2	Dokter Praktek	83,33	13,33	Lemah	3,33	0
3	Rumah Sakit	0	71,43	Kuat	28,57	0
	Rata-rata	56,94	28,25	Lemah	14,80	0

Sumber: Hasil analisis, 2004

Dari perhitungan tersebut, intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan puskesmas dan dokter praktek adalah lemah. Ini berarti pelayanan tersebut telah cukup diberikan oleh Kecamatan Depok terhadap penduduknya. Hasil ini sesuai dengan pembagian hirarki Kota yang mengacu pada RSTRP Yogyakarta, dimana fasilitas pelayanan tingkat rendah seperti puskesmas dan dokter praktek merupakan fungsi dari hirarki yang lebih rendah. Ini juga sesuai dengan hirarki kota Kecamatan Depok yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial kecamatan. Selain itu, ada kecenderungan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan terdekat untuk pertolongan pertama, sehingga pemanfaatan puskesmas dan dokter praktek lebih banyak dilakukan di wilayah sekitar.

Adapun untuk fasilitas rumah sakit yang merupakan kategori barang dan jasa tingkat tinggi, keberadaannya cenderung di kota-kota yang hirarkinya tinggi. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila kecenderungan pemanfaatan fasilitas kesehatan adalah ke Kota Yogyakarta, sehingga intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan pelayanan fasilitas kesehatan termasuk intensitas tinggi.

Secara keseluruhan, hasil intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan adalah intensitas lemah.

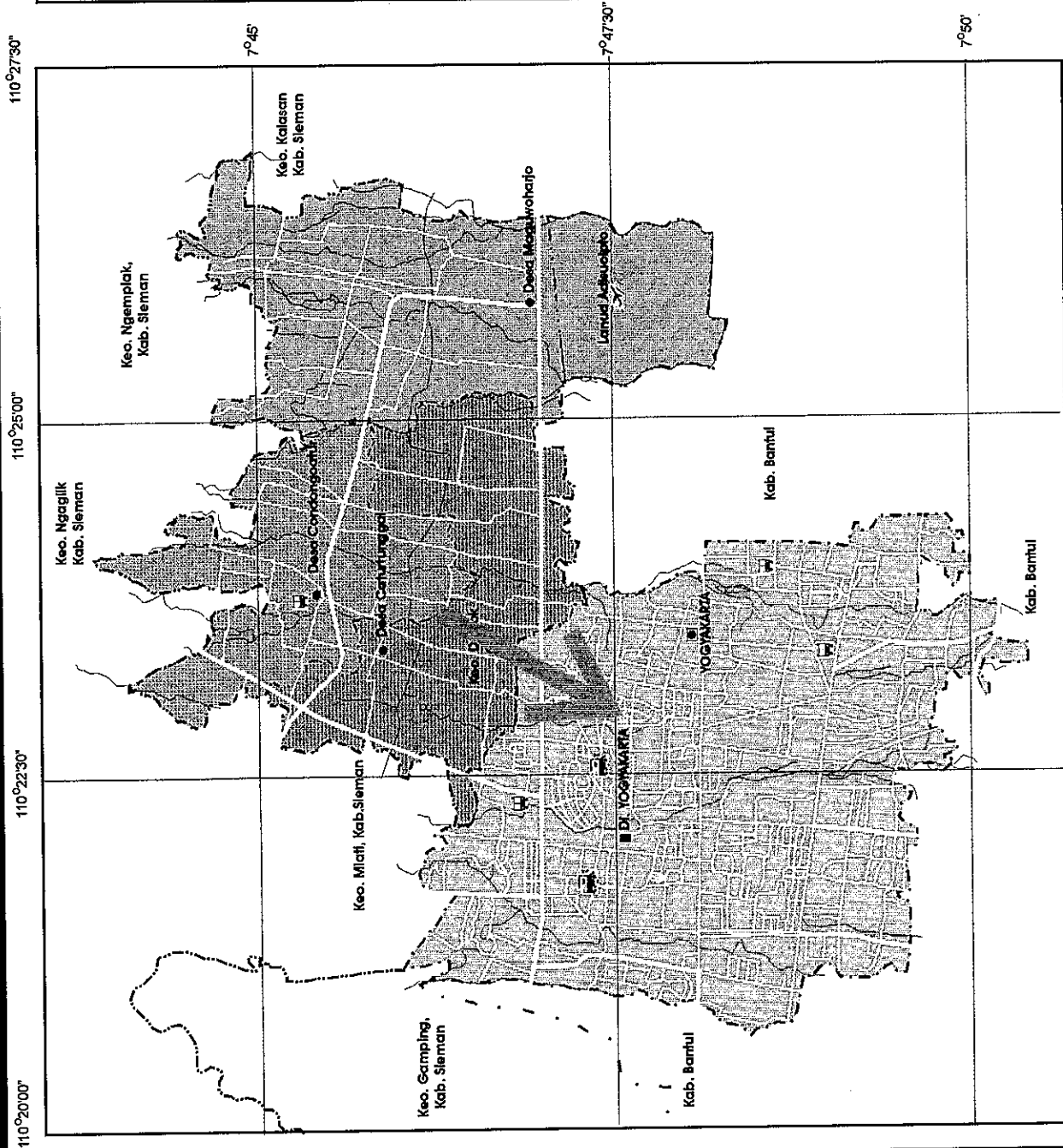
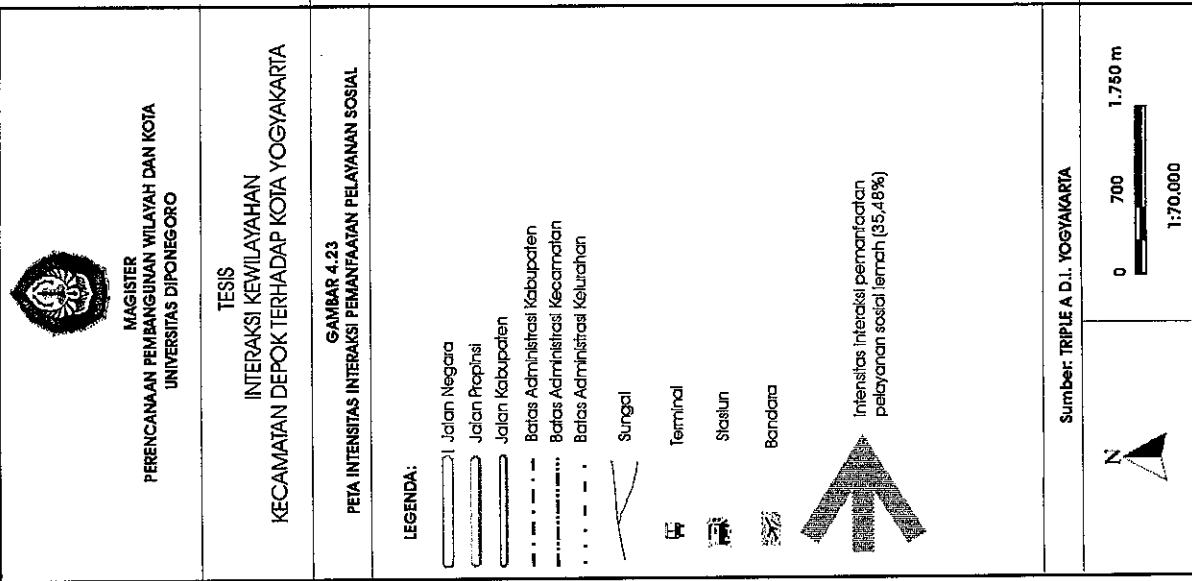
Dari pemanfaatan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan tersebut, untuk dapat mengetahui intensitas interaksi pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial maka dilakukan perhitungan, dengan hasil sebagai berikut:

**TABEL IV.34**  
**PERHITUNGAN INTENSITAS**  
**PEMANFAATAN PELAYANAN SOSIAL**

No	Keterangan	Keterkaitan internal (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kota Yogyakarta (%)	Intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta	Keterkaitan Kec. Depok terhadap Kec. Lain (%)	Keterkaitan Kec. Depok terhadap wil. Luar Kabupaten Sleman & Kota Yogyakarta (%)
1	Fasilitas pendidikan	46,82	42,71	Sedang	5,77	4,70
2	Fasilitas Kesehatan	56,94	28,25	Lemah	14,80	0
	Rata-rata	51,88	35,48	Lemah	10,29	2,35

Sumber: Hasil analisis, 2004

Berdasar hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan pelayanan fasilitas sosial adalah lemah. Ini berarti Kecamatan Depok telah cukup mampu memenuhi kebutuhan penduduknya akan pelayanan sosial.



#### 4.4.4. Interaksi Kewilayahan

Berdasarkan analisa-analisa sebelumnya terhadap keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial dan keterkaitan pemanfaatan pelayanan sosial, maka pada bagian ini akan disarikan intensitas interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta secara keseluruhan.

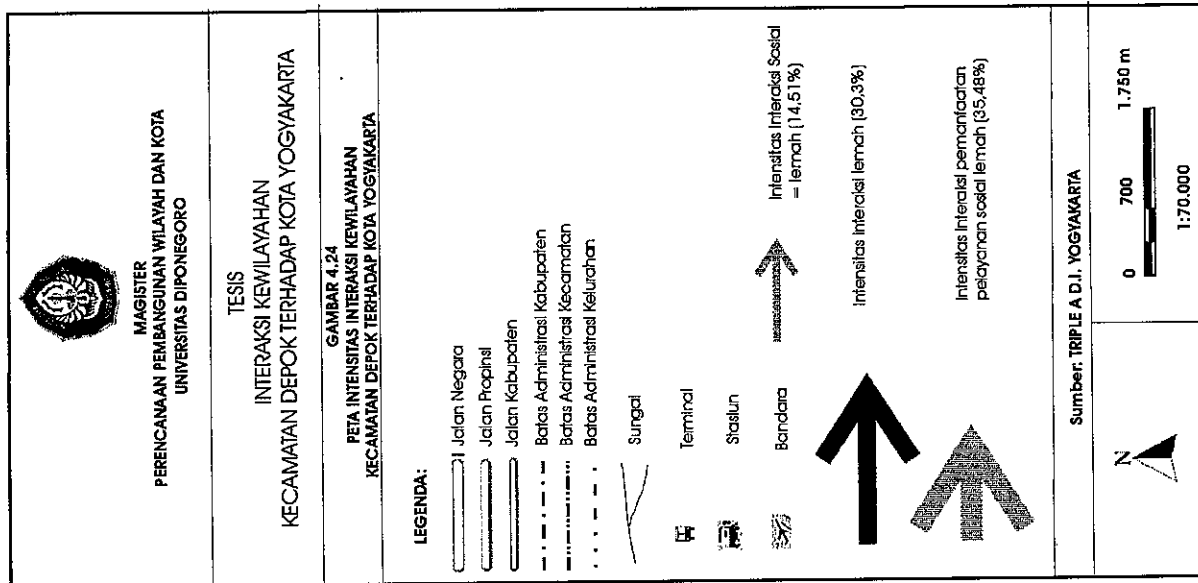
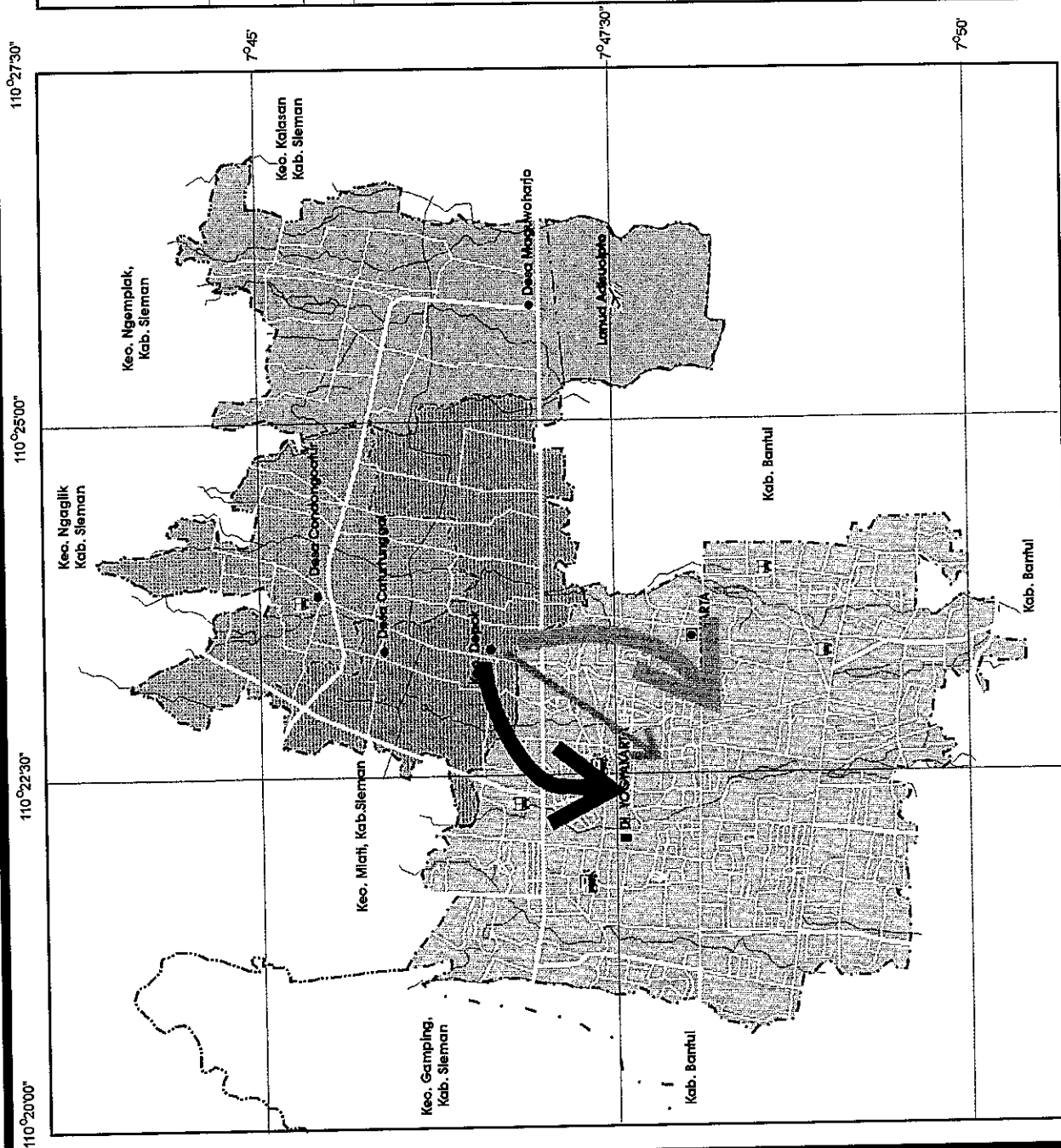
Rekap hasil analisa terhadap variabel-variabel studi interaksi kewilayahan ditunjukkan pada Tabel IV.35

**TABEL IV.35**  
**REKAPITULASI HASIL ANALISIS**

	Variabel Penelitian	Persentase	Kategori
1.	Keterkaitan ekonomi	<b>30,3</b>	<b>Lemah</b>
a.	Keterkaitan produksi	17,45	Lemah
b.	Aliran Pendapatan	0	Lemah
c.	Aliran Modal	50,50	Sedang
d.	Pola/Kebiasaan Belanja Konsumen	53,25	Sedang
2.	Keterkaitan Sosial	<b>14,51</b>	<b>Lemah</b>
3.	Keterkaitan Pemanfaatan Pelayanan Sosial	<b>35,48</b>	<b>Lemah</b>
a.	Pemanfaatan Pelayanan Pendidikan	42,71	Sedang
b.	Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan	28,25	Lemah

Sumber: Hasil analisis, 2004

Dari rekap hasil analisis terhadap variabel penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan intensitas interaksi wilayah Kecamatan Depok adalah lemah. Hasil ini mengandung makna bahwa Kecamatan Depok tidak tergantung kepada Kota Yogyakarta. Meskipun ada beberapa item dalam interaksi yang menunjukkan bahwa Kecamatan Depok tergantung kepada Kota Yogyakarta, namun secara keseluruhan Kecamatan Depok tidak memiliki ketergantungan terhadap Kota Yogyakarta.



#### **4.5. Implikasi Hasil Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta**

Dari hasil analisis diketahui bahwa pada kegiatan pertanian kurang terjadi keterkaitan ke belakang terhadap Kota Yogyakarta. Makna positif dari hasil ini adalah bahwa kebutuhan petani akan bahan baku sudah lebih banyak dipenuhi oleh Kecamatan Depok sendiri. Sebagai implikasi positif adalah tidak banyak uang yang lari dari Kecamatan Depok untuk memenuhi kebutuhan petaninya. Uang yang beredar di dalam wilayah akan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi wilayah.

Satu hal yang agak mengkhawatirkan adalah peran Koperasi Unit Desa di Kecamatan Depok yang sudah kurang berorientasi pada kebutuhan utama petani, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pada keterkaitan ke depan kegiatan pertanian juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu interaksinya terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Hasil ini dapat diartikan kurangnya kemampuan kegiatan pertanian untuk menembus pasar Kota Yogyakarta dan bisa juga diartikan bahwa hasil produksi pertanian secara keseluruhan terserap oleh pasar di Kecamatan Depok sendiri. Kenampakan fisik di lapangan menunjukkan kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa lahan pertanian sudah sangat terbatas sehingga produksi pertanian juga tidak terlalu banyak sehingga dalam pemasarannya hanya cukup untuk memenuhi permintaan lokal.

Keterkaitan ke belakang yang lemah terhadap Kota Yogyakarta juga terjadi untuk kegiatan industri. Implikasi dari hasil ini adalah positif bila ternyata keterkaitan ke belakang terhadap bahan baku untuk di dalam wilayah Kecamatan Depok sendiri kuat. Pada kenyataannya yang terjadi pada kegiatan industri di Kecamatan Depok sendiri tidak demikian, sehingga kegiatan industrinya kurang berakar pada sumber daya lokal. Kegiatan

industri lebih banyak tergantung pada wilayah lain yang relatif jauh. Ini akan mengakibatkan terjadinya aliran uang ke luar wilayah Kecamatan Depok. Ketergantungan ini tidak akan menimbulkan efek negatif terhadap kegiatan usaha sendiri bila akses ke lokasi penyedia bahan baku cukup baik/lancar.

Kegiatan industri di Kecamatan Depok hanya membutuhkan satu jenis bahan baku saja dari Kota Yogyakarta. Nilai pembelianpun tidak terlalu banyak. Akan tetapi bahan baku itu justru menjadi ciri khas bagi hasil industri. Oleh karena itu, bahan baku tersebut dapat dikatakan penting. Sehingga meskipun interaksinya lemah, namun perlu diperhatikan akses kepada bahan baku tersebut. Pada kenyataannya, kelancaran transportasi menjadi hambatan yang cukup mengganggu dimana kecenderungan yang terjadi adalah bahwa ruas-ruas jalan di perbatasan menuju ke Kota Yogyakarta semakin padat begitu juga untuk ruas-ruas jalan utama di Kota Yogyakarta yang mengakibatkan waktu perjalanan menjadi lebih lama.

Pada keterkaitan ke depan, hasil industri Kecamatan Depok lebih banyak diserap oleh wilayah lain di luar Kota Yogyakarta, sehingga interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta lemah. Karena jangkauan pasarnya yang sudah lebih luas, maka perlu adanya dukungan akses ke pasar hasil industri.

Hasil untuk kegiatan perdagangan pada keterkaitan ke belakang menunjukkan adanya interaksi dengan intensitas sedang kepada Kota Yogyakarta dalam menyediakan bahan baku perdagangan (barang dagangan untuk diperdagangkan kembali). Makna negatifnya adalah kegiatan perdagangan di Kecamatan Depok masih tergantung pada Kota Yogyakarta, sehingga akan banyak mengalir uang ke Kota Yogyakarta. Sementara dari sisi pedagang, ketergantungan ini tidak menjadi masalah apabila aksesnya cukup mudah sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya.

Pada aliran ke depan ternyata Kecamatan Depok kurang memiliki interaksi terhadap Kota Yogyakarta (interaksi lemah). Ini berarti kegiatan perdagangan Kecamatan Depok kurang bisa bersaing dengan pelaku-pelaku pedagang dari Kota Yogyakarta sehingga kurang mampu menembus pasar Kota Yogyakarta. Ini dapat dimaklumi karena untuk menembus pasar Kota Yogyakarta persaingannya kuat. Secara tidak langsung tingginya persaingan tercermin dari tingginya tingkat pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.

Kelangsungan hidup kegiatan perdagangan tidak akan terlalu menghadapi masalah bila pasar Kecamatan Depok mampu menyerap komoditas yang diperdagangkan. Bila melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk yang pesat di Kecamatan Depok dapat dikatakan pasar Kecamatan Depok cukup prospektif sebagai pasar. Namun perlu juga diperhatikan bahwa besarnya pasar di Kecamatan Depok juga akan mengundang masuknya pelaku-pelaku ekonomi lain yang memiliki kemampuan modal lebih besar.

Hal yang sama dengan kegiatan perdagangan adalah yang terjadi pada kegiatan jasa di Kecamatan Depok.

Secara keseluruhan, dalam keterkaitan produksi dapat dikatakan bahwa adanya interaksi secara *backward* tidak akan berakibat negatif terhadap pengembangan wilayah selama akses terhadap bahan baku tersedia dengan cukup sehingga menjamin efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Sementara dalam keterkaitan *forward*, kiranya perlu diperkuat interaksi terhadap Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta cukup menjanjikan pasar. Akan tetapi perlu disiapkan dulu kemampuan bersaing pelaku-pelaku usaha yang ada di Kecamatan Depok.

Aliran pendapatan merupakan aspek yang juga penting diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Pemanfaatan pendapatan untuk kegiatan-kegiatan konsumsi akan



memberikan efek bagi banyak kegiatan lain secara berantai. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya aliran pengeluaran pendapatan di dalam wilayah akan semakin baik bagi perkembangan wilayah yang dimaksud. Sementara dari aliran masuk pendapatan suatu wilayah akan diuntungkan bila semakin banyak aliran masuk pendapatan, misalnya dari *transfer* atau *remittance* karena aliran-aliran itu merupakan potensi bagi pembiayaan pembangunan.

Hasil analisis terhadap aliran pendapatan di Kecamatan Depok menunjukkan bahwa interaksinya terhadap Kota Yogyakarta lemah, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai tujuan aliran rutin dari pendapatan bagi penduduk Kecamatan Depok. Maknanya adalah bahwa pendapatan penduduk banyak dimanfaatkan di dalam wilayah Kecamatan Depok sendiri. Hal ini memberikan keuntungan bagi wilayah Kecamatan Depok. Sementara dari sisi Kota Yogyakarta sebagai sumber pendapatan masih perlu upaya peningkatan sehingga akan lebih banyak tersedia cadangan modal untuk pembiayaan pembangunan.

Pembentukan modal memegang dua macam fungsi dalam pembangunan ekonomi, yaitu untuk menciptakan permintaan bagi hasil produksi penduduk/masyarakat dan untuk menambah kapasitas produksi suatu wilayah. Oleh karena itu, ketersediaan modal yang cukup di suatu daerah akan sangat berperan dalam pembangunan wilayah.

Hasil analisis terhadap aliran modal menunjukkan intensitas interaksi yang sedang terhadap Kota Yogyakarta. Ini berarti Kecamatan Depok cukup tergantung pada Kota Yogyakarta dalam hal permodalan. Kecenderungan yang tampak dari hasil survei adalah bahwa terjadi lebih banyak pengakumulasian modal ke Kota Yogyakarta bila dibandingkan dengan pemanfaatan modal dari Kota Yogyakarta.

Implikasi negatif dari hasil temuan ini adalah bila kecenderungan tersebut terus meningkat maka ketergantungan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta juga akan semakin meningkat. Akumulasi modal yang lebih banyak di Kota Yogyakarta sementara pemanfaatan modal lebih banyak dari Kecamatan Depok akan membuat kemampuan penyediaan modal menjadi sangat terbatas.

Secara internal, menurut Ambardi dan Prihawantoro (2002;31), masyarakat menginginkan kesempatan kerja yang tinggi, harga yang stabil, barang dan jasa yang tersedia serta terdistribusi dengan baik. Dari sasaran masyarakat tersebut yang terkait dengan studi ini adalah ketersediaan dan distribusi barang dan jasa dengan baik.

Dengan melihat pola belanja masyarakat akan terlihat apakah wilayah setempat telah mampu menyediakan barang dan jasa yang diperlukan penduduknya dengan baik. Dari hasil studi terhadap kebiasaan berbelanja penduduknya akan barang-barang tingkat rendah dapat diketahui bahwa interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah sedang. Ini berarti penduduk Kecamatan Depok tidak terlalu tergantung pada Kota Yogyakarta dalam mendapatkan barang-barang tingkat rendah.

Sedangkan pada barang-barang tingkat tinggi, terlihat bahwa intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah kuat. Ini berarti penduduk Kecamatan Depok sangat tergantung pada Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhannya akan barang-barang tingkat tinggi.

Kecenderungan pembelanjaan barang-barang tingkat tinggi ke Kota Yogyakarta tidak akan menjadi masalah bila akses terhadap pusat-pusat penyediaan barang-barang tingkat tinggi cukup mudah.

Interaksi sosial yang kuat antar wilayah yang berbeda akan memberikan manfaat dalam hal penyebaran informasi antar penduduk. Pada studi ini hasil terhadap interaksi

sosial menunjukkan lemahnya interaksi penduduk Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta. Kondisi ini dimungkinkan karena sifat kekotaan di kedua wilayah, dimana suatu wilayah yang bersifat kekotaan memiliki ciri penduduk yang secara sosial hubungan antar penghuninya serba longgar, acuh dan relasinya tak pribadi. Selain itu, ada kemungkinan karena keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta telah mengakibatkan migrasi penduduk ke wilayah-wilayah di luar Kota Yogyakarta.

Rendahnya interaksi sosial ini mengakibatkan penduduk Kecamatan Depok kurang dapat menggali informasi secara langsung tentang perkembangan di Kota Yogyakarta. Hal ini tidak akan terlalu menjadi masalah selama media-media informasi yang lain dapat berkembang dengan baik dan menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Depok.

Dalam lingkup internal, suatu wilayah berfungsi melayani kegiatan sosial ekonomi bagi penduduknya, diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana. Kecenderungan penyediaan dan pemanfaatan pelayanan sosial Kecamatan Depok menunjukkan bahwa untuk pelayanan pendidikan penduduknya Kecamatan Depok masih cukup tergantung pada Kota Yogyakarta (interaksi sedang). Adapun fasilitas pendidikan yang masih diandalkan penduduknya dari Kota Yogyakarta adalah pada fasilitas pendidikan menengah, baik tingkat pertama maupun tingkat atas. Alasan yang banyak mendasari dipilihnya Kota Yogyakarta dalam mendapatkan pendidikan menengah adalah alasan mutu/kualitas.

Sedangkan untuk pendidikan dasar dan perguruan tinggi, Kecamatan Depok sudah mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Pada pendidikan dasar, selain sarana pendidikan terdistribusi dengan baik, juga ada pertimbangan fisik para orang tua dalam menyekolahkan anaknya sehingga lebih memanfaatkan pendidikan dasar dari wilayah yang

dekat dengan tempat tinggal. Sedangkan pada pemanfaatan fasilitas pendidikan tinggi, sarana pendidikan ini cukup banyak tersebar di Kecamatan Depok. Bahkan jangkauan pelayanannya tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Depok atau Kabupaten Sleman dan Yogyakarta saja, namun sudah memiliki jangkauan nasional.

Implikasi dari hasil studi ini adalah perlunya dukungan akses agar lebih mudah mencapai lokasi sarana pelayanan dan agar sarana yang ada di Kecamatan Depok dapat dimanfaatkan secara luas oleh wilayah sekitarnya.

Sementara pada pelayanan fasilitas kesehatan intensitas interaksi terhadap Kota Yogyakarta tergolong lemah karena ketergantungan terhadap fasilitas kesehatan terhadap Kota Yogyakarta hanya untuk fasilitas kesehatan tingkat tinggi (rumah sakit). Sementara untuk layanan kesehatan tingkat rendah sudah cukup tersedia di Kecamatan Depok. Implikasi hasil studi ini adalah perlunya penyediaan akses yang memadai mengingat pemanfaatan pelayanan kesehatan tinggi biasanya diperlukan pada saat mendesak (*emergency*), sehingga kelancaran akses sangat menentukan.

Secara keseluruhan, interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah lemah. Hasil ini bisa mengindikasikan bahwa Kecamatan Depok telah tumbuh menjadi tempat pusat yang baru. Implikasi dari tumbuhnya Kecamatan Depok adalah meningkatnya daya tarik wilayah bagi penduduk wilayah lainnya. Pada wilayah-wilayah seperti ini ada kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga terjadi pada Kecamatan Depok.

Pertambahan penduduk secara terus menerus akan mengakibatkan wilayah menjadi terlalu padat (*congested*). Akibatnya perlu penciptaan sarana ekonomi dan sosial yang lebih banyak.

#### 4.6. Identifikasi Hambatan Dalam Interaksi Kewilayahan Kecamatan Depok Terhadap Kota Yogyakarta

Beberapa hambatan yang dirasakan oleh responden dalam berinteraksi dengan Kota Yogyakarta akan disajikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi. Berikut adalah inventarisasi tanggapan responden atas hambatan yang dirasakan responden dalam berinteraksi dengan Kota Yogyakarta:

**TABEL IV.36**  
**HAMBATAN INTERAKSI KEWILAYAHAN KECAMATAN DEPOK**  
**TERHADAP KOTA YOGYAKARTA**

Keterangan	Hambatan
<b>Pertanian</b>	
<i>Backward Linkage</i>	Kesulitan alat transportasi
<i>Forward Linkage</i>	Keterbatasan sarana transportasi Keterbatasan modal Terlalu banyaknya pesaing
<b>Industri</b>	
<i>Backward Linkage</i>	-
<i>Forward Linkage</i>	Keterbatasan modal
<b>Perdagangan</b>	
<i>Backward Linkage</i>	Transportasi
<i>Forward Linkage</i>	Terlalu banyaknya pesaing Keterbatasan modal
<b>Jasa</b>	
<i>Backward Linkage</i>	Transportasi
<i>Forward Linkage</i>	Keterbatasan modal
<b>Lain-lain</b>	
<i>Backward Linkage</i>	Transportasi
<i>Forward Linkage</i>	Keterbatasan modal

Sumber: Hasil analisis, 2004

Berdasarkan inventarisasi tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya permasalahan dalam berinteraksi secara *backward* adalah pada hambatan transportasi yang berupa sulitnya memperoleh alat transportasi karena terbatasnya armada yang menjangkau wilayah-wilayah pinggiran Kecamatan Depok, dan kepadatan arus lalu lintas yang menjadikan waktu perjalanan menjadi lebih lama. Selain itu, di Kota

Yogyakarta sendiri saat ini dirasakan lahan parkir semakin kurang, sehingga responden sering kerepotan mencari lahan parkir terutama untuk kendaraan roda empat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi responden yang memanfaatkan kendaraan besar untuk mendatangkan bahan baku dalam jumlah besar.

Sementara dari keterkaitan ke depan, diketahui bahwa selain masalah transportasi, responden juga mengalami kesulitan permodalan serta terlalu banyaknya pesaing yang bermain di pasar Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Intensitas interaksi ekonomi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta termasuk kategori interaksi lemah
- Intensitas interaksi sosial Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta termasuk kategori interaksi lemah
- Intensitas interaksi pemanfaatan pelayanan sosial Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta termasuk kategori interaksi lemah

Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa intensitas interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah interaksi dengan intensitas lemah.

Secara rinci intensitas interaksi untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Interaksi dalam hal produksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori intensitas lemah. Ini berarti Kecamatan Depok tidak tergantung pada Kota Yogyakarta dalam kegiatan produksinya. Beberapa kegiatan dalam interaksi produksi yang masih menunjukkan adanya ketergantungan adalah pada kegiatan perdagangan yang tergantung pada penyediaan barang-barang dagangan dari pedagang besar di Kota Yogyakarta, serta kegiatan jasa yang tergantung pada Kota Yogyakarta untuk penyediaan bahan-bahan pendukung kegiatan jasa.

- b. Keterkaitan produksi ke depan dalam interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta cenderung masih lemah. Ini dikarenakan sifat kegiatan produksi yang ada adalah kegiatan produksi hilir, sementara sifat kegiatan produksi potensial yang dapat menciptakan daya keterkaitan yang besar adalah jenis industri hulu. Secara teoritis (atau potensial), industri ini mempunyai kemampuan *linkage*, terutama *forward linkage*, yang besar.
- c. Berdasarkan aliran pendapatan diketahui bahwa penduduk Kecamatan Depok tidak memperoleh aliran masuk pendapatan dari Kota Yogyakarta dan tidak melakukan pengeluaran secara rutin atas pendapatannya ke Kota Yogyakarta. Hal ini memberikan keuntungan bagi Kecamatan Depok berupa perputaran uang di dalam wilayah, sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi setempat.
- d. Berdasarkan aliran modal dapat diketahui bahwa interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah interaksi dengan intensitas sedang. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Depok masih bergantung pada Kota Yogyakarta dalam permodalan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan menabung dalam jumlah yang lebih besar ke Kota Yogyakarta. Akibatnya cadangan modal lebih banyak terakumulasi di Kota Yogyakarta. Ini cukup merugikan dengan adanya kenyataan bahwa ternyata banyak responden yang menyatakan kesulitan permodalan.
- e. Dari penelitian terhadap pola/kebiasaan belanja penduduk Kecamatan Depok dapat diketahui bahwa intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta untuk barang-barang tingkat rendah adalah interaksi yang sedang. Hasil ini diperkuat pengakuan sebagian responden yang menyatakan biasa berbelanja barang-barang tingkat rendah ke Kota Yogyakarta dalam jangka waktu sebulan sekali. Untuk barang-barang tingkat rendah, frekuensi pembelian sebulan sekali dapat dikatakan kurang



*intense*. Namun dengan memperhatikan karakteristiknya yang merupakan barang dengan range dan threshold kecil hasil ini dapat dimaklumi karena barang-barang tingkat rendah biasanya dapat dipenuhi secara lokal.

- f. Penelitian terhadap barang-barang tingkat tinggi menunjukkan intensitas interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta yang kuat. Biasanya barang-barang dan jasa tingkat tinggi memang terdapat di kota-kota besar yang penduduknya banyak. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila barang-barang tingkat tinggi lebih banyak tersedia di Kota Yogyakarta yang dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki hirarki I.
- g. Interaksi sosial Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dapat dikatakan lemah. Hal ini karena kurangnya frekuensi kunjungan dan kurangnya keterlibatan terhadap kegiatan-kegiatan baik kekeluargaan ataupun kegiatan sosial dengan orang-orang lain di Kota Yogyakarta. Meskipun kurangnya frekuensi kunjungan dapat memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu akibat tidak terbuangnya waktu pada kegiatan non produktif, namun kurangnya frekuensi kunjungan dan acara rutin bersama akan menghalangi kesempatan memperoleh informasi dan menggali pengalaman dari orang lain yang dapat memotivasi orang ke pola pikir positif.
- h. Hasil penelitian atas pemanfaatan fasilitas pendidikan menunjukkan interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta dengan intensitas sedang. Kecenderungan untuk memanfaatkan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta adalah pada pendidikan menengah, yaitu SMP dan SMA. Sedangkan untuk pendidikan dasar dan pendidikan tinggi sudah dipenuhi oleh Kecamatan Depok.
- i. Hasil penelitian terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rendah (Puskesmas dan dokter praktek) ada

kecenderungan pemanfaatan fasilitas kesehatan setempat. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat tinggi (rumah sakit) terjadi kecenderungan pemanfaatan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, maka pada bagian ini akan disampaikan rekomendasi yang berupa usulan bagaimana menindaklanjuti kondisi interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta agar adanya interaksi dapat memberikan manfaat serta dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin menyertai adanya interaksi tersebut. Selain itu, rekomendasi juga akan diusulkan untuk pengembangan studi lanjutan.

Usulan terhadap tindak lanjut interaksi Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Agar terjadi efisiensi baik waktu maupun biaya terutama dalam mendapatkan bahan baku, dan untuk memanfaatkan pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan dari Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya mengupayakan akses yang baik bagi penduduknya. Begitupula agar tercipta eskpor (*forward linkage*) perlu dukungan akses ke wilayah luar. Dari hasil studi, akses yang masih menjadi masalah adalah berkaitan dengan transportasi, dimana terjadi kecenderungan pemadatan ruas-ruas jalan terutama yang berbatasan dengan wilayah-wilayah besar lainnya. Termasuk terhadap Kota Yogyakarta. Peningkatan daya tampung jalan perlu dilakukan agar arus kendaraan lebih lancar. Selain itu, sarana angkutan juga belum menjangkau wilayah-wilayah yang lebih dalam.
- b. Agar mampu bersaing dengan pelaku-pelaku usaha di Kota Yogyakarta dalam memperoleh pasar bagi hasil produksinya maka Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan memfasilitasi permodalan bagi kegiatan usaha penduduknya. Meminta

penduduk untuk menabung di wilayah setempat sulit dilakukan karena berkait dengan faktor pribadi misalnya kepercayaan terhadap lembaga yang dipilih. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan program-program untuk memperkuat modal penduduk, seperti program-program KUT. Rekomendasi pada point a. juga diperlukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sumber permodalan dari wilayah luar.

- c. Pembangunan hanya akan timbul selain karena adanya modal manusia dan karena adanya modal dana. Oleh karena itu, selain memfasilitasi permodalan, Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya juga meningkatkan program-program pendidikan yang sifatnya memperkuat manajemen usaha. Perlunya memperkuat manajemen usaha dimaksudkan agar program-program kredit permodalan yang diberikan dapat berjalan lancar dalam arti tidak mengalami kemacetan akibat penggunaannya yang tidak produktif. Kerugian bila program kredit permodalan mengalami kemacetan adalah berkurangnya kesempatan pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan kesempatan memperoleh kredit yang sama dan semakin terbebannya pelaku usaha untuk mengembalikan kredit akibat tunggakannya..
- d. Lemahnya interaksi kewilayahan Kecamatan Depok dapat disebabkan karena Kecamatan Depok telah tumbuh menjadi wilayah kota. Akibat perkembangannya tersebut, Kecamatan Depok menarik bagi masuknya penduduk dari wilayah lain. Bila harus terus menerus menampung penduduk, dikhawatirkan Kecamatan Depok akan menjadi terlalu padat (*congested*), sehingga timbul masalah-masalah semakin berkurangnya kesanggupan prasarana untuk melayani semua penduduk, misalnya masalah perumahan dan transportasi. Selain itu juga dikhawatirkan akan semakin banyak terjadi pelanggaran penggunaan tanah untuk kepentingan yang lain. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Sleman harus mempersiapkan program-program untuk mengantisipasi dengan menyediakan perumahan susun, peningkatan kapasitas jalan, dan penegakan hukum atas aturan guna lahan.

Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan dari studi ini, maka dalam pengembangan studi lanjutan berkaitan dengan interaksi kewilayahan Kecamatan Depok terhadap Kota Yogyakarta direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian tentang keterkaitan produksi akan lebih akurat menggunakan Model *Interregional Input-Output* (Model IRIO). Dengan model ini transaksi barang dan jasa antar unit ekonomi terkecil antar wilayah secara konseptual dapat di "tangkap." Untuk menggunakan model ini hendaknya disiapkan dana yang cukup besar karena mengandung biaya dalam uang dan metodologi yang cukup mahal.
- b. Untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya dan lebih dapat mewakili keseluruhan populasi perlu adanya penelitian dengan jumlah sample yang lebih banyak. Meskipun mengacu pada pendapat Sugiarto (2001; 10) bahwa pada umumnya suatu sampel lebih dari 30 bisa dikatakan telah dapat memberikan ragam yang stabil sebagai pendugaan ragam populasi, namun semakin besar sampel akan memberikan hasil yang semakin mewakili kondisi sebenarnya dalam populasi.
- c. Perlunya studi lebih lanjut yang juga melibatkan observasi di Kota Yogyakarta agar diperoleh gambaran interaksi yang lebih sempurna.
- d. Untuk melengkapi hasil temuan studi ini, perlu ada penelitian lanjutan tentang keterkaitan-keterkaitan lainnya (keterkaitan fisik, keterkaitan pergerakan penduduk, keterkaitan teknologi serta keterkaitan politik, administratif dan organisasi).

- e. Studi ini menggunakan desain survai secara deduksi, yaitu variabel teori diuji secara empiris. Untuk studi lanjutan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih sempurna perlu dilakukan studi dengan pendekatan induksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abler, Ronald., et.al. 1972. *Spatial Organization: The Geographer's View of the World*. London: Prentice-Hall International, Inc.
- Ambardi, Urbanus Murti dan Socia Prihawantoro, 2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: P2KTPW-BPPT
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. 4<sup>th</sup> Edition. Westport: Praeger Publisher.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Blunden, John., et al. 1978. *Fundamentals of Human Geography: A Reader*. London: Harper & Row Publishers.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Cox, Kevin R. 1972. *Man, Location, & Behavior*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Daldjoeni, N. 1992. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alumni
- \_\_\_\_\_. 2003. *Geografi Kota dan Desa*, Edisi Kedua, Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Haynes, Kingsley E., A. Stewart Fotheringham. 1984. *Gravity and Spatial Interaction Models*. England: Sage Publications, Inc.
- Isard, Wilard. 1961. *Methods of Regional Analysis*. New York: John Wiley & Sons
- Jayadinata, Johara T. 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Edisi Ketiga. Bandung: Penerbit ITB
- Johnston, R.J., et.al. 1994. *The Dictionary of Human Geography*. Blackwell Reference.

- Kartono, K. 1992. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mander Maju
- Kerlinger, Fred N. 1998. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Koestoer, Raldi H., et.al. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, et.al. 2001. *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Kusmayadi, dan Endar Sugiarto. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Laxy J. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. 2001. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rondinelli, Dennis A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis: The Spatial Dimensions of Development Policy*. London: Westview Press.
- Sekaran, Uma. 1984. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, 2<sup>nd</sup> Edition. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Short, John R. 1984. *An Introduction to Urban Geography*. London: Routledge and Kegan Paul Plc.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Soefaat, et.al (eds). 1997. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Sugiarto, et.al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Warpani, Suwardjoko. 1980. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung: Penerbit ITB

## KOLOKIUUM / SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Widodo, Satriyo C. 2002. "Interaksi Kecamatan di Wilayah Pinggiran Metropolitan dengan Kota Induknya (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Boja dengan Kota Semarang)". Kolokium tidak diterbitkan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

Sodikin, Djuang Fadjar. 2002. "Pengaruh Cirebon Terhadap Daerah Belakangnya di Kabupaten Cirebon". Tugas Akhir tidak diterbitkan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

## TERBITAN TERBATAS

Setyono, Jawoto S. 2002. *Pendekatan dan Strategi dalam Pengembangan Wilayah*. Bahan Kuliah. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah & Kota (MPPWK) UNDIP

## JURNAL, MEDIA INFORMASI UMUM DAN INTERNET

Rodrigue, Jean-Paul. 2003. "*Spatial Interaction*." Tersedia di alamat: <http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en.htm>

Tacoli, Cecilia. 1998. "Rural-Urban Interactions: A Guide to The Literature". *Environment and Urbanization*. Vol.10. No.1. Halaman 147-166.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / BUKU DATA

*Kabupaten Sleman Dalam Angka*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman. 2000.

*Kabupaten Sleman Dalam Angka*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman. 2001.

*Kabupaten Sleman Dalam Angka*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman. 2002.

*Kecamatan Depok Dalam Angka*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman. 2002.

*Kota Yogyakarta Dalam Angka*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kota Yogyakarta. 2001.

*Kota Yogyakarta Dalam Angka*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kota Yogyakarta. 2002.

*Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Depok Tahun 1998-2000*. Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman. 2000.

*Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok Tahun 1991/1992-2010/2011*. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. 1991.



*Triple A Kabupaten Sleman.* Bappeda bekerjasama dengan Yogyakarta Urban Development Project-YUDP. 2002.

*Triple A Kota Yogyakarta.* Bappeda bekerjasama dengan Yogyakarta Urban Development Project-YUDP. 2002.